

# DIBALIK ANCAMAN KOREA UTARA

*Kajian Tentang Kebijakan Luar Negeri Korea Utara*

ROBBY DARWIS NASUTION, S.IP., M.A.



DIBALIK ANCAMAN KOREA UTARA  
*Kajian Tentang Kebijakan Luar Negeri Korea Utara*

Penulis:  
Robby Darwis Nasution

Hak Cipta © 2018, Robby Darwis Nasution  
Hak Terbit © 2018, Penerbit: Unmuh Ponorogo Press  
Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo 63471  
Telp. (0352) 481124, 487662  
Faks. (0352) 461796  
E-mail: Unmuhpress@umpo.ac.id

Desain Sampul: Tim Unmuh Ponorogo Press

ISBN:  
Cetakan Pertama, September 2018

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopi, atau memperbanyak dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit Unmuh Ponorogo Press

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Untuk Kedua orang Tuaku**

Drs. Sutamto  
Supriyati

### **Untuk Istriku Tercinta**

Risdiana Andriani

### **Untuk Anakku**

Nadia Serenna Darwis  
Nara Adiwijaya Darwis

### **Untuk Teman-Teman S2 HI Angkatan XX**

Terimakasih atas semua support dan doa yang telah dilimpahkan dari proses penulisan sampai dengan terselesainya buku ini. Semoga buku ini bisa berguna dan memberi manfaat bagi semuanya dan terutama bagi Nusa Bangsa dan Negara



## KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis karena terbatasnya literatur kajian tentang Korea Utara dimana Negara ini banyak tertutup dari akses dunia internasional tetapi topik kajian Korea Utara selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagi penstudi kebijakan luar negeri atau keamanan kawasan. Korea Utara menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan akhir-akhir ini karena semua provokasi dan ancaman-ancaman yang dilakukannya menjadikan dunia internasional merasa terancam. Tidak hanya dunia internasional, ancaman-ancaman Korea Utara ini membuat isu keamanan menjadi penting di kawasan asia timur, terutama yang masuk dalam jangkauan rudal Korea Utara. Selain menjadi ancaman, Korea Utara terkenal dengan negara yang sangat tertutup terhadap dunia internasional, hal ini terkait dengan ideologi yang dipakai yaitu ideologi *Juche*. Ideologi *Juche* sendiri secara konseptual berarti otonom dan independen (*Self-Reliance*).

Tindakan *offensive* yang dilakukan rezim Kim Jong Il dan intensitas serangan ini sangat bertolak belakang dengan pada masa rezim Kim Il Sung, perubahan rezim dengan disertai perubahan kebijakan luar negerinya merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Dengan melihat perbedaan iklim domestik dan kemajuan yang dicapai oleh Korea Utara pada dua masa kepemimpinan tersebut, terbukti sangat bertolak belakang di mana pada masa kepemimpinan Kim Il Sung dengan ideologi *Juche*-nya, Korea Utara menjadi negara yang maju di sektor ekonomi dan menjadi negara yang maju seperti Korea Selatan serta kerjasama dengan negara lain terjalin sangat baik. Tetapi pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, Korea Utara menjadi negara yang gagal (*fail state*) tetapi kebijakan

*military first* terbukti membawa kemajuan di sektor militer. Selain itu, intensitas ketegangan antara Korea Utara dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang maupun Amerika terjadi paling banyak terjadi pada masa kepemimpinan Kim Jong Il.

Berbeda dengan arah dan sikap kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh ayahnya, Kim Jong-il telah mengambil sikap yang sama sekali berbeda dimana sebelumnya Kim Il Sung menerapkan kebijakan luar negeri untuk Korea Utara adalah *Juche* maka Kim Jong-il menerapkan *military first*. Tujuan utama dari perubahan dari kebijakan luar negeri ini adalah untuk memelihara rezim dan sekaligus membangun perekonomian nasional dengan memobilisasi militer. Tujuan selanjutnya dari rezim Kim Jong-il memobilisasi militer adalah untuk membangun pembangunan nasional yang kuat melalui politik yang memprioritaskan militer diberbagai sektor lini masyarakat. Bukan saja merubah kebijakan luar negeri, pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, negara Korea Utara lebih aktif untuk melakukan tindakan provokasi dan serangan-serangan baik terhadap Korea Selatan maupun sekutunya (Jepang dan Amerika) walaupun negara pada saat itu dalam keadaan terpuruk.

Setelah meninggalnya Kim Il Sung pada tanggal 8 Juli 1994, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il yang merupakan anaknya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kim Jong Il masih memakai *Juche* sebagai ideologi dan kebijakan luar negeri Korea Utara, tetapi kebijakan untuk memperkuat bidang militer (*Military first*) lebih diutamakan oleh Kim Jong Il. Alhasil, kemajuan pesat dibidang militer bisa dirasakan dengan berhasilnya Korea Utara dalam pengayaan uranium dan membuat senjata nuklir. Dengan mengesampingkan pengembangan sektor ekonomi, pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, ekonomi Korea Utara semakin terpuruk bahkan bisa dikatakan menjadi negara yang gagal (*fail State*).

Perbedaan dari kedua rezim yaitu Kim Il Sung dan Kim Jong Il sangat jelas terlihat disini, dimana masa kepemimpinan Kim Il Sung menggunakan ideologi *Juche* sebagai kebijakan luar negerinya membuat negaranya maju di sektor ekonomi, sedangkan pada masa kepemimpinan Kim Jong Il yang lebih mengedepankan *Military first* telah membuat negaranya semakin terpuruk di sektor ekonomi tetapi sangat maju di bidang militer. Selain itu, intensitas provokasi atau sikap *deterrence* terhadap Korea Selatan, Jepang maupun dunia internasional lebih banyak dilakukan oleh rezim Kim Jong

Il daripada rezim Kim Il Sung. Bahkan pada tahun 2008, ditengah kekurangan pangan Korea Utara malah membeli senjata senilai \$65 juta dalam lima tahun terakhir. Hal ini menggambarkan betapa Kim Jong Il sangat serius mengembangkan militernya daripada ekonomi.

Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi dosen, mahasiswa, pengamat, wartawan, diplomat, para pengambil keputusan serta untuk para pemerhati keamanan Asia Timur. Buku ini terdiri dari 5 Bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, yang berisi pengantar. Bab 2 akan membahas tentang perubahan kebijakan Juche pada masa Kim Il Sung dengan kebijakan *military first* pada masa Kim Jong Il. Dalam bab ini akan menelusuri masa transisi dari Kim Il Sung kepada Kim Jong Il dilihat dari arah kebijakan yang diambil. Selain itu juga akan menelusuri faktor eksternal dan implikasinya terhadap kebijakan yang diambil pada era Kim Jong Il. Setelah melihat perubahan kebijakan dibab sebelumnya, maka di dalam Bab 3 akan lebih fokus melihat keadaan internal dari Korea Utara itu sendiri. Situasi internal ini meliputi ketidak stabilan politik yang terjadi di dalam negeri Korea Utara serta faktor-faktor yang memicu ketidakstabilan politik itu sendiri. Selain itu juga akan dilihat tindakan apa yang Kim Jong Il tempuh untuk mengatasi ketidak stabilan politik tersebut.

Didalam Bab 4 akan membahas tentang upaya Kim Jong Il untuk mendapatkan perhatian dunia internasional. Upaya yang ditempuh akan difokuskan kepada tindakan-tindakan offensive, baik ancaman, uji coba rudal atau serangan langsung. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas tentang sikap kooperatif (perundingan/kerjasama) dan keuntungan/bantuan ekonomi yang didapatkan. Bab 5 adalah kesimpulan, kesimpulan ini adalah hasil analisis dari bab-bab selanjutnya yang tujuannya untuk melihat motif dibalik sikap offensive Korea Utara pada masa Kim Jong Il.

Ponorogo, 27 Agustus 2018

**Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A.**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Tabel .....	xv
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Utara.....	13
A. Perubahan Penyesuaian .....	13
B. Pembangunan Ekonomi Pada Masa Kim Il Sung.....	16
C. Perubahan Struktur Internasional .....	25
D. Perubahan Kebijakan dari Ekonomi ( <i>Juche</i> ) ke Kebijakan Militer ( <i>Military First</i> ) .....	45
Bab III Kepentingan Politik Kim Jong Il.....	53
A. Ketidakstabilan Politik.....	53
B. Penguatan Rezim Berkuasa .....	59
Bab IV Sikap Offensive Korea Utara dan Keuntungan Ekonomi yang Didapat.....	71
A. Sikap Offensive Korea Utara .....	71
B. Kerjasama dan Kesepakatan Internasional .....	85
C. Motif Sikap Offensive Korea Utara.....	92
D. Keuntungan Ekonomi yang Didapat.....	95

Bab V Penutup .....	109
Lampiran-Lampiran.....	123
Biografi Penulis .....	153

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Grafik pendapatan per kapita Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1953-1990 .....	3
<b>Tabel 2.</b>	GNP Per Capita Korea Utara dan Korea Selatan Tahun 1946-1990 .....	3
<b>Tabel 3.</b>	Tindakan Offensive Pada Masa Kepemimpinan Kim Jong Il .....	5
<b>Tabel 4.</b>	Struktur Domestik dan Internasional .....	11
<b>Tabel 5.</b>	Timeline Penerapan UU Reformasi Tanah .....	17
<b>Tabel 6.</b>	World's Largest Economies (1996) .....	32
<b>Tabel 7.</b>	Indikator Perekonomian Global .....	33
<b>Tabel 8.</b>	Pertumbuhan Ekonomi ASEAN, China dan India (2002-2012) .....	34
<b>Tabel 9.</b>	Perbandingan Pendapatan Perkapita antara Korea Utara dan Korea Selatan (1950-2000) .....	38
<b>Tabel 10.</b>	Economic Scales and per Capita GNI in South and North Korea .....	38
<b>Tabel 11.</b>	Indikator Makro Ekonomi Negara Maju .....	41
<b>Tabel 12.</b>	GNP Negara Maju di Asia .....	41
<b>Tabel 13.</b>	Total Belanja Pertahanan per-Negara (2000-2011) ....	42
<b>Tabel 14.</b>	Belanja Militer Negara-Negara di Dunia Tahun 2013	42
<b>Tabel 15.</b>	World nuclear forces, January 2012 .....	45
<b>Tabel 16.</b>	U.S. Assistance to North Korea Missile Range .....	46
<b>Tabel 17.</b>	Lima Negara Dengan Militer Terbesar .....	50

<b>Tabel 18.</b> Tindakan Offensive Korea Utara pada Masa Kim Jong Il .....	75
<b>Tabel 19.</b> Sikap Kooperatif Korea Utara pada Masa Kim Jong Il	87
<b>Tabel 20.</b> Tahapan Penutupan Reaktor Nuklir Yongbyon .....	90
<b>Tabel 21.</b> Kerjasama Ekonomi Antara Korea Utara dan Korea Selatan .....	97
<b>Tabel 22.</b> Grafik Perdagangan Antar Korea .....	98
<b>Tabel 23.</b> Bantuan dari Korea Selatan Kepada Korea Utara Pada Tahun 2001-2012 .....	101
<b>Tabel 24.</b> Bantuan dari Korea Selatan Kepada Korea Utara (Dalam Tahun) .....	103
<b>Tabel 25.</b> Total Bantuan Pangan dari <i>World Food Program</i> (WFP) kepada Korea Utara .....	104

#### DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Reaktor Nuklir dan Pusat-Pusat Pengembangan Nuklir Korea Utara .....	47
<b>Gambar 2</b>	Kepemilikan Senjata Nuklir Di Seluruh Dunia ...	49
<b>Gambar 3</b>	Jangkauan Rudal Korea Utara .....	51
<b>Gambar 4</b>	Alur Tindakan Offensive Korea Utara .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

Korea Utara menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan akhir-akhir ini karena semua provokasi dan ancaman-ancaman yang dilakukannya menjadikan dunia internasional merasa terancam. Tidak hanya dunia internasional, ancaman-ancaman Korea Utara ini membuat isu keamanan menjadi penting di kawasan asia timur, terutama yang masuk dalam jangkauan rudal Korea Utara. Selain menjadi ancaman, Korea Utara terkenal dengan negara yang sangat tertutup terhadap dunia internasional, hal ini terkait dengan ideologi yang dipakai yaitu ideologi *Juche*. Ideologi *Juche* sendiri secara konseptual berarti otonom dan independen (*Self-Reliance*). Ideologi ini dikemukakan Kim Il Sung di depan umum pada Desember 1955, Kim Il Sung mengatakan dalam pidato itu sebagai berikut, “*We are not engaged in any other country’s revolution, but solely in the Korean revolution. This, the Korean revolution, determines the essence of juche in the ideological work of our Party.*” (Amstrong, 2009, hal. 3) Ideologi *Juche* pada kepemimpinan Kim Il Sung lebih mengedepankan Politik, pembangunan ekonomi, dan kerjasama luar negeri. (Amstrong, 2009, hal. 3) Sehingga pada masa itu Korea Utara menjadi negara yang berkembang pesat di bidang ekonomi dan bahkan melebihi kemajuan ekonomi Korea Selatan. Selain itu, Kim Il Sung juga membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan negara lain dalam masalah ekonomi.

Korea Utara merupakan negara dengan tingkat transparansi yang minim, karena negara ini merupakan negara yang sangat tertutup dari hiruk pikuk dunia internasional. Ancaman demi ancaman yang berupa provokasi seringkali dilancarkan oleh negara ini baik kepada negara tetangganya sekaligus musuhnya yaitu

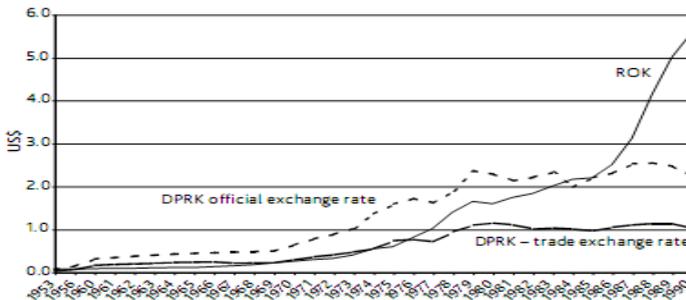
Korea Selatan, maupun kenegara lain yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Seringkali negara ini memaksa PBB untuk mengambil tindakan dengan ancaman-ancaman uji coba nuklir yang dilakukan sehingga setiap gerak-gerik Negara Korea Utara menjadi bagian dari ancaman keamanan internasional. Maka dari itu kajian tentang Kebijakan Luar Negeri Korea Utara selalu menjadi bahan penelitian yang menarik baik bagi penelitik kebijakan luar negeri, penstudi hubungan internasional ataupun penstudi ilmu pemerintahan. Secara umum, studi tentang Korea Utara dapat dikategorikan menjadi Ideologi Juche, Krisis Ekonomi Korea Utara, Ketegangan di semenanjung Korea, Korea Utara sebagai ancaman keamanan Asia Timur dan Sikap *Offensive* Korea Utara. Semua tema tersebut menarik dan penting untuk memahami fenomena Korea Utara dan terutama di kawasan Asia Timur. Akan tetapi sebagai pijakan penelitian, tema sikap *offensive* Korea Utara mungkin akan menjadi sangat relevan untuk penelitian ini.

Pada masa kepemimpinan Kim Il Sung, upaya pembentukan sistem ekonomi sosialis cepat berkembang karena proses nasionalisasi seluruh industri sudah dimulai sebelum pemerintahan dibangun, tidak lama setelah mendapat kemerdekaan dari penjajahan Jepang Sesuai dengan UU Reformasi Tanah yang diumumkan pada Maret 1946, pengembalian tanah dan pembagian kembali tanah itu kepada rakyat umum dengan gratis dilaksanakan, hingga membentuk landasan sistem perkebunan secara kolektif. Pada bulan Agustus tahun yang sama, UU untuk menasionalisasikan pabrik utama, perusahaan, pertambangan, stasiun pembangkit listrik, transportasi, layanan pos, perbankan, organisasi instansi komersial dan budaya diberlakukan. Walaupun kegiatan ekonomi tingkat individu yang berskala kecil diizinkan selama perang Korea untuk melengkapi kekurangan tingkat produksi, sebagian besar ekonomi Korea Utara dinasionalisasikan dan digunakan secara kolektif. Sampai tahun 1958, pertanian, industri kerajinan tangan, dan perdagangan skala kecil semua disatukan dengan bentuk koperasi, sehingga menyelesaikan proses “sosialisme dalam hubungan produksi” (KBS, world.kbs.co.kr, 2013) Pada akhir tahun 1953, Korea Utara mendapatkan pasokan bantuan luar negeri yang dapat diandalkan dari Uni Soviet dan China. Keseimbangan dari kedua penyokong ini sehingga menjadi bagian karakteristik kebijakan luar negeri dimasa Kim Il Sung. (Beal, 2005, hal. 59)

Pada tahun 1953-1976, Korea Utara menjadi negara dengan ekonomi yang bisa dibilang kuat, bahkan bisa berimbang dengan

Korea Selatan. Tetapi pada tahun 1976 pendapatan per kapita dari Korea Selatan mulai meninggalkan Korea Utara, ini dikarenakan pemilihan mata uang dalam perdagangan yang dipakai. Korea Selatan memakai US\$ sedangkan Korea Utara menggunakan Won sebagai mata uang perdagangannya. (Beal, 2005, hal. 62)

**Tabel 1. Grafik pendapatan per kapita Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1953-1990**



Sumber: North Korea The struggle Against American Power. 2005 (Beal, 2005, hal. 62)

**Tabel 2. GNP Per Capita Korea Utara dan Korea Selatan Tahun 1946-1990**

Year	North Korea						South Korea		
	NK won m	GNP		pc GNP		Growth %	GNP US\$m	pcGNP US\$	Growth %
		official	trade	official	trade				
1946	511.9	426.6	232.7	46	25	-	na	na	na
1949	1121.0	934.2	509.5	97	53	-	na	na	na
1953	855.4	712.8	388.8	8.4	46	-	1353	67	-
1956	1610.4	1499.5	732.0	160	78	31.8	1450	66	-1.4
1960	4209.7	3508.0	1913.5	325	177	7.4	1948	79	1.1
1961	4763.4	3969.9	2165.2	357	195	13.1	2103	82	5.6
1962	5290.9	4409.1	2404.9	386	211	11.0	2315	87	2.2
1963	5790.3	4825.3	2632.0	411	225	9.4	2718	100	9.1
1964	6369.3	5307.8	2895.1	44.0	240	9.9	2876	103	9.6
1965	6603.2	5502.6	3001.5	45.4	248	3.6	3006	105	5.8
1966	6986.0	5821.7	3175.5	46.8	255	5.8	3671	125	12.7
1967	7391.2	6159.3	2876.0	48.2	225	5.8	4274	142	6.6
1968	7819.9	6516.6	3042.8	49.6	232	5.8	5226	169	11.3
1969	8263.4	6894.6	3219.2	51.0	239	5.8	6625	210	13.8
1970	10838.2	9031.8	4217.2	65.0	304	31.0	8105	252	7.6
1971	12572.3	11326.4	5327.2	79.4	374	15.9	9456	288	9.1
1972	14583.9	13201.6	6179.6	90.1	422	16.0	10632	318	5.3
1973	17354.8	15634.9	6353.7	104.0	489	18.9	13446	395	14.0
1974	20339.8	21187.3	8618.6	137.4	559	17.1	18701	540	8.5
1975	24407.9	25424.9	11906.3	160.3	751	20.0	20795	590	6.8
1976	27092.7	28221.5	12601.3	173.5	775	10.9	28550	797	13.4
1977	26009.0	27092.7	12097.2	162.4	725	-4.0	36629	1008	10.7
1978	30430.5	32720.9	16360.5	191.2	956	16.9	51341	1392	11.0
1979	34995.0	41660.8	19550.3	237.4	1114	14.9	61361	1640	7.0
1980	35590.0	41383.7	20935.3	229.5	1161	1.7	60327	158.9	-4.8
1981	36479.7	39651.8	20610.0	214.7	1116	2.5	66238	1734	5.9
1982	40930.2	42196.1	19306.7	222.9	1020	12.2	71300	1824	7.2
1983	45923.7	45023.3	21065.9	234.6	1042	12.2	79500	2002	12.6
1984	47163.7	39303.0	19984.6	200.2	1018	2.7	87000	2158	9.3
1985	48437.1	45268.3	19933.0	222.0	978	2.7	89695	2194	7.0
1986	49454.3	48484.6	22176.8	232.4	1063	2.1	102789	2505	12.9
1987	51086.3	54347.1	23872.1	254.4	1117	3.3	128921	3110	13.0
1988	52618.8	55977.5	25056.6	255.8	1145	3.0	172776	4127	12.4
1989	54197.4	55873.6	25808.3	248.1	1146	3.0	211200	4994	6.8
1990	55443.9	57158.6	26401.8	223.3	1031	2.3	237900	5569	9.0

Sumber: North Korea The struggle Against American Power. 2005 (Beal, 2005, hal. 274)

Keterbukaan Korea Utara pada masa kepemimpinan Kim Il Sung terhadap dunia luar terlihat dari kebijakan yang diambil untuk menjalin hubungan atau kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti dengan wilayah Nodric pada tahun 1973, menjalin hubungan diplomatik dengan Australia pada tahun 1974, ikut bergabung dengan World Health Organization (WHO) pada tahun 1973, bergabung dengan the International Atomic Energy Agency (IAEA) dan Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1977. (Beal, 2005, hal. 63)

Setelah meninggalnya Kim Il Sung pada tanggal 8 Juli 1994, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il yang merupakan anaknya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kim Jong Il masih memakai *Juche* sebagai ideologi dan kebijakan luar negeri Korea Utara, tetapi kebijakan untuk memperkuat bidang militer (*Military first*) lebih diutamakan oleh Kim Jong Il. Alhasil, kemajuan pesat dibidang militer bisa dirasakan dengan berhasilnya Korea Utara dalam pengayaan uranium dan membuat senjata nuklir. Dengan mengesampingkan pengembangan sektor ekonomi, pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, ekonomi Korea Utara semakin terpuruk bahkan bisa dikatakan menjadi negara yang gagal (*fail State*).

Perbedaan dari kedua rezim yaitu Kim Il Sung dan Kil Jong Il sangat jelas terlihat disini, dimana masa kepemimpinan Kim Il Sung menggunakan ideologi *Juche* sebagai kebijakan luar negerinya membuat negaranya maju di sektor ekonomi, sedangkan pada masa kepemimpinan Kim Jong Il yang lebih mengedepankan *Military first* telah membuat negaranya semakin terpuruk di sektor ekonomi tetapi sangat maju di bidang militer. Selain itu, intensitas provokasi atau sikap *deterrence* terhadap Korea Selatan, Jepang maupun dunia internasional lebih banyak dilakukan oleh rezim Kim Jong Il daripada rezim Kim Il Sung. Bahkan pada tahun 2008, ditengah kekurangan pangan Korea Utara malah membeli senjata senilai \$65 juta dalam lima tahun terakhir. (BBC, 2008) Hal ini menggambarkan betapa Kim Jong Il sangat serius mengembangkan militernya daripada ekonomi.

Semboyan baru Kim Jong-il, “politik yang mengutamakan militer”, adalah strategi nasional Kim Jong-il yang bertujuan untuk memelihara rejim dan sekaligus membangun ekonomi nasional dengan memobilisasi militer . Untuk menjaga keamanan rejim maupun pertumbuhan ekonomi, Korea Utara secara efektif

berubah menjadi “negara yang mengutamakan militer”. Konsep inti semboyan ini didukung oleh konsep “pembangunan nasional yang kuat”. Yakni, sistem yang mengutamakan militer berarti penjagaan keamanan rejim dan pembangunan nasional kuat melalui “politik yang memprioritaskan militer”. Konsep yang mementingkan militer dalam politik menunjukkan bahwa kubu militer di Korea Utara merupakan satu-satunya aset yang paling kuat dan yang dapat dimobilisasi dengan efektif. (KBS, world.kbs.co.kr, 2013)

Pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, Korea Utara lebih aktif melakukan provokasi dan serangan-serangan baik terhadap Korea Selatan maupun sekutunya (Jepang dan Amerika) walaupun negara pada saat itu dalam keadaan terpuruk.

**Tabel 3. Tindakan Offensive Pada Masa Kepemimpinan Kim Jong Il**

<b>Era-1990</b>	
1998	Uji Coba rudal jarak jauh Taepodong-1 melewati Jepang
1999	Korea Utara menghentikan uji coba rudal jarak jauh
<b>Era-2000-an</b>	
2002	Korea Utara keluar dari NPT karena merasa tidak nyaman dengan sikap AS yang memasukkan Korea Utara sebagai salah satu negara poros setan (Axis of Evil).
Juli 2006	Korea Utara uji coba tujuh rudal, termasuk rudal jarak jauh Taepodong-2
04 Juli, 2006	Korea Utara mengujicoba sejumlah rudal, termasuk rudal jarak jauh yang mungkin bisa menjangkau daratan Amerika Serikat, dalam rentang waktu beberapa jam.
05 Juli, 2006	Korea Utara menguji coba setidaknya 6 peluru kendali, termasuk peluru kendali Taepodong-2, di tengah berbagai peringatan dari beberapa negara.
16 Juli, 2006	Korea Utara menolak keras resolusi PBB yang mengutuk uji coba peluru kendali dan akan tetap menyimpan senjata.
25 Mei, 2007	Korea Utara menembakkan beberapa rudal jarak pendek ke arah perairan Laut Jepang.
19 Juni, 2007	Korea Utara melakukan uji coba peluru kendali jarak pendek ke arah Laut Jepang.

28 Maret, 2008	Korea Utara menembakkan peluru kendali jarak pendek dari pantai barat negara itu sebagai uji coba.
09 Oktober, 2008	Korea Utara sedang mempersiapkan diri untuk meluncurkan 10 rudak jarak pendek, sehingga militer Korea Selatan disiagakan.
05 April, 2009	Korea Utara meluncurkan roket, dari kompleks situs peluncuran Musudan-ri di bagian timur laut Korea Utara sekitar pukul 0230 GMT atau 0930 WIB.
26 Mei, 2009	Media Korea Selatan melaporkan Korea Utara menembakkan dua rudal beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklirnya.
04 Juli, 2009	Korea Utara melakukan serangkaian uji coba rudal jarak jauh di saat Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaan 4 Juli. Berbagai laporan mengatakan sedikitnya enam rudal balistik tipe Scud diluncurkan, dengan jarak jangkauan mencapai 500 kilometer.
26 Agustus, 2009	Korea Utara meluncurkan roket luar angkasa pertama, meskipun satelit ilmu pengetahuan gagal memasuki orbit yang tepat.
27 Januari 2010	Aksi baku tembak terjadi di dekat perbatasan laut yang disengketakan Korea Utara dengan Korea Selatan.
24 Juli 2010	Korea Utara mengancam akan menggunakan “senjata nuklir” sebagai reaksi atas latihan bersama militer Amerika Serikat-Korea Selatan.
23 November 2010	Korea Selatan mengatakan militer Korea Utara menembakkan sekitar 200 peluru artileri ke salah satu pulau Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan bagian barat yang diperebutkan dengan Korea Utara.  Tembakan peluru artileri Korea Utara disebutkan menewaskan seorang tentara Korea Selatan. Sejumlah rumah rusak dan melukai beberapa tentara serta waga sipil.

5 Desember 2010	Korea Utara memperingatkan Korea Selatan agar tidak melakukan provokasi, termasuk latihan militer dengan peluru tajam di batas laut yang dipersengketakan.
-----------------	--

*Diolah dari berbagai sumber*

Dari tabel diatas dapat dilihat begitu banyaknya tindakan *offensive* yang dilakukan rezim Kim Jong Il dan intensitas serangan ini sangat bertolak belakang dengan pada masa rezim Kim Il Sung. Perubahan rezim dengan disertai perubahan kebijakan luar negerinya merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Dengan melihat perbedaan iklim domestik dan kemajuan yang dicapai oleh Korea Utara pada dua masa kepemimpinan tersebut, terbukti sangat bertolak belakang diamana pada masa kepemimpinan Kim Il Sung dengan ideologi *Juche*-nya, Korea Utara menjadi negara yang maju di sektor ekonomi dan menjadi negara yang maju seperti Korea Selatan serta kerjasama dengan negara lain terjalin sangat baik. Tetapi pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, Korea Utara menjadi negara yang gagal (*fail state*) tetapi kebijakan *military first* terbukti membawa kemajuan di sektor militer. Selain itu, intensitas ketegangan antara Korea Utara dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang maupun Amerika terjadi paling banyak terjadi pada masa kepemimpinan Kim Jong Il.

Perjalanan Korea Utara dalam pembuktian eksistensinya sebagai sebuah negara begitu panjang. Berangkat dari tahun 1965, Korea Utara mulai membangun reaktor nuklir di Yongbyon. Dua dekade berikutnya, yakni pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani perjanjian NPT untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Demi melengkapi perjanjian NPT, maka pada tahun 1992 Korea Utara masuk menjadi anggota badan energi atom internasional (IAEA). Pada tahun 2002, Korea Utara keluar dari NPT karena masih tidak nyaman dengan sikap Amerika Serikat yang memasukkan Korea Utara sebagai salah satu negara poros setan (*axis of evil*). Pada tahun 2005, Korea Utara mendeklarasikan diri memiliki senjata nuklir dan pada tahun 2006 mulai mengadakan pengujian. Langkah berikutnya adalah diluncurkannya roket yang diduga mengusung satelit komunikasi Kwangmyongsong-2 pada tanggal 5 April 2009. Peluncuran roket oleh Korea Utara tersebut mendapatkan respon yang baik dari Iran dan khususnya Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dengan mengirimkan 15 tenaga ahli

yang merupakan petinggi senior dari perusahaan pengembangan roket dan satelit Iran (Shahid Hemmat Industrial Group) yang bertugas untuk membantu Korea Utara dalam mensukseskan peluncuran roketnya.

Bahkan untuk menghentikan peluncuran roket Korea Utara, negara tiga serangkai (Jepang, Korea Selatan, dan Amerika) telah menyiapkan senjata rudalnya untuk menembak jatuh roket Korea Utara jika sewaktu-waktu roket jadi diluncurkan. Tetapi, ancaman negara tiga serangkai itu hanya pepesan kosong yang hanya keras dalam retorika. Buktinya adalah roket Korea Utara tetap meluncur tanpa hambatan sama sekali dari musuh-musuhnya. Dan pada Desember 2012 Korea Utara berhasil meluncurkan Roket yang menggemparkan seluruh dunia terlebih lagi bagi negara tiga serangkai (Jepang, Korea Selatan, dan Amerika). Setelah sebelumnya Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat setelah Korea Utara, yang sudah dikenai sanksi-sanksi internasional karena pengujian-pengujian nuklir pada 2006 dan 2009, tetapi Korea Utara tetap mengabaikan seruan baik dari para sahabat maupun seterunya dan tetap melanjutkan peluncuran itu. Sekarang Dewan keamanan PBB memperingatkan kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil setelah tindakan Korea Utara yang disebut Amerika Serikat sebagai “sangat provokatif” itu, sementara Washington serta negara-negara lain yang mencakup Korea Selatan dan Jepang menuntut babak sanksi baru terhadap Pyongyang.

Perkembangan kekuatan militer serta senjata nuklir Korea Utara berdampak pada gangguan keamanan regional Asia Timur dan mengganggu keseimbangan kekuatan negara disekitarnya (Korea Selatan dan Jepang). Hubungan antar negara ini bersifat *zero-sum game*, yang artinya setiap upaya untuk meningkatkan keamanan mempunyai implikasi negatif terhadap keamanan negara lain yang mengganggu keseimbangan kekuatan atau yang dikenal sebagai dilema keamanan (*security dilemma*). (Perwita & Yani, 2011, hal. 126)

Menurut literatur yang sudah penulis kumpulkan, terdapat empat tujuan utama kenapa Korea Utara bersikap offensive, yakni sebagai langkah *deterrence* (penangkalan), sebagai upaya *Balance of Power* (perimbangan kekuatan), Sebagai sarana untuk memperoleh bantuan ekonomi, dan sebagai *Nuclear Diplomacy*. Dari beberapa literatur yang ada dapat ditarik benang merah bahwa, pertama, tujuan dari sikap *offensive* Korea Utara dapat dibagi menjadi empat yaitu *deterrence*, *balance of power*, bantuan pangan, dan *nuclear diplomacy*. Penulis setuju dengan semua analisis tujuan sikap

*offensive* Korea Utara diatas, tetapi ada beberapa hal yang luput dari pandangan literatur diatas, *pertama*, semua analisis diatas tidak menyinggung tentang perubahan rezim dan pengaruhnya terhadap sikap *offensive* Korea Utara yang menurut penulis perubahan rezim ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap *offensive* Korea Utara. Menurut penulis, perubahan rezim dari Kim Il Sung kepada Kim Jong Il merupakan dua rezim yang berbeda orientasinya. Dimana Kim Il Sung lebih memajukan ekonomi dengan ideologi *Juche*-nya sedangkan Kim Jong Il menggunakan *Military first* dengan lebih mementingkan kemajuan militer. *Kedua*, analisis dari literatur review diatas tidak menyinggung sama sekali tentang masalah domestik Korea Utara dan implikasinya terhadap tindakan yang dilakukan. Karena menurut penulis, masalah/iklim domestik adalah salah satu hal yang penting sebagai basis penelitian kita untuk melihat melihat situasi internal dari Korea Utara (seperti krisis ekonomi dan sikap terisolasinya dari dunia luar) dan bagaimana pengaruhnya terhadap tindakan serta kebijakan luar negeri yang diambil.

Untuk menjelaskan fenomena Korea Utara tersebut maka dalam buku ini akan menggunakan *Realist Theory of State Action* dan menggunakan pendekatan sejarah dalam mengungkap pengaruh perubahan rezim terhadap sikap *offensive* yang dilakukan oleh Korea Utara. *Realist Theory of State Action* yang dikemukakan oleh Michael Mastanduno, David A. Lake dan G. John Ikenberry dalam tulisannya yang berjudul *Toward a Realist Theory of State Action* (Michael Mastanduno, 1989, pp. 461-462). Dalam tulisannya, mereka ingin melihat hubungan politik domestik sebuah Negara yang hubungannya dengan politik internasional.

Teori ini menggabungkan level analisis antara level domestik dan level internasional dimana suatu negara bisa mempunyai tujuan ganda baik tujuan domestik maupun tujuan internasional. Begitu pula, suatu negara juga punya cara atau strategi untuk meraih tujuan tersebut, yakni bisa melalui cara atau strategi di dalam negeri sendiri (domestik) maupun di level internasional. Jadi jika digabungkan, suatu negara bisa mempunyai tujuan domestik yang dikejar dengan menggunakan strategi internasional atau sebaliknya mempunyai tujuan internasional yang dikejar dengan menggunakan strategi domestik.

Strategi domestik sendiri mempunyai dua cara yaitu mobilisasi internal dan ekstraksi internal. Mobilisasi internal adalah kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah misalnya nasionalisasi,

pembangunan, ataupun kebijakan yang lain. Sedangkan ekstraksi internal adalah upaya memanfaatkan sumberdaya (misalnya ekonomi dan militer) untuk mendukung kebijakan pemerintah. Sementara strategi internasional terbagi menjadi dua cara yaitu ekstraksi eksternal dan validasi eksternal. Ekstraksi eksternal adalah upaya mencari sumberdaya dari lingkungan internasional (misalnya dukungan dari negara lain, bantuan luar negeri) untuk meraih tujuan domestik. Sedangkan validasi eksternal adalah upaya suatu negara memanfaatkan statusnya di dunia internasional untuk meraih keuntungan domestik.

Selanjutnya Ikenberry membagi politik luar negeri berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan struktur internasional dan struktur domestik. Berdasarkan struktur internasionalnya, negara terbagi menjadi dua jenis yaitu negara kuat dan negara lemah. Untuk menentukan sebuah Negara tergolong kedalam Negara kuat atau Negara lemah yaitu berdasarkan distribusi power di level internasional.

Sedangkan berdasarkan struktur domestiknya, Negara juga terbagi menjadi dua jenis yaitu negara “soft” dan negara “hard”. Negara “soft” adalah negara yang dicirikan oleh desentralisasi atau peran rakyatnya begitu kuat mengontrol pemerintah. Sedangkan negara “hard” adalah negara yang sentralis atau peran rakyat begitu kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakannya. Berdasarkan uraian di atas maka Ikenberry merumuskan beberapa hipotesis, antara lain:

1. Negara yang mengalami penurunan pengaruh di level internasional cenderung melakukan strategi mobilisasi internal.
2. Jika ancaman terhadap keamanan di tingkat internasional meningkat, maka Negara akan meninggalkan penggalan sumberdaya internal serta akan melakukan strategi ekstraksi internal.
3. Negara yang kondisi domestiknya tidak stabil cenderung melakukan strategi ekstraksi dan validasi eksternal.
4. Dalam upaya mencapai tujuan domestik, Negara soft akan lebih mengandalkan strategi internasional, sedangkan Negara hard akan lebih mengandalkan strategi domestik.
5. Negara lemah cenderung menggunakan strategi domestik, sedangkan negara kuat menggunakan strategi internasional.

6. Dalam upaya mencapai tujuan domestik dengan memakai strategi domestik, Negara soft cenderung menggunakan strategi ekstraksi internal dan sedangkan negara hard cenderung menggunakan strategi mobilisasi internal.
7. Dalam mencapai tujuan internasional dengan memakai startegi internasional, Negara lemah cenderung menggunakan strategi validasi eksternal, sedangkan negara kuat cenderung menggunakan strategi ekstraksi eksternal.

**Tabel 4. Struktur Domestik dan Internasional**

		<u>International Structure</u>	
		Weak	Powerful
<u>Domestic Structure</u>	Soft	Internal Extraction External Validation	External Extraction
	Hard	Internal Mobilization	Internal Mobilization External Extraction

FIG. 1. Strategies and constraints.

Sumber: Michael Mastanduno, David A. Lake dan G. John Ikenberry . Toward a Realist Theory of State Action. 1989 (Michael Mastanduno, 1989, pp. 461-462)

Jika dibandingkan dengan Korea Selatan maupun Jepang, kekuatan militer Korea Utara masih dikatakan yang paling kuat, dengan kekuatan militer dan kepemilikan nuklir Korea Utara menjadi salah satu Negara yang patut diperhitungkan keberadaannya. Didalam internal Korea Utara, pemerintahan lebih condong kearah sentralis dengan menekan sekecil-kecilnya peran rakyat sehingga tidak bisa berpengaruh terhadap rezim yang berkuasa. Dengan demikian maka diharapkan tekanan dari internal sebagai upaya untuk meruntuhkan pemerintahan dapat diatasi.

Secara spesifik untuk menjelaskan sikap offensive Korea Utara maka akan lebih jelas jika ditentukan dahulu apa tujuan dan strategi yang diambil. Di dalam negeri Korea Utara terjadi ketidakstabilan politik dan keterpurukan ekonomi, ketidakstabilan politik sendiri akan berpengaruh terhadap power (tingkat legitimasi rakyat terhadap rezim berkuasa) dalam sebuah Negara, sehingga perlu dilakukan mobilisasi internal dengan jalan doktrinasi dan penggunaan kekuatan militer guna menekan rakyat. Sedangkan keterpurukan ekonomi yang terjadi di Korea Utara tidak bisa diatasi sendiri dengan mengandalkan sumberdaya dalam negeri yang terbatas, maka jalan satu-satunya untuk mengatasi keterpurukan tersebut adalah dengan mencari sumberdaya dari luar. Pencarian sumberdaya ini akan didapatkan dengan melakukan ekstraksi eksternal, yaitu merubah konstalasi internasional yang tadinya bersahabat menjadi berlawanan. Ekstraksi enternal yang dilakukan oleh Korea Utara berupa tindakan-tindakan offensive seperti meluncurkan rudal, mengembangkan nuklir, atau melakukan kontak senjata di zona militer. Dengan melakukan tindakan offensive diharapkan ada upaya pembicaraan perdamaian dan melakukan negosiasi guna meminta imbal balik yang berupa bantuan ekonomi.

Sikap provokatif dan keberanian Korea Utara ini tidak hanya dari sifat kepemimpinan penguasanya, tetapi sifat provokatif dan keberanian Korea Utara juga muncul dari Ideologi yang dianutnya yaitu "*Ideologi Juche*" yang dianut dari masa kepemimpinan Kim Il-sung. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana ideologi Juche bisa mempengaruhi Korea Utara sehingga menjadi ancaman di kawasan Asia Timur?

## BAB II

# PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA UTARA

Perubahan kebijakan luar negeri Korea Utara terjadi pada kepemimpinan Kim Il Sung dengan *Juche* dan pada masa kepemimpinan Kim Jong Il dengan kebijakan *Military First*-nya. Perubahan kebijakan ini jelas akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan Korea Utara pada umumnya dan perubahan kebijakan luar negeri Korea Utara khususnya. Mengenai perubahan kebijakan Korea Utara dan faktor penyebab perubahan kebijakan tersebut akan lebih jelas dibahas dalam bab ini.

### A. Perubahan Penyesuaian

Walaupun pada akhir masa Kim Il-sung, keadaan politik di Korea Utara cukup stabil di bawah sistem kekuasaan tunggal yang tidak bisa ditantang, namun Korea Utara semakin lemah dari stagnasi ekonomi dan isolasi diplomatik karena sistem intern sendiri dan sistem ekonomi yang tertutup serta ambruknya ekonomi kubu negara sosialis lainnya. Kim Il-sung meninggal pada pukul 2:00 dini hari pada 8 Juli 1994, tetapi pengumuman resmi oleh pemerintah Korea Utara disampaikan dalam bentuk siaran khusus 34 jam kemudian. Penyebab kematian Kim Il-sung yang diumumkan secara resmi adalah kematian otot jantung karena tidak adanya suplai darah yang disebabkan oleh kecapean karena dia bekerja berlebihan tanpa memelihara kesehatannya. Upacara perpisahan terakhir diadakan 11 hari setelah kematiannya, pada 19 Juli. Seperti Lenin dan Mao, jenazah Kim dibalsem dan disimpan di istana kepresidenan Kumsusan, Pyongyang (world.kbs, 2013)

Karena Kim Jong-il diangkat dan dibesarkan sebagai pewaris politik ayahnya sejak tahun 1970-an, maka dia sudah siap secara penuh untuk mewariskan tugas mendiang ayahnya, sehingga dia tampaknya akan dapat memegang kekuasaan tanpa kesulitan. Tetapi, kegiatan pewarisan kekuatan dari ayah ke anak sulit ditemukan contohnya, apalagi tidak ada contoh pewarisan seperti itu berhasil di negara Komunis. Dengan alasan itu, dunia memperhatikan Pyongyang. Namun, diluar dugaan dari sebagian besar masyarakat dunia, Kim Jong-il tidak mewariskan jabatan apapun dari ayahnya, tetapi hanya memerintah negaranya atas wasiat, nama dan ajaran ayahnya sebagai panglima militer Korea Utara yang sudah meninggal dunia. Selama periode 3 tahun, Kim Jong-il hanya menyatakan bahwa dia akan memerintah Korea Utara menurut harapan dan ajaran ayahnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kekuasaan dan kekuatan mistik ayahnya. Kim Il-sung mengizinkan Kim Jong-il memerintah sebagai pemimpin tertinggi secara de facto. Namun, Kim Jong-il tidak segera mewariskan jabatan apapun secara resmi. Periode ini disebut sebagai waktu “kekuasaan negara Kim Jong-il dengan wasiat ayahnya” (world.kbs, 2013).

Sistem kekuasaan negara dengan wasiat ayahnya bisa dimungkinkan oleh ideologi pemerintahan otoriter, berdasarkan kombinasi tradisi sistem keluarga dimana ayahnya paling dihargai, dari ideologi Marxisme-Leninisme dengan kondisi Korea Utara yang unik. Kim Jong-il mengukuhkan filsafat untuk memerintah negaranya dengan “semangat pembangunan nasional secara mandiri”, yang diketahui sebagai “Juche” atau “Kim-isme”. Kim Jong-il memilih cara yang dapat menguatkan landasan kekuatan politiknya secara bertahap, dengan penanaman kekuasaan ayahnya Kim Il-sung, sehingga menghindari beban politik melalui pewarisan, tanggungjawab tentang kesulitan ekonomi dan isolasi negaranya di masyarakat internasional. Pekerjaan pengidolaan Kim Il-sung, dengan mencanangkan norma tradisional seperti kesetiaan dan kewajiban terhadap orang atasan dan orang tua, hingga lama-kelamaan Kim Jong-il dapat mengalihkan karisma dan kekuasaan Kim Il-sung kepadanya secara alami. Untuk mencapai hal itu Kim Jong-il harus memblokir kubu oposisi yang menolak sistemnya lebih dini, dan sekaligus memperkuat landasan sistem kekuasaan tunggal Kim Jong-il. (world.kbs, 2013).

## **1. Pembangunan Ekonomi Pada Masa Transisi**

Korea Utara secara resmi mengumumkan kegagalan Rencana Pembangunan 7 tahun putaran ketiga secara jelas

dalam pertemuan ke-21 Komisi Partai Sentral ke-6 pada tahun 1993. Setelah itu, mereka menetapkan periode 3 tahun (1994-1996) sebagai 'periode pembangunan ekonomi negara sosialis dan menetapkan strategi baru selama periode ini termasuk mengutamakan 3 bidang dalam ekonominya seperti pertanian, industri ringan dan perdagangan. Walaupun masa transisi ini sudah direncanakan sebelum kematian Kim Il-sung, tetapi secara kebetulan Kim Jong-il bisa memiliki periode transisi sebelum sistemnya berjalan (Academia, 2013)

## 2. Krisis Nuklir Korea Utara

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT (Perjanjian non-proliferasi nuklir) pada tahun 1993. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan IAEA (Badan tenaga atom internasional) pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti yang mencurigakan bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak, karena ada selisih sebanyak 90 gram dari yang dilaporkan oleh Korea Utara pada awalnya. Dengan hasil itu IAEA segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari NPT sebagai aksi protes (world.kbs, 2013). Hampir setahun penuh negosiasi dilakukan namun gagal, kemudian konflik tentang masalah nuklir Korea itu sempat membawa krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994. Pertemuan dibuka kembali setelah kunjungan dramatis oleh mantan presiden AS Carter, yang mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara ketika itu, Kim Il-sung. Negosiasi AS dan Korea Utara dilanjutkan dengan mencapai perjanjian Jenewa pada Oktober 1994 yang diikuti oleh duta besar AS urusan nuklir, Robert Gallucci dan wakil menteri Deplu Korea Utara, Kang Suk-ju. Persetujuan bersyarat dibuat, Korea Utara akan menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya akan menerima minyak solar dan reaktor air ringan, hingga secara efektif menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara putaran pertama. Walaupun Perjanjian Jenewa tercapai setelah kematian Kim Il-sung, namun hal itu bermakna bahwa kerangka dasar untuk hubungan Korea Utara dan AS terbentuk dalam masa akhir 'Era Kim Il-sung' (world.kbs, 2013).

## **B. Pembangunan Ekonomi pada Masa Kim Il Sung**

Pada akhir tahun 1953, Korea Utara mendapatkan pasokan bantuan luar negeri yang dapat diandalkan dari Uni Soviet dan China. Keseimbangan dari kedua penyokong ini sehingga menjadi bagian karakteristik kebijakan luar negeri dimasa Kim Il Sung (Beal, 2005, p. 59). Pada tahun 1953-1976, Korea Utara menjadi negara dengan ekonomi yang bisa dibilang kuat, bahkan bisa berimbang dengan Korea Selatan. Tetapi pada tahun 1976 pendapatan per kapita dari Korea Selatan mulai meninggalkan Korea Selatan, ini dikarenakan pemilihan mata uang dalam perdagangan yang dipakai. Korea Selatan memakai US\$ sedangkan Korea Utara menggunakan Won sebagai mata uang perdagangannya (world.kbs.co.kr, 2013) (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2)

Keterbukaan Korea Utara pada masa kepemimpinan Kim Il Sung terhadap dunia luar terlihat dari kebijakan yang diambil untuk menjalin hubungan atau kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti dengan wilayah Nodric pada tahun 1973, menjalin hubungan diplomatik dengan Australia pada tahun 1974, ikut bergabung dengan World Health Organization (WHO) pada tahun 1973, bergabung dengan the International Atomic Energy Agency (IAEA) dan Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1977 (Beal, 2005, p. 69). Pada masa kepemimpinan Kim Il Sung, Korea Utara mempunyai program kerja pemerintahan yang jelas dan lebih mengedepankan pembangunan ekonomi dan membuka jalan untuk bekerjasama dengan Negara lain. Hal ini bisa dilihat dari beberapa program kerja yang sudah dicanangkan Kim Il Sung berikut ini (world.kbs.co.kr, 2013).

### **1. Pembangunan Ekonomi Sosialis**

Upaya pembentukan sistem ekonomi sosialis cepat berkembang karena proses nasionalisasi seluruh industri sudah dimulai sebelum pemerintahan dibangun, tidak lama setelah mendapat kemerdekaan dari penjajahan Jepang Sesuai dengan UU Reformasi Tanah yang diumumkan pada Maret 1946, pengembalian tanah dan pembagian kembali tanah itu kepada rakyat umum dengan gratis dilaksanakan, hingga membentuk landasan sistem perkebunan secara kolektif. Pada bulan Agustus tahun yang sama, UU untuk menasionalisasikan pabrik utama, perusahaan, pertambangan, stasiun pembangkit listrik, transportasi, layanan pos, perbankan, organisasi instansi

komersial dan budaya diberlakukan. (world.kbs, 2013).

Walaupun kegiatan ekonomi tingkat individu yang berskala kecil diizinkan selama perang Korea untuk melengkapi kekurangan tingkat produksi, sebagian besar ekonomi Korea Utara dinasionalisasikan dan digunakan secara kolektif. Sampai tahun 1958, pertanian, industri kerajinan tangan, dan perdagangan skala kecil semua disatukan dengan bentuk koperasi, sehingga menyelesaikan proses “sosialisme dalam hubungan produksi”

**Tabel 5. Timeline Penerapan UU Reformasi Tanah**

<b>Periode</b>	<b>Isi Reformasi</b>
05 Maret 1946	UU Reformasi Tanah
10 Agustus 1946	Nasionalisasi industri utama
22 Desember 1946	Nasionalisasi sumber tambang, kehutanan, dan perikanan
April 1954	Mulai membentuk koperasi kerjasama tingkat nasional
Agustus 1958	Selesainya pembentukan koperasi pertanian, kerajinan tangan dan perdagangan skala kecil secara kolektif.
Okt-Desember 1958	Koperasi nasional secara kolektif disebarluaskan ke tingkat pedesaan (nama koperasi itu diganti menjadi perkebunan kolektif)

Sumber: (world.kbs.co.kr, 2013)

## **2. Perkebunan kolektif**

Setelah sistem koperasi pertanian berakhir, Korea Utara mencurahkan upayanya untuk memproduksi peralatan pertanian yang dimodernisasi untuk meningkatkan produktivitas. Kolektifitas industri pertanian dimulai pada akhir 1953, saat “Organisasi Koperasi Kerjasama Pertanian” mulai dibentuk. Koperasi itu lebih berkembang selama 1954 dan tahun berikutnya, sampai Agustus 1958, semua petani terdaftar sebagai anggota koperasi itu. Sehingga sektor pertanian dapat disatukan secara sempurna. Pada awalnya, ada 13.309 organisasi koperasi pertanian, setiap koperasi itu terdiri atas rata-rata 80 rumah

tangga dan tanah pertanian seluas 130 “Chung-bo”. Pada Oktober 1958, organisasi itu dikonsolidasikan di tingkat pedesaan. Jumlah koperasi dipangkas hingga menjadi 3.843, sedangkan jumlah rumah tangga anggota setiap koperasi meningkat menjadi 300 rumah tangga dan tanah pertanian seluas 500 “Chung-bo”.

Sampai tahun 1961, manajemen pertanian penduduk lokal yang selama ini dipimpin oleh Panitia Rakyat tingkat kecamatan dipisahkan, kemudian diserahkan kepada instansi ahli industri pertanian ‘Komisi Manajemen Koperasi Pertanian’ untuk langsung menangani kegiatan pertanian termasuk pengoperasian pabrik alat pertanian, pabrik, kantor irigasi, pemasok bahan, dan karantina peternakan. Pada tahun 1962, organisasi itu dinamakan “Perkebunan Kolektif” sehingga membangun sistem manajemen perkebunan kolektif Korea Utara.

### **3. Peluncuran Rencana Pembangunan Ekonomi**

Karena kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh kolonial Jepang, dimana sebagian besar stasiun pembangkit listrik dan fasilitas industri terletak di bagian daerah utara Semenanjung Korea, maka hal itu membantu Korea Utara pada awalnya untuk lebih mudah melakukan pembangunan ekonomi modern dan industrialisasi ekonomi.

Rencana Pembangunan Ekonomi Korea Utara dimulai menyusul kemerdekaan, atau sebelum pemerintahan dibangun. Dua kali masa Rencana Pembangunan Satu Tahun dilaksanakan pada tahun 1947 dan 1948. Pada tahun 1949, Rencana Pembangunan Dua Tahun dilakukan untuk menghapuskan faktor negatif di sektor industri yang tersisa oleh penjajahan Jepang dan meningkatkan produksi, tetapi rencana pembangunan itu dihentikan karena perang Korea. Pada April 1954, Korea Utara memutuskan dalam pertemuan ke-7 Sidang Rakyat Tertinggi pertama bahwa peningkatan produksi setingkat sebelum perang, dan Rencana Pembangunan Tiga Tahun untuk pemulihan ekonomi dilakukan. Rencana itu, melalui bantuan Cina dan Uni Soviet, diselesaikan secara sukses 4 bulan lebih dini daripada jadwal.

Pada tahun 1957, REPELITA (5 tahun) dilakukan untuk meletakkan fondasi industri untuk ekonomi sosialis, dan untuk menyajikan pakaian, makanan dan perumahan kepada rakyat. Bantuan dari Cina dan Uni Soviet, dan negara komunis lainnya

memungkinkan Korea Utara mencapai target mereka dua tahun lebih dini daripada jadwal.

#### 4. Gerakan Chollima

Perkataan “Chollima” (kuda yang bisa berlari seribu mil) berarti kuda mitos yang bisa berjalan berjarak seribu mil dalam sehari. Gerakan *Chollima* adalah kampanye massal bertujuan untuk membangun ekonomi sosialis secara efektif dan memacu gerakan itu. Pemerintah mempromosikan untuk cepat mencapai target produksi dan membangun ekonomi sosialis seperti kecepatan yang sama dengan kuda mitos *Chollima*.

Gerakan *Chollima* mewakili kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mengerahkan penduduk secara massal dan secara efisien. Regim Korea Utara yakin bahwa peningkatan produktifitas bisa terwujud melalui perubahan dan perbaikan pikiran para buruh yang dipersenjatai dengan ideologi komunis yang lengkap.

Ada berbagai gerakan yang hampir bertujuan sama yaitu mempromosikan produksi sebelum gerakan *Chollima*, seperti “gerakan peningkatan produktifitas” selama masa perang, dan “gerakan peringatan 1 Maret” “gerakan peringatan 1 Mei” dan ada juga “gerakan untuk merebut bendera kemenangan Minchungsoon-hwe”.

Kemudian, Gerakan *Chollima* diluncurkan dalam pertemuan sidang paripurna Komisi Sentral Partai yang diadakan pada Desember 1956. Hingga gerakan ini menjadi gerakan sistematis pertama untuk memacu sistem persaingan di masyarakat Korea Utara untuk mencapai target produksi dan pembangunan ekonomi sosialis lebih cepat. Setelah ditetapkan sebagai kebijakan umum partai buruh, gerakan itu diterapkan di seluruh pelosok Korea Utara seiringi dengan Repelita yang dimulai tahun 1957. Pada tahun 1959, gerakan itu lebih digalakkan dengan nama “gerakan kerjasama Chollima”, dan gerakan itu memberikan sumbangan pada pencapaian Rencana Pembangunan Lima Tahun Korea Utara. Gerakan *Chollima* diganti dengan ‘gerakan untuk memperoleh 3 revolusi utama dengan bendera merah’ pada tahun 1975. Gerakan *Chollima* mendominasi sebagai gerakan untuk meningkatkan kompetisi kalangan buruh di masyarakat Korea Utara.

## 5. Peluncuran Rencana Pembangunan 7 tahun

Pada tahun 1961, Korea Utara melaksanakan proyek pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Pembangunan dilaksanakan dalam 3 kali Rencana Pembangunan 7 tahun, dan di tengah Rencana Pembangunan itu, juga melakukan Rencana Pembangunan tambahan selama 6 tahun.

Rencana Pembangunan 7 tahun pertama dimulai tahun 1961 dengan tujuan memperbaiki kehidupan rakyat dan membangun fondasi industri yang terbentuk selama Repelita (5 tahun) pada akhir 1950-an.

Pada waktu itu, ekonomi Korea Utara mencapai industrialisasi yang menitik beratkan pada industri berat, seperti manufaktur alat-alat mesin. Tetapi, kebijakan itu menghadapi rintangan karena industrialisasi yang hanya memenuhi permintaan domestik semakin terbatas. Sementara itu, krisis rudal Kuba pada Oktober 1962 membuat pemimpin Korea Utara merasa perlu meningkatkan kemampuan militernya. Hal itu menjadi alasan bagi Korut untuk menciptakan “4 arah kebijakan militer utama” yang memfokuskan pada peningkatan investasi untuk meningkatkan kekuatan militer.

Korea Utara menemukan posisi yang sulit di antara Cina dan Uni Soviet yang bertentangan dan hal itu mengakibatkan pengurangan bantuan ekonomi dari negara sosialis itu, sehingga mengakibatkan penundaan target Rencana Pembangunan mereka. Jadwal untuk Rencana Pembangunan 7 tahun diperpanjang sampai 3 tahun selama Oktober 1966 dalam pertemuan perwakilan partai; tetapi Rencana Pembangunan itu gagal untuk mencapai targetnya.

## 6. Pembatasan Pengembangan Ekonomi

Korea Utara menikmati periode yang relatif stabil selama 1970 dan 1980an di bawah sistem kepemimpinan tunggal Kim il-sung. Tetapi, batasan sistem struktur sosialisme semakin memperlambat perkembangan ekonomi Korea Utara.

Sistem kompetisi pekejaan gaya negara sosialis, bantuan dari negara komunis lain, dan kebijakan ekonomi yang dirancang sebelumnya dikombinasikan dengan infrastruktur industri Korea Utara yang subur, diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi Korea Utara harus menghadapi berbagai masalah termasuk terbatasnya kebijakan pembangunan ekonomi gaya Stalin Uni Soviet, retaknya

hubungan Soviet dan Cina, diplomasi pendekatan yang sama oleh Korea Utara terhadap kedua negara, pembatasan sistem struktur ekonomi terpusat, pengerahan penduduk secara massal, dan terisolasinya ekonomi mereka dari ekonomi pasar global. Hingga hal hal itu mengakibatkan kemacetan ekonomi Korea Utara. Selisih ekonomi antara kedua Korea terus melebar bahkan semakin melebar sejak tahun 1970an (KBS, 2013).

#### **7. Pembangunan Korea Utara 6 Tahun Pertama (1971-1976)**

Rencana pembangunan ekonomi itu diluncurkan dalam pertemuan partai ke-5 pada tahun 1970 dengan tujuan mewujudkan 'pengembangan 3 teknologi utama' dan meningkatkan struktur industri Korea Utara. Proyek ekonomi itu sangat diperhatikan karena peranan teknologi dan modal diutamakan, dengan kesadaran terbatasnya struktur ekonomi yang dapat mengerahkan tenaga secara massal.

Maka, rencana itu terfokus pada penerapan teknologi, modal, dan peralatan dari negara barat. Tetapi hutang luar negeri menjadi masalah serius dari mulai 1975 karena barang impor tidak dibayar kembali pada waktu yang tepat. Lebih jauh lagi, dengan sistem ekonomi yang kaku, berbagai masalah di sektor sarana-sarana sosial termasuk energi dan transportasi ukurannya semakin besar.

Rencana Pembangunan 6 tahun itu diketahui berakhir secara sukses pada tahun 1975, dapat mencapai targetnya 18 bulan lebih dini daripada jadwal. Tetapi proyek itu sebenarnya gagal. Penyelesaian proyek itu hanya untuk merevisi jadwal yang direncanakan. Dengan konskuensi itu, Korea Utara mengumumkan masa transisi selama dua tahun untuk memperbaiki sektor yang belum memenuhi target.

#### **8. Pembangunan Korea Utara 7 Tahun Kedua (1978-1984)**

Rencana pembangunan ekonomi itu mengutamakan pembangunan ekonomi secara mandiri, modernisasi dan secara ilmu pengetahuan. Target pendapatan nasional naik sampai 1,9 kali lipat daripada tahun 1977 (KBS, world.kbs.co.kr, 2013). Sedangkan target produk industri bruto dan biji-bijian meningkat 2,2 kali lipat dan 10 juta ton. Menurut pengumuman pada Pebruari 1985 bahwa semua target negara itu dapat dicapai pada akhir 1984. Namun dinilai, proyek itu juga gagal karena seperti Rencana Pembangunan 6 tahun sebelumnya, mereka menetapkan periode masa transisi selama dua tahun

setelah pengumuman itu. Beberapa ciri khas menonjol Rencana Pembangunan 7 tahun, selama dua periode itu adalah sebagai berikut (KBS, world.kbs.co.kr, 2013)

- a. Pelaksanaan target tambahan seperti “10 tujuan untuk membangun ekonomi sosialis untuk akhir tahun 1980-an” dan pengembangan 4 bidang untuk sumber alam dan
- b. Mulai lebih memperhatikan ekonomi terbuka, seperti meningkatkan proyek ekonomi dengan negara lain, perdagangan dan pengumuman ‘UU Usaha Bersama’

## 9. Undang-Undang Usaha Bersama

Undang-undang usaha bersama diumumkan dalam pertemuan Sidang Rakyat Tertinggi pada 8 September, 1984 dengan tujuan pertukaran ekonomi/teknologi dengan negara asing dan proyek investasi bersama. Kebijakan yang secara resmi dikenal dengan ‘UU Pengoperasian Usaha Bersama’ itu bertujuan untuk menyediakan bahan bakar, bahan baku, teknologi dan modal untuk mengaktifkan semua ekonomi dan memenuhi kebutuhan rakyat umum (KBS, world.kbs.co.kr, 2013).

UU itu sebenarnya adalah salah satu terobosan bagi Korea Utara dalam keadaan resesi ekonomi dan keadaan sulit mendapat pinjaman dari luar negeri. Pada Maret 1985, Korea Utara mempersiapkan landasan kelembagaan yang dibutuhkan untuk kerjasama usaha dengan luar negeri itu, termasuk ‘UU terkait pengoperasian usaha bersama’ dan pajak pendapatan untuk orang asing’. Peserta utama dalam proyek itu adalah negara komunis lain maupun warga Korea pro-komunis yang tinggal di Cina, Rusia, dan Jepang. Korea Utara juga mencoba untuk menarik investasi dari ekonomi pasar seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Inggris, Prancis dan Australia (KBS, world.kbs.co.kr, 2013).

## 10. Kerjasama Ekonomi Tingkat Sipil

Perbaikan hubungan Korea Selatan dan Utara bukan hanya terjadi dalam bentuk upaya kemanusiaan seperti reuni keluarga terpisah dan penyerahan bantuan. Walaupun sangat terbatas, berbagai pertukaran dan kunjungan satu sama lain di antara kedua Korea mulai terjadi, sehingga semakin membentuk suatu landasan untuk pertukaran tingkat sipil. Kejadian yang menarik perhatian besar pada waktu itu adalah kunjungan Jung Ju-young, ketua grup Hyundai, ke Pyongyang. Pendiri Hyundai, Jung Ju-young bertemu dengan pejabat tinggi Korea Utara

termasuk Kim il-sung sebelum dia kembali ke Seoul. Kunjungan itu adalah kejadian yang dapat diramalkan sebagai mulai terwujudnya kerjasama ekonomi kedua Korea. Khususnya dalam kunjung tersebut ada kesepakatan dengan pihak Pyongyang untuk mengirim wisatawan Korea Selatan ke gunung Geumgang Korea Utara. Walaupun pada awalnya kemungkinan terwujudnya proyek itu masih sangat diragukan dan harus memakan 10 tahun sampai dapat terwujud nyata, namun kesepakatan itu memiliki makna bersejarah dimana warga biasa Korea Selatan, bukan tokoh politik, dapat mengunjungi teritorial Korea Utara secara bebas. (KBS, world.kbs.co.kr, 2013)

#### 11. **Keanekaragaman Diplomasi**

Korea Utara pada awalnya melakukan diplomasi terbatas hanya dengan negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Namun, konflik yang terjadi di kubu negara komunis antara Rusia dan Cina membuat Korea Utara membuka hubungan dengan negara netral pada tahun 1960an. Pada 1970an, diplomasi dengan negara barat juga dilaksanakan secara aktif. Alasannya perubahan kebijakan diplomatik Korea Utara adalah sebagai berikut: Cina menjadi anggota PBB pada tahun 1971, pencairan hubungan AS -Cina setelah kunjungan presiden Nixon ke Cina tahun 1972, normalisasi hubungan Cina-Jepang, dan semakin sering terjadinya perdebatan antara kedua Korea di panggung internasional termasuk PBB dan organisasi internasional lain. (KBS, world.kbs.co.kr, 2013)

Dalam pertemuan partai buruh ke-6 yang diadakan Oktober 1980, pimpinan Korea Utara mengumumkan 3 prinsip dasar dalam kebijakan diplomatiknya, yakni berdiri sendiri, persahabatan dan perdamaian, dan mendorong keanekaragaman hubungan diplomatik lebih banyak dengan negara barat. Upaya untuk membangun hubungan dengan AS juga didorong selama waktu itu. Pada Januari 1984, melalui agenda pertemuan “tindakan baru untuk mewujudkan suasana perdamaian di Korea “ yang dibahas dalam Sidang Rakyat Tertinggi dan Komisi Rakyat Sentral , sebuah usulan sempat diajukan yaitu ‘perlu diadakannya pertemuan segi-3 antara kedua Korea dan A.S. (KBS, world.kbs.co.kr, 2013).

#### 12. **Pernyataan Bersama 4 Juli**

Kontak rahasia antara pejabat tinggi Korea Selatan dan Korea Utara menghasilkan Pernyataan Bersama 4 Juli 1972.

Setelah pertemuan rahasia diadakan di Panmunjom, pertemuan rahasia lain di Seoul dan Pyongyang antara kepala Badan Intelijen Korea Selatan Lee Hu-rak dan wakil perdana menteri Korea Utara, Park Sung-chul menghasilkan Pernyataan Bersama yang diumumkan dengan sekaligus oleh Seoul dan Pyongyang dengan isi sebagai berikut (KBS, world.kbs.co.kr, 2013):

- a. Tiga pilar utama untuk reunifikasi yakni berdiri sendiri, perdamaian dan solidaritas di antara bangsa Korea,
- b. Menahan diri dari saling memfitnah dan melarang penggunaan kekuatan militer,
- c. Melaksanakan berbagai pertukaran antarKorea secara leluasa,
- d. Kerjasama dalam operasi Palang Merah,
- e. Pembukaan saluran telepon hubungan langsung antarKorea,
- f. Membangun Komite Koordinasi Korea Selatan dan Korea Utara,
- g. Dan melaksanakan isi Pernyataan Bersama secara setia.

13. **Rencana Pembangunan 7 Tahun Ketiga (1987-1993)**

Seperti halnya Rencana Pembangunan 7 tahun selama dua priode sebelumnya, maka priode ke-3 juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang berdiri sendiri, modern dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka menargetkan pendapatan nasional meningkat 1,7 kali lipat (pertumbuhan rata-rata tahunan 7,9 persen), sedangkan produksi barang industri dan biji-bijian meningkat 1,9 dan 1,4 kali lipat. Sebagian dari '10 target' direvisi termasuk bidang produksi baru dan konstruksi. Ciri khas Rencana Pembangunan 7 tahun putaran ke-3 termasuk: (KBS, world.kbs.co.kr, 2013)

- a. Skala targetnya turun, dan hal itu mencerminkan keadaan resesi ekonomi di waktu itu,
- b. Mengutamakan inovasi teknologi, dan
- c. Lebih menekankan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Korea Utara menyampaikan niatnya untuk membuka ekonominya dengan pengumuman 'zona perdagangan bebas Najin-Sunbong' sejalan dengan proyek pengembangan muara sungai Tumen oleh UNDP (Program Pembangunan PBB).

## **C. Perubahan Struktur Internasional**

Untuk menyaingi Olimpiade Seoul 1988, Korea Utara memobilisasi tenaga dan investasi skala besar untuk mengadakan 13 festival pemuda dan siswa internasional, tetapi hasilnya tidak begitu besar. Sejalan dengan ambruknya mitra ekonomi Korea Utara, Uni Soviet dan negara komunis Eropa Timur, kebijakannya yang mengutamakan politik, dan faktor negatif lainnya mengakibatkan Rencana Pembangunan itu gagal. Pendapatan nasional hanya tumbuh 61 persen dari target semula, sedangkan ekspor hanya mencapai 52,5 persen dan pertumbuhan ekonomi di sektor utama lainnya mencapai 20~50 persen dari target. Untuk kali pertama, Korea Utara tidak ada pilihan, selain hanya secara resmi mengumumkan kegagalan Rencana Pembangunan ekonomi mereka (KBS, world.kbs.co.kr, 2013).

Perubahan struktur internasional merupakan faktor penentu arah kebijakan luar negeri Korea Utara dimana tekanan eksternal itu sendiri berasal dari perubahan dunia internasional yang bersumber dari Negara-negara tetangga Korea Utara. Perubahan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan yang diambil Korea Utara diantaranya bubarnya Uni Soviet, berkembangnya ekonomi Cina kearah liberal, kemajuan ekonomi Korea Selatan, dan perkembangan militer Jepang yang semakin kuat.

### **1. Bubarnya Uni Soviet**

Runtuhnya Tembok Berlin yang menandai berakhirnya Perang Dingin dan awal bubarnya Uni Soviet, telah mengubah geopolitik global. Uni Soviet Berdiri pada 30 Desember 1922 dan bubar pada 26 Desember 1991 dan tidak ada benua yang lebih diuntungkan daripada Asia. Kebangkitan dramatis ekonominya sejak 1989 telah berlangsung dengan laju dan skala tanpa bandingan dalam sejarah dunia. Bagi Asia, dampak paling penting dari runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet adalah bergesernya keunggulan kekuatan militer ke keunggulan kekuatan ekonomi dalam tata hubungan internasional. Memang pertumbuhan ekonomi yang cepat juga terjadi selama Revolusi Industri dan pasca-Perang Dunia II. Tapi pertumbuhan ekonomi pasca-Perang Dingin ini telah membawa perubahan global.

Pasca Perang Dunia ke II, Uni Soviet menjadi satu dari dua Negara Adidaya. Dalam perjalanannya, perbedaan kepentingan diantara Barat dan Timur (AS-USSR) memaksa kedua Negara adi-

daya ini berbenturan pada era perang dingin (Cold War). Sebagai kiblat dari Negara-negara Blok Timur, dalam usahanya untuk mempertahankan pengaruh, Uni Soviet menggelontorkan anggaran yang sedemikian besar dengan pada sisi lainnya ekonomi Soviet tergerogoti oleh inflasi tersembunyi dan kekurangan pasokan yang terjadi di mana-mana dengan juga diperparah oleh semakin meningkatnya pasar gelap yang terbuka yang menggerogoti ekonominya.

Selain itu, biaya yang digelontorkan oleh Uni Soviet untuk men-subsidi negara-negara klien sudah sangat berlebihan, dan bahkan melampaui kemampuan ekonomi Soviet sendiri. Kemudian, gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi membuat Uni Soviet kian kelabakan dalam mengejar perimbangannya.

Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada 1985 dapat dikatakan melakukan blunder ketika mengeluarkan kebijakan bernama *Glasnost* dan *Perestroika* (keterbukaan). Yang pada ujungnya memecah Uni Soviet dan mengakibatkan kalahnya sosialis komunis dari demokrasi kapitalis. Konsep yang ditawarkan Gorbachev kala itu bermaksud untuk mereformasi rezim diktator yang sebelumnya dirasakan pilu oleh masyarakat Uni Soviet. (Academia, 2014).

Pada 1989, Moskow kemudian meninggalkan *Doktrin Brezhnev* dan lebih memilih kebijakan non-intervensi dalam urusan-urusan dalam negeri sekutu-sekutu Eropa Timurnya, yang dengan fatal membuat rezim-rezim Eropa Timur kehilangan jaminan bantuan dan intervensi Soviet apabila mereka menghadapi pemerontakan rakyatnya. Perlahan-lahan, masing-masing negara Pakta Warsawa menyaksikan pemerintahan Komunis kalah dalam pemilihan umum di negaranya masing-masing. Pada 1990 pemerintah Soviet telah kehilangan seluruh kendali terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Hingga akhirnya pada 7 Februari 1990, Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaan.

Sebagai imbasnya, Republik-republik anggota dari Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskwa, dan mulai melancarkan “perang undang-undang” dengan pemerintah pusat di Moskwa. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet membatalkan semua undang-undang negara kesatuan apabila undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang lokal, menegaskan kendali mereka terhadap

ekonomi lokal dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskwa. Pergumulan ini menyebabkan macetnya ekonomi, karena garis pasokan dalam ekonomi rusak, dan menyebabkan ekonomi Soviet semakin merosot. Upaya-upaya Gorbachev yang awalnya dimaksudkan untuk perampingan system kekuasaan dengan harapan bagi stabilitas dan kekuatan, terbukti tidak dapat dikendalikan situasi dan justru mengakibatkan serangkaian peristiwa yang akhirnya ditutup dengan pembubaran imperium Soviet. Dengan runtuhnya Unisoviet sebagai Negara pesaing, Dunia mulai memasuki jaman baru, Dunia satu kutub (unipolar) – dimana Amerika Serikat tampil sebagai satu-satunya Negara adi-daya di dunia.

Peristiwa menentukan lainnya adalah pembantaian pengunjuk rasa prodemokrasi di Lapangan Tiananmen di Beijing. Jika bukan karena berakhirnya Perang Dingin, negara-negara Barat tidak akan melepaskan Cina dari tanggung jawab pembantaian itu. Tapi Barat mengambil pendekatan yang pragmatis, tidak mengenakan sanksi ekonomi, bahkan membantu Cina terintegrasi ke dalam ekonomi global dan lembaga-lembaga internasional melalui liberalisasi investasi dan perdagangan. Andaikata Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengambil pendekatan berupa sanksi ekonomi, seperti yang dilakukannya terhadap Kuba dan Burma, ekonomi Cina tidak bakal berkembang pesat seperti sekarang, sementara negeri itu bakal tetap tertutup dan tidak stabil.

Jatuhnya Uni Soviet, reunifikasi Jerman dan masuknya Cina kedalam kapitalisme telah membawa Korea Utara untuk mengakhiri konfrontasi di semenanjung Korea. Krisis yang melanda kawasan Asia telah menyeret Korea Utara kedalam kesulitan ekonomi, hal ini memaksa Pyongyang untuk membuat kebijakan penyesuaian guna memulihkan ekonominya. Tetapi pada kenyataannya, Korea Utara hanya bisa mengatasi krisis secara minor dan hal ini mendapatkan respon dari dunia internasional dan memberikan bantuan makanan dan bantuan ekonomi. Persepsi bahwa rezim Korea Utara tidak dapat bertahan, maka kebijakan untuk reunifikasi dan non-ploriferasi mulai dilaksanakan guna mendapatkan bantuan dari Internasional. (Snyder, 2001, hal. 517-518)

Sudah tentu, tidak semua perkembangan pasca-1989 itu positif. Misalnya fenomena negara-negara yang mengalami kegagalan telah membawa dampak kepada keamanan negara-negara Asia sebagai akibat langsung dari berakhirnya Perang Dingin. Ketika Perang Dingin sedang hangat-hangatnya, kedua blok yang

ada saat itu bersaing menopang negara-negara yang lemah. Tapi, dengan lenyapnya Uni Soviet, Amerika Serikat tidak lagi merasa perlu meneruskan permainan ini Akibatnya, negara-negara yang gagal atau yang mengalami disfungsi tiba-tiba muncul pada 1990-an, mengancam keamanan regional dan internasional berupa perompak transnasional (Somalia) atau teroris transnasional (Pakistan dan Afganistan), atau berupa pembangkangan terhadap norma-norma global (Korea Utara dan Iran). Asia lebih banyak menderita dari kebangkitan terorisme internasional ini daripada kawasan-kawasan lainnya di dunia. (Chellaney, 2017)

Tak terpujungi bahwa pengaruh adanya Uni Soviet cukup besar dalam perkembangan negara-negara di beberapa belahan dunia. Uni Soviet adalah negara pertama yang menerapkan gagasan Karl Marx yang lumayan tersohor. Meski dimodifikasi sedikit oleh Vladimir Lenin dan Josef Stalin, Marx tetaplah pedoman utama mereka dalam memimpin pemerintahan. Menjelang akhir abad ke-20 memang dapat dikatakan sebagai kemenangan negara penganut paham demokrasi dan liberalisme. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Australia lebih maju ketimbang negara-negara pengikut Uni Soviet. Contoh paling nyata antara dua Korea. Korea Selatan yang menganut demokrasi kini lebih unggul di segi ekonomi, politik, kesejahteraan, dan sebagainya. Sementara Korea Utara yang masih menganut paham Komunisme murni saat ini cenderung masih di bawah saudaranya itu. Kesengsaraan masyarakat Korea Utara menjadi contohnya. (Academia, 2014)

Pada tahun 1945 kedua negara Korea yaitu Korea Utara dan Korea Selatan mulai dipisahkan oleh semenanjung dan hal ini berimbas kepada tingkat pertumbuhan ekonomi kedua negara berbeda terlalu jauh. Hingga pada tahun 1990 komunis mulai runtuh di Eropa Timur serta Uni Soviet yang mengakibatkan negara-negara komunis yang lain kehilangan mitra dagangnya. Seiring dengan hancurnya negara komunis yang besar, Negara Korea Utara pada tahun itu juga tengah mengalami bencana alam yang berupa banjir dan kekeringan sehingga harus mengandalkan bantuan luar negeri.

Tingkat kerjasama dan ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet sangat tinggi sehingga disaat Uni Soviet bubar pada 26 Desember 1991 memberikan dampak langsung terhadap Korea Utara. Keterpurukan ekonomi mulai dirasakan dalam tubuh Korea Utara itu sendiri, selain itu Korea Utara juga harus membuat kebijakan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Dimana pada tahun 1991 itu adalah akhir dari pemerintahan Kim Il Sung, dan masa transisi

ke pemerintahan Kim Jong Il. Dengan runtuhnya Uni Soviet Korea Utara harus merubah kebijakannya dari kebijakan yang berbasis ekonomi kepada kebijakan yang berbasis militer untuk menjaga keutuhan negaranya karena pada saat itu penopang Negara-negara komunis (uni soviet) sudah tidak ada.

## **2. Perkembangan Ekonomi Cina Yang Semakin Liberal**

Keberhasilan ekonomi Cina yang fenomenal itu seperti tecermin dalam surplus perdagangannya yang mengalahkan semua negara di dunia, oleh cadangan devisanya yang paling besar di dunia, dan oleh tingkat produksi besi bajanya yang tertinggi di dunia--banyak berutang budi kepada keputusan Barat untuk tidak melanjutkan sanksi ekonomi setelah terjadinya pembantaian di Tiananmen. Setelah mengalahkan Jerman sebagai eksportir terbesar di dunia, Cina sekarang sudah siap mengalahkan Jepang sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia.

Lebih luas lagi, bangkrutnya Marxisme pada 1989 memungkinkan negara-negara di Asia, termasuk Cina dan India, mengambil kebijakan kapitalis secara terang-terangan. Walaupun kebangkitan ekonomi Cina sudah mulai di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, baru setelah 1989 Partai Komunis Cina dapat dengan terang-terangan meletakkan penciptaan kekayaan di atas ideologi. Contoh yang diberikan Cina ini punya pengaruh yang konstruktif atas partai-partai komunis lainnya yang masih bertahan di Asia dan di negara-negara lainnya di dunia. Secara geopolitik, keberhasilan pasca-1989 ini melintas jauh di luar batas negara-negara Barat. Bangkrutnya Uni Soviet dengan tiba-tiba merupakan berkah strategis bagi negara-negara di Asia, karena ini berarti lenyapnya ancaman dari suatu imperium yang menakutkan dan terbukanya jalan bagi Cina untuk dengan cepat memajukan kepentingannya secara global. Surutnya pengaruh Rusia pasca-1989 berarti kebangkitan bagi Cina. (Chellaney, 2017)

Cina memiliki peranan yang sangat besar terhadap eksistensi dan keberlangsungan Korea Utara. Sejak Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya padatahun 1948 hingga perang Korea 1950-1953, pengembangan rudal nuklir, semuanya tak lepas dari campur tangan Cina. Apa yang menyebabkan Cina begitu melindungi Korea Utara, dan siapa sebenarnya yang lebih membutuhkan dari kedua negara tersebut, Korea Utara butuh Cina atau sebaliknya Cina sebenarnya yang butuh eksistensi Korea

Utara. Berbagai dukungan baik diplomasi di PBB dan lingkungan internasional, dan dukungan materiil telah dilakukan Cina kepada Korea Utara.

Namun demikian, tampaknya Cina tak berkeinginan terlibat lebih jauh dalam konflik semenanjung Korea yang terjadi akhir-akhir ini, dan mengedepankan proses diplomasi dengan Korea Selatan, dan meminta kedua Korea untuk menghentikan konflik. Cina juga mendorong adanya pembicaraan lebih lanjut melalui *Six Party Talks*, yang terdiri dari Amerika Serikat, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia dan Jepang. Hal ini diperkuat dalam dokumen yang dikeluarkan *Wikileaks*, yang menyebutkan bahwa Cina tak lagi ingin mempertahankan keberadaan Korea Utara dan cenderung lebih nyaman dengan peleburan (unifikasi) Korea, karena beberapa alasan yang menyangkut hubungan kedua Negara. Ada indikasi Cina mengalami tekanan dari negara-negara Barat, juga berusaha untuk menjaga citra positifnya dan berupaya memainkan peran lebih banyak dalam kancah internasional dan “mengamankan” pertumbuhan ekonominya. Ada beberapa alasan Cina membutuhkan Korea Utara dan berusaha mempertahankan eksistensinya, antara lain (Kompasiana, Kepentingan Cina Terhadap Eksistensi Korea Utara, 2010):

**a. Kepentingan ekonomi**

Cina mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan signifikan dalam dasawarsa ini. Tahun 2009, Cina mencatatkan GDP sebesar 8.7%, sementara tahun 2010, Cina mencatatkan pertumbuhan ekonomi 9.5% yang dipicu oleh menguatnya konsumsi dalam negeri dan corporate investment.

Cina butuh kawasan yang stabil untuk memantapkan reformasi internal, pembangunan ekonomi yang baik, dan menaikkan posisi diplomasinya ke lingkungan internasional. Jika Cina berhubungan langsung dengan negara liberalis, yang dikhawatirkan adalah runtuhnya sistem yang dibangun Cina sendiri, karena gap antara pembangunan di negara liberalisme dan komunisme, seperti terjadinya migrasi ke negara yang lebih mapan dan sejahtera secara ekonomi. Tentu Cina tidak ingin hal ini terjadi dan lebih enak menyandang sebagai negara “pendonor” ke Korea Utara dan mengamankan kepentingan ekonominya.

Selain itu, ada kecurigaan tentang perdagangan senjata yang dilakukan Cina kepada Korea Utara, terutama materi nuklir.

Jika ini terbukti, maka Cina seakan pisau bermata dua. Di satu sisi, melakukan perdagangan senjata, di sisi lain memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan baik bahan pangan dan lain sebagainya dan menciptakan sebuah ketergantungan Korea Utara pada Cina.

### **b. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan**

Cina berusaha mempertahankan Korea Utara, baik dalam kondisi perang dan non-perang, setidaknya sudah dibuktikan dalam keterlibatan Cina pada Perang Korea 1950-1953, dan berbagai forum internasional. Dengan kebijakan luar negeri Cina saat ini, dan di tengah pembangunan ekonomi Cina yang pesat, Cina berusaha menghindari terjadinya perang Korea jilid II, karena dengan demikian tidak akan menyita energi dan ekonomi Cina. Andaikata terjadi perang sesungguhnya, tentu Cina tak semudah itu lepas tangan dan tetap mengupayakan eksistensi Korea Utara, meskipun dalam skala terbatas.

Cina membutuhkan Korea Utara untuk mencegah terjadinya strategi serangan darat ke darat yang bisa dilakukan kapan saja oleh Amerika Serikat melalui pasukannya di Jepang. Ini wajar menjadi ancaman pada Cina, mengingat Jenderal McArthur pada perang Korea 1950-1953, menawarkan opsi ke Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman untuk melakukan serangan balik hingga ke Cina, meskipun ditolak saat itu.

### **c. Buffer Zone Liberalisme**

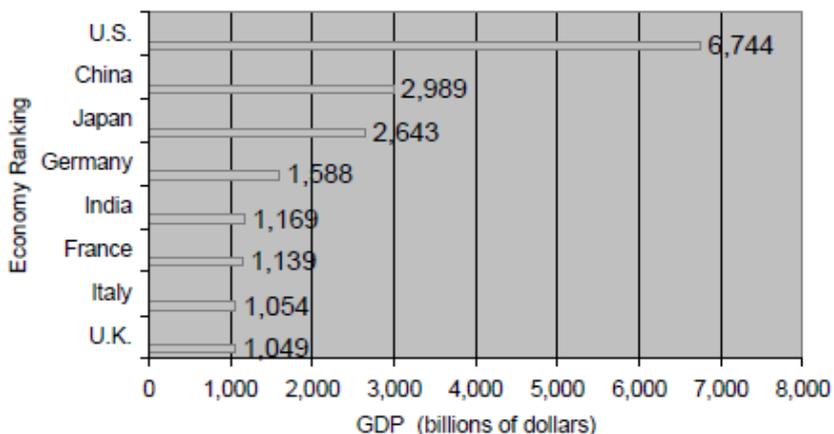
Dalam menerapkan kebijakan *China Containment Policy*, Kepentingan strategis China terhadap Korea Utara adalah sebagai Strategis *Buffer Zone*. Selain itu bagi China Korea Utara juga dapat berfungsi sebagai *guard post* untuk mengamati pergerakan Amerika Serikat di wilayah perbatasan antara China dan Korea. (Academia, Sesuaikan Democratic Peace Dalam Krisis Korea)

China membutuhkan Korea Utara sebagai *buffer zone* (zona penyangga) untuk membatasi infiltrasi liberalism. Mengacu pada sejarah, keberadaan Korea Utara sebagai akibat pemisahan dua Korea adalah ide Uni Soviet di konferensi Yalta Februari 1945, yang kemudian disetujui oleh AS. Uni Soviet-lah yang pada awalnya membutuhkan Korea Utara sebagai *bufferzone* Eropa, sebagai balas budi berperang dengan Asmelawan Jepang. Namun melihat perkembangan pasca Perang Dingin dan runtuhnya Uni

Soviet, maka Cina-lah yang paling membutuhkan saat ini.

Terlepas dari kepentingan Cina terhadap Korea Utara, perkembangan ekonomi Cina yang semakin liberal membuat ketidak seimbangan diantara Negara-negara komunis setelah runtuhnya Uni Soviet. Perekonomian negara sosialis seperti Cina yang dikenal luas sebagai negara *The Future Super Power* sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat baik dengan sistem perekonomian sosialisme pasar. Dengan kondisi perekonomian global masih cenderung variatif, Cina memainkan berbagai peran, sebagai konsumen, suppliers, pesaing, pembaharu (innovator) dan penyedia sumber daya manusia yang handal. Negara tersebut menjadi pemain yang tangguh dalam penekanan biaya produksi, peningkatan teknologi dan jasa, serta memiliki pertahanan yang kuat dalam memajukan negara. Cina juga mendorong munculnya mengenai persaingan global dengan Amerika dan negara –negara maju lain nya di masa depan.

**Tabel 6. World's Largest Economies (1996)**



Sumber: *Military Modernization In The People's Republic Of China: Implications For The United States And The Region* (Mathews, 1998, p. 5)

Dengan reformasi sistem ekonomi, Cina berhasil menerapkan politik dan ekonomi atau yang disebut *gaige kaifang*. Dengan ini modal asing diundang masuk dengan diberi banyak kemudahan. Untuk perizinan cukup menghubungi Kantor Investasi Asing. Untuk investasi minimal US\$30 juta, aplikasi investasi baru harus

mendapat izin dari pusat. Namun, di bawah jumlah itu, cukup menghubungi Kantor Investasi Asing di daerah. Waktu persetujuan investasi asing maksimal tiga hari. Bila lebih dari tiga hari tidak ada pemberitahuan dari kantor ini, otomatis permohonan investasi dianggap diterima. Selain itu, modal asing diperkenankan memiliki aset 50 hingga 70 tahun. (Academia, Pengaruh Ideologi Liberalisme Terhadap Perekonomian Negara Sosialis).

**Tabel 7. Indikator Perekonomian Global**

Tabel 1.1. Indikator Perekonomian Global

Persen, yoy

	2010	2011	2012	2013*				
				Jan'13	Apr'13	Jul'13	Oct'13	Jan'14
PDB Dunia	5,2	3,9	3,1	3,5	3,3	3,1	2,9	3,0
Negara Maju	3,0	1,7	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3
Amerika Serikat	2,5	1,8	2,8	2,0	1,9	1,7	1,6	1,9
Kawasan Eropa	2,0	1,5	-0,7	-0,2	-0,3	-0,6	-0,4	-0,4
Jepang	4,7	-0,6	1,4	1,2	1,6	2,0	2,0	1,7
Negara Emerging Market	7,5	6,2	4,9	5,5	5,3	5,0	4,5	4,7
Asia	9,8	7,8	6,4	7,1	7,1	6,9	6,3	6,5
China	10,4	9,3	7,7	8,2	8,0	7,8	7,6	7,7
India	10,5	6,3	3,2	5,9	5,7	5,6	3,8	4,4
India, at factor cost	9,7	7,5	5,1					4,6
ASEAN-5	7,0	4,5	6,2	5,5	5,9	5,6	5,0	5,0
Volume Perdagangan Dunia (barang dan jasa)	12,8	6,1	2,7	3,8	3,6	3,1	2,9	2,7
Inflasi IHK								
Negara Maju	1,5	2,7	2,0	1,6	1,7	1,5	1,4	1,4
Negara Emerging Market	5,9	7,1	6,0	6,1	5,9	6,0	6,2	6,1

Ket: PDB India berdasarkan tahun fiskal; analisis menggunakan PDB at factor cost  
 Sumber: World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)  
 \* Proyeksi IMF berdasarkan publikasi WEO di bulan bersangkutan

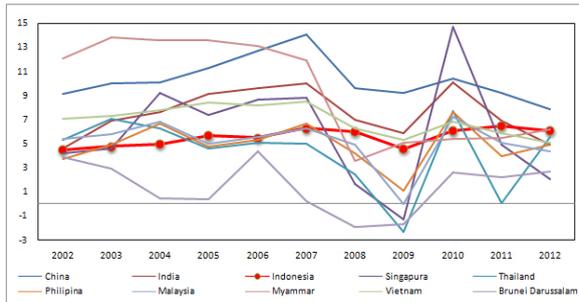
Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (BI, 2013)

Akibatnya memang luar biasa dimana *Foreign Direct Investment* (FDI) berbondong-bondong masuk ke Cina (Yilmaz, 2006, p. 93) hingga pada 1998-2001 saja, FDI mencapai lebih dari US\$ 73 milyar. Tahun 2002 meningkat 20% (Admin, Bank of China Group, "Is Deflation Made in China"). Cina mulai menggantikan Amerika Serikat sebagai tempat paling menarik bagi FDI. Rekor FDI yang masuk ke Cina terbukti paling tinggi dibandingkan seluruh negara di kawasan Asia. FDI ini secara geografis terkonsentrasi di kawasan pesisir timur dan selatan Cina, terutama di Delta Sungai Pearl dan Sungai Yangtze. Bukan hanya FDI yang meningkat dari Cina, tetapi GDP dari Cina jauh meningkat dan bahkan melampaui GDP dari Jepang.

Kota metropolitan di Provinsi Guangdong China berlahan semakin mengalami perubahan yang mana Provinsi Guangdong yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa sudah mulai muncul

gedung-gedung pencakar langit dan *fly over* menghiasi cakrawala kota terbesar nomor lima di Cina ini. Hotel, diskotek, dan pub, demikian juga waralaba seperti McDonald's, Kentucky, Pizza Hut juga bertebaran di seluruh penjuru kota. Pertumbuhan bangunan modern difokuskan di bagian timur, sedangkan dimensi tradisional dipertahankan bagian barat kota.

**Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, China dan India (2002-2012)**



No	Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata
1	Indonesia	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.3	6.0	4.6	6.1	6.5*	6.1*	6.1
2	Singapura	4.2	4.6	9.2	7.4	8.7	8.8	1.7	-1.3	14.7	4.9*	2.1*	6.5
3	Thailand	5.3	7.1	6.3	4.6	5.1	5.0	2.5	-2.3	7.7	0.1*	5.6*	4.7
4	Philippina	3.7	4.9	6.7	4.8	5.3	6.7	4.2	1.1	7.6	4.0*	4.9*	5.3
5	Malaysia	5.4	5.8	6.8	5.0	5.6	6.3	4.9	-1.5	7.2	5.1*	4.4*	5.6
6	Myanmar	12.1	13.8	13.6	13.6	13.1	11.9	3.6	5.1	5.4*	5.5*	6.2*	10.3
7	Vietnam	7.1	7.3	7.8	8.4	8.2	8.5	6.3	5.3	6.8	5.9*	5.1*	7.6
8	Brunei Darussalam	3.9	2.9	0.5	0.4	4.4	0.2	-1.9	-1.7	2.6	2.2*	2.7*	1.6
9	China	9.1	10.0	10.1	11.3	12.7	14.1	9.6	9.2	10.4	9.2*	7.9*	11.3
10	India	4.6	6.9	7.6	9.1	9.6	10.0	7.0	5.9	10.1	6.9*	4.9*	8.2

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012  
\*Angka perkiraan

Sumber: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) (Indonesia, 2014)

Cina dengan penduduk 1,3 milyar jiwa dikenal sebagai Negara dengan populasi terpadat di dunia, apalagi negeri ini tumbuh pesat di atas 7 % per tahun selama 10 tahun terakhir. Bagi investor dan perusahaan mana pun, ini berarti pasar megabesar dan menggiurkan. Ini ditambah dengan kebijakan pemerintah yang amat terbuka dalam menarik investor asing, serta mulai mendengungkan kebijakan antikorupsi. (Moenir, 2010)

Pada tahun 2004, China terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan total PDB senilai 1.3561.5 miliar RMB (Rp 1650.7 milyar). Ini membuat China menjadi peringkat kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan

tahun lalu sebesar 9,5 persen, menjadikan China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (Moenir, 2010).

Selain kemajuan ekonomi, Cina juga menuntukkan kemajuan yang signifikan di bidang militer. Hal ini dipengaruhi dari arah kebijakan Negara yang diambil. Ada enam kunci kekuatan Cina sehingga bisa menjadi Negara dengan ekonomi dan militer yang kuat. Dalam hal ini Cina memprioritaskan enam hal yaitu (Mathews, 1998, p. 13):

- a. Pembangunan ekonomi – reformasi pasar bebas
- b. Membangun sistem persenjataan militer yang modern
- c. Membangun konsep doktrin pengembangan alat perang dengan teknologi canggih.
- d. Meningkatkan integritas teritorial
- e. Meningkatkan lingkungan eksternal yang stabil dan menghindari konflik
- f. Mengkonsolidasi kekuatan dan memastikan unifikasi nasional dalam China

Sampai tahun 1990, setengah dari perdagangan Korea Utara telah dilakukan dengan Uni Soviet, Cina, dan Eropa Timur. Dengan pecahnya dunia komunis dan penekanan baru pada ekonomi pasar, perdagangan luar negeri Pyongyang pada tahun 1994 anjlok ke level terendah sejak tahun 1978. Ekspor ke China yang notabene sebagai mitra dagang utama Pyongyang, jatuh bersama dengan impor Korea Utara dari barang-barang Cina. Ekspor ke Jepang di sisi lain meningkat 20 persen sementara impor turun 18 persen. Perdagangan dengan Korea Selatan terus meningkat sejak tahun 1988 meski hubungan politik dingin dan perdagangan menyumbang lebih dari 95 persen pendapatan Korea Utara. (www.fas.org, www.fas.org, 2013)

Cina tetap mempertahankan pasokan minyak ke Korea Utara dari sekitar satu juta ton per-tahun. Selain itu, Korea Utara bergantung pada 500.000 ton bahan bakar minyak berat dari KEDO. Fungsi inti dari ekonomi militer sendiri dapat dipertahankan tanpa harus terus ketergantungan pada input eksternal sebagai kendaraan untuk merangsang kegiatan ekonomi dalam negeri (Snyder, 2001, pp. 527-528)

Perkembangan ekonomi Cina yang semakin maju menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi Negara-negara komunis seperti Korea Utara. Korea Utara akan sulit sekali mengejar ketertinggalannya

terhadap Cina karena sumber daya yang dimiliki oleh Korea Utara sangat terbatas dan kebijakan baru yang diambil oleh Kim Jong Il untuk menutup kerjasama dengan dunia internasional menyebabkan Korea Utara menjadi Negara dengan ekonomi yang lemah. Kerjasama antara Cina dan Korea Utara juga semakin menurun seiring pembukaan seluas-luasnya kerjasama ekonomi antara Cina dan investor asing.

### **3. Kemajuan Ekonomi Korea Selatan**

Pandangan pihak eksternal terhadap penurunan ekonomi Korea Utara terus mempengaruhi mereka dalam membuat kebijakan. Dilema yang dihadapi antara lain, pihak eksternal sepakat bahwa keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin berat sebelah. Dengan kata lain, Ekonomi Korea Selatan semakin jauh meninggalkan Korea Utara, hal ini yang menjadi pandangan utama pihak eksternal bahwa kedepan Korea Utara akan runtuh atau jatuh secara perlahan. Iklim politik internal masih merupakan faktor utama penyebab gejala keruntuhan ini dan masalah ekonomi, krisis pangan, pengungsi atau bahkan militer menjadi faktor sekundernya (Snyder, 2001, pp. 524-528)

Upaya ekonomi merupakan upaya rekonsiliasi Korea Utara dan Selatan yang sempat berhasil walaupun hubungan keduanya kembali memburuk. Korea Selatan sendiri menjadi partner dagang terbesar kedua Korea Utara setelah China. Korea Selatan sendiri memiliki dinamika ekonomi yang naik-turun sebelum menjadi salah satu negara dengan perekonomian tertinggi di dunia saat ini. Pada awalnya sejak tahun 1940 hingga 1945, perekonomian Korea Selatan sangat tergantung dengan Jepang sebagai pemerintah kolonialnya. Keadaan ekonomi Korea Selatan berlanjut dengan ritme yang tidak begitu bagus setelah meletusnya perang dengan Korea Utara di tahun 1950an. Setelah perang selesai, pada tahun 1953 hingga 1960 ekonomi Korea Selatan bergantung pada financial aid dan foreign assistance. Pada tahun 1962, pemerintah Korsel mencoba mengatur sistem ekonominya, dimana pemerintah mengatur sistem fiskal dan moneter serta budget dan reformasi pajak.

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sendiri dimulai pada tahun 1964, dimana terjadi kenaikan GNP sebanyak 9 persen, hingga pada tahun 1971, komoditi ekspor Korsel mencapai \$1,132 juta dan ekspor manufaktur mencapai 86% dari total komoditas ekspor. Perekonomian Korea Selatan kembali jatuh ketika terjadi krisis Asia di tahun 1997, dimana hal ini mengantarkan Korsel menjadi

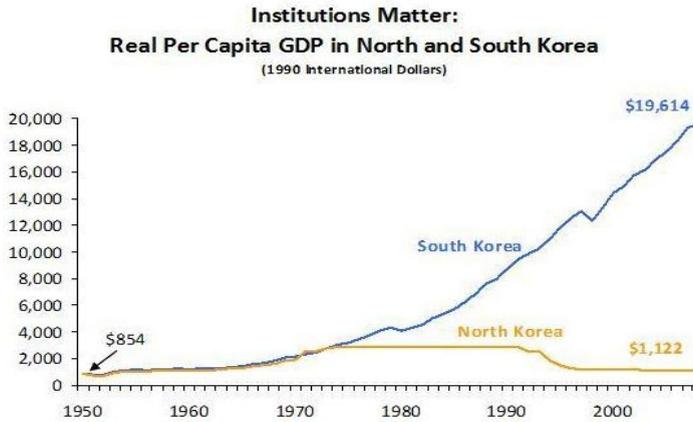
pasien IMF dan dan berada di dalam pantauan IMF hingga tahun 2000, dimana Korea Selatan berhasil meningkatkan GDP nya hingga 10.9%. Saat ini Korea Selatan menduduki peringkat 7 dalam trading-partner US, dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-15 di dunia (US Department of State Diplomacy, 2012). Saat ini perekonomian Korea Selatan sedang mengalami perubahan dari centrally-planned government directed investment menjadi market oriented model. Hal ini tidak terlepas dari munculnya chaebol (perusahaan raksasa) Korea Selatan yang menguasai pasar dunia, seperti merk automobile Hyundai dan KIA, serta produk elektronik Samsung dan LG (Journals, 2014).

Saat ini Korea Selatan juga tengah mengembangkan pasarnya ke US dengan KORUS FTA atau Korea-US Free Trade Agreements yang disepakati pada tahun 2011 dan menjadi FTA terbesar kedua US setelah NAFTA dan FTA terbesar kedua Korea Selatan setelah Korea-European Union FTA. Hal ini membuat Korea Selatan menjadi salah satu motor perekonomian dan macan Asia di Asia Timur (Journals, 2014).

Jika melihat Korea Selatan saat ini, maka tidak akan terlepas dari pandangan bahwa negara tersebut telah menjadi salah satu negara dengan perekonomiannya yang kuat. Namun tentunya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat pesat ini telah melalui beberapa fase hingga sampai saat ini. Ekonomi Korea Selatan sendiri sangat ditunjang oleh kemunculan industri-industri baru. Prinsip demokrasi dan liberalisme yang terdapat dalam politik Korea Selatan juga berdampak pada perekonomian negara ini. Di mana Korea Selatan menjadi salah satu negara anggota G20 dengan pertumbuhan GDP mencapai 6,1% pada tahun 2010 (Affairs, 2017). Masuknya Korea Selatan Menjadi anggota G20 inilah yang membuat suara dari Korea Selatan semakin didengar oleh dunia internasional dan semua kebijakan yang diambil akan menjadi perhatian dunia internasional.

Dengan begini Korea Selatan semakin meninggalkan rival abadinya yaitu Korea Utara. Terlihat pada tabel perbandingan pendapatan perkapita dibawah ini, bahwa sejak tahun 1980-an Korea Selatan memperlihatkan perkembangan ekonomi yang jauh melampaui Korea Utara yang dari tahun ke tahun semakin menurun.

**Tabel 9. Perbandingan pendapatan perkapita antara Korea Utara dan Korea Selatan (1950-2000)**



Sumber: [www.intellectualltakeout.org](http://www.intellectualltakeout.org) (Intellectualltakeout, 2014)

Jika dilihat dari tabel diatas, perekonomian Korea Utara dan Korea Selatan Mengalami peningkatan yang sama hingga pada tahun 1970-an karena perubahan arah kebijakan ekonomi yang diterapkan kedua negara mengakibatkan perbedaan yang drastis. Perbedaan tingkat ekonomi yang dihasilkan kedua negara cukup signifikan dimana Korea Utara masih dikisaran \$2000 tetapi ekonomi Korea Selatan meningkat tajam hingga mencapai \$19.614 pada tahun 2000-an. Perbedaan perkembangan ekonomi yang dialami kedua negara ini juga dipengaruhi oleh runtuhnya Uni Soviet sebagai penyokong utama ekonomi Korea Utara.

**Tabel 10. Economic Scales and Per Capita GNI in South and North Korea**

**Economic Scales and Per Capita GNI in South and North Korea**

	North Korea (A)		South Korea (B)		B/A	
	2009	'10	2009	'10	'09	'10
Nominal GNI (KRW billion)	28,634.6	30,048.7	1,069,738.0	1,173,123	37.4	39.0
Per capita GNI (KRW 10 thousand)	119.0	124.2	2,195.0	2,400.0	18.4	19.3

Sumber: <http://www.intellectualltakeout.org> (Intellectualltakeout, 2014)

Selain mengembangkan ekonomi yang kuat, Korea Selatan juga berupaya membangun pertahanan yang hebat guna mencapai stabilitas keamanan nasional dari tekanan hingga pertikaian dengan negara lain khususnya Korea Utara. Korea Selatan mengalokasikan 2.6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Angkatan bersenjata Republik Korea atau yang dikenal dengan Korea Selatan didirikan pada 15 Agustus 1948 yang terbagi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara. Markas besar angkatan bersenjata Korea Selatan ini terletak di Seoul. Bagi pria Korea Selatan yang berusia 19 hingga 35 tahun diwajibkan ikut pendidikan militer dalam masa waktu 21 hingga 24 bulan, tergantung cabang militer. Saat ini jumlah personil militer aktif diperkirakan mencapai 655.000 dan 3.040.000 personil cadangan. Pada tahun 2010, Korea Selatan menambah anggarannya menjadi 2,65 dari APBN negara yang jika dirupiahkan menjadi 29,6 Trilyun (Mardhiansyah).

Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menandatangani perjanjian kerja sama militer baru untuk meningkatkan komunikasi bersama dalam menghadapi serangan Korea Utara di masa mendatang. Penandatanganan yang berlangsung pada Senin, 25 Maret 2013 ini ditujukan untuk menghadapi ancaman serangan militer Korea Utara telah melakukan ancaman berupa uji coba nuklir. Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan kerja sama itu dirancang untuk membalas serangan Korea Utara di masa mendatang. Kerja sama kedua Negara yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai dirancang setelah Pyongyang menggempur kepulauan Korea Selatan pada 2010 lalu dan menyebabkan empat orang tewas (Aminuddin, 2013).

#### **4. Perkembangan Militer Jepang Yang Semakin Kuat**

Pada Perang Pasifik, Jepang seakan menjadi ancaman serius bagi kawasan Asia karena Jepang terkenal dengan agresi dan imperialis yang brutal. Pilihan diberikan Jepang untuk menempatkan angkatan bersenjata secara bertanggung jawab untuk pertahanan negara. Tahun 1947, Amerika Serikat menekan Jepang untuk menandatangani perjanjian keamanan dan dibuatlah "Konstitusi Damai bagi Jepang. Pada konstitusi dinyatakan bahwa perang tidak berlaku sebagai hak untuk mendapatkan kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan diartikan untuk memicu perselisihan internasional. "Konstitusi Damai" dijatuhkan

oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II tersebut tercantum perjanjian keamanan Amerika Serikat dan Jepang. Yang ditujukan untuk menentramkan keadaan Asia Pasifik pada saat itu.

Uji coba nuklir Korea Utara tanggal 5 Juli 2006 sangat merepotkan Jepang. Karena Jepang sangat berkepentingan untuk menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman serangan nuklir Korea Utara. Bahkan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara ini, seringkali Jepang menanggapi secara emosional. Ekspresi kecemasan Jepang seringkali terlihat dalam pernyataan-pernyataan politiknya, terutama munculnya wacana opsi militer. Bahkan Sekretaris Utama Kabinet Jepang, Shinzo Abe menyatakan menyerang basis-basis rudal Korea Utara dapat dianggap sebagai hak konstitusional Jepang untuk mempertahankan diri. Setiap aktor negara akan senantiasa mempertahankan eksistensinya melalui instrumen militer dalam kondisi *self-help system* dimana setiap aktor negara harus menyandarkan kekuatan militernya untuk melindungi keamanan nasionalnya. (Academia, Pengaruh Kepemilikan Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Dengan Jepang, 2014)

Dengan kejadian tersebut maka Konstitusi Jepang melarang penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional dan melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata untuk berperang. Namun, Pemerintah Tokyo menafsirkan peraturan itu memperbolehkan negara memiliki angkatan bersenjata untuk membela diri. Keberadaan Pasukan Bela Diri yang beranggotakan 240.000 orang bukan hal yang melanggar konstitusi. Ide mengubah konstitusi itu mendapat reaksi negatif dari sejumlah China, Korea Selatan, dan sejumlah negara Asia Tenggara yang masih trauma atas kebrutalan pasukan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Pada tanggal 11 September 2006, Jepang berhasil meluncurkan sebuah satelit mata-mata menggunakan roket H-IIA dari Pusat Ruang Angkasa Tanegashima di wilayah Kagoshima, bagian selatan Jepang. Ini merupakan satelit ketiga dari empat IGS (Information Gathering Satellites) generasi terbaru yang diperlukan Badan Antariksa Jepang (JAXA) untuk memotret seluruh permukaan Bumi. Satelit pertama dan kedua telah berhasil diluncurkan sejak Maret 2003. Satelit-satelit ini dibangun untuk mengamati aktivitas peluncuran misil balistik Korea Utara yang melalui ruang udara Jepang sebelum jatuh di Samudera Pasifik sejak 1998. Percobaan misil yang dilakukan kembali Korut 5 Juli silam semakin membuat geram negara yang mendapat julukan Matahari Terbit itu (Academia, 2014).

Selain itu Badan Pertahanan Jepang menuntut kenaikan anggaran pertahanan militer lebih dari 50 persen kepada partai yang berkuasa, Partai Demokratik Liberal (LDP) sebagai antisipasi terhadap serangan Korea Utara. Secara total, untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2007, Badan Pertahanan Jepang mengajukan anggaran hingga 4,86 triliun yen. Untuk pembelian misil penangkal, anggaran diajukan sebesar 219 miliar yen atau naik 56,5 persen dibandingkan anggaran tahun berjalan. Tuntutan kenaikan anggaran digunakan untuk mendapatkan misil penangkap Standard Missile 3 yang menjadi salah satu perangkat yang dipasang pada kapal perang yang didatangkan oleh Amerika Serikat. (Academia, 2014)

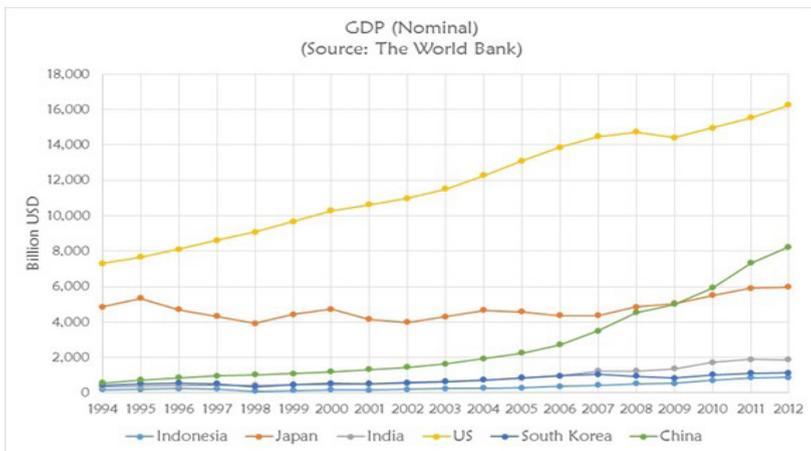
**Tabel 11. Indikator Makroekonomi Negara Maju**

	Defisit Fiskal / PDB				Utang Pemerintah / PDB				Pengangguran			
	2010	2011	2012	2013*	2010	2011	2012	2013*	2010	2011	2012	2013*
AS	-10,8	-9,7	-8,3	-5,8	95,2	99,4	102,7	106,0	9,6	8,9	8,1	7,6
Jepang	-9,3	-9,9	-10,1	-9,5	216,0	230,3	238,0	243,5	5,1	5,1	4,4	4,2
Kawasan Eropa	-6,2	-4,2	-3,7	-3,1	85,7	88,2	93,0	95,7	10,1	10,1	11,4	12,3
Irlandia	-30,5	-13,1	-7,6	-7,6	91,2	104,1	117,4	123,3	13,9	13,9	14,7	13,7
Italia	-4,3	-3,7	-2,9	-3,2	119,3	120,8	127,0	132,3	8,4	8,4	10,7	12,5
Portugal	-9,9	-4,4	-6,4	-5,5	94,0	108,4	123,8	123,6	10,8	10,8	15,7	17,4
Spanyol	-9,7	-9,6	-10,8	-6,7	61,7	70,4	85,9	93,7	20,1	20,1	25,0	26,9
Yunani	-10,8	-9,6	-6,3	-4,1	148,3	170,3	156,9	175,7	12,5	12,5	24,2	27,0

Sumber: WEO Database, Oktober 2013, IMF  
\* proyeksi

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (BI, Laporan Tahunan Perekonomian, 2013)

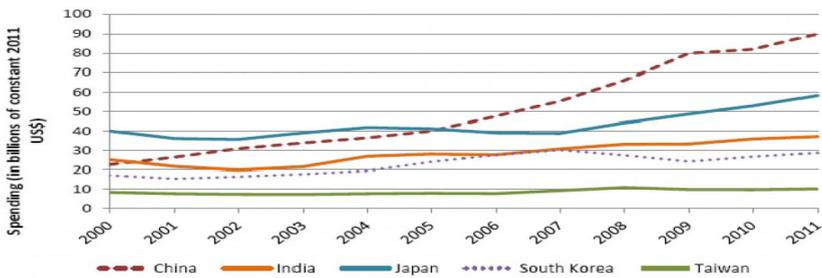
**Tabel 12. GDP Negara Maju di Asia**



Sumber: <http://ekonomi.kompasiana.com> (Kompasiana, Proyeksi ekonomi Indonesia, 2014)

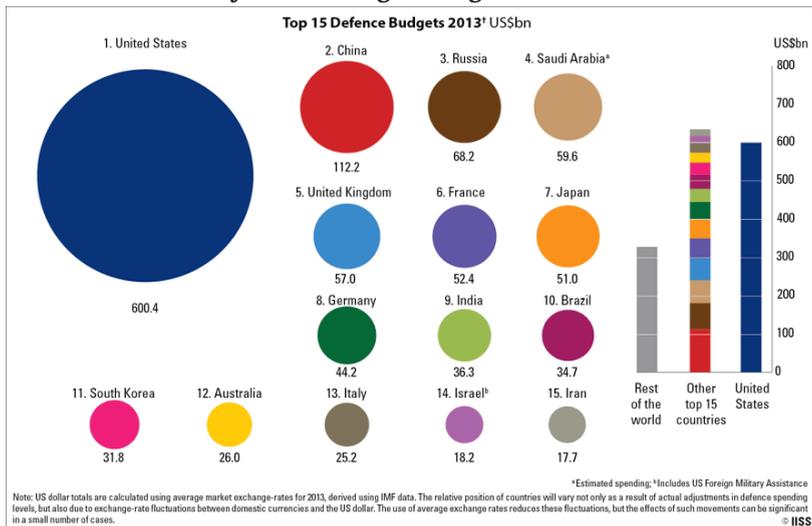
Dengan tingkat perkembangan ekonomi yang maju seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas, sangat mudah bagi Jepang untuk meningkatkan kekuatannya. Di Asia, pertumbuhan anggaran pertahanan terjadi sangat cepat dan pengadaan militer meningkat tajam. Pergeseran distribusi global kekuatan militer terhadap Asia, disorot oleh IISS dalam beberapa tahun terakhir terus berlanjut.

**Tabel 13. Total Belanja Pertahanan per- Negara (2000-2011)**



Sumber: <http://www.fkpmaritim.org> (Fkpmaritim, 2014)

**Tabel 14. Belanja Militer Negara-Negara di Dunia tahun 2013**



Sumber: <http://www.iiss.org> (Chipman, 2014)

Kalau dilihat dari gambar diatas maka belanja militer dari Jepang menempati posisi ke 7 terbesar didunia setelah Perancis. Sedangkan Korea Selatan juga menjadi Negara dengan belanja militer terbesar di dunia. Hal ini menggambarkan bahwa kedua Negara sedang membangun basis militer yang besar dan kuat untuk menanggulangi kekuatan Korea Utara.

Selain itu juga terjadi perjanjian kerjasama di bidang militer antara Jepang dan Korea Utara sejak tahun 1945 dengan melakukan pertukaran intelejen dan militer meskipun terjadi demo besar-besaran dari rakyat Korea Selatan tetapi perjanjian kerjasama tersebut tetap dilaksanakan (voaindonesia.com).

Garis Besar Kerjasama Pertahanan Jepang dan Amerika Serikat disetujui pada *Security Consultative Committee* yang mana isinya antara lain adalah: (Sinaga, 2014)

a. *Objectives of the Guidelines*

Secara garis besar, kerjasama pertahanan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat yang lebih efektif dan solid pada saat situasi normal ataupun situasi ketika Jepang diserang di sepanjang wilayah Negara Jepang.

b. *Matters for Cooperation Prescribed in the Guidelines*

*Cooperation under Normal Circumstances.* Kedua negara akan meningkatkan kerjasama agar dapat semakin erat yang diperuntukkan bagi pertahanan Jepang dan bagi terciptanya keamanan internasional yang lebih stabil serta akan tetap menjalin kerjasama di berbagai bidang di bawah situasi normal. Sejumlah kerjasama yang dilakukam antara lain konsultasi kebijakan dan informasi, dialog keamanan dan pertukaran pasukan militer, *UN Peacekeeping Operations* dan *international humanitarian operations*, kerjasama pertahanan bilateral, meningkatkan latihan militer bersama dan membangun mekanisme koordinasi bilateral

*Actions in Response to Armed Attack against Japan.* Kerjasama bilateral untuk merespon serangan bersenjata yang dilancarkan kepada Jepang demi menjaga pertahanan kedua negara.

Kerjasama pertahanan trilateral di antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang kembali mengambil langkah maju

yang penting pada tanggal 22 Maret 2013 ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan mengumumkan suatu rangkaian rencana kontingensi untuk kerja sama pertahanan terhadap provokasi apa pun dari Korea Utara, yang akan mencakup pertahanan, termasuk partisipasi kekuatan Amerika Serikat yang berbasis di Jepang. Kesepakatan baru tersebut merupakan hal yang penting dalam kerja sama trilateral dan interoperasi lebih lanjut antara Amerika Serikat, Korea, dan Jepang, demikian tulis Scott W. Harold dalam Asia Times. Dia juga menambahkan bahwa kesepakatan tersebut akan meningkatkan juga hubungan antara Seoul dan Tokyo. Tiga negara tersebut mengadakan suatu latihan militer angkatan laut tahunan di Laut China Timur. Latihan terbaru diadakan selama seminggu, dari tanggal 10 hingga 17 Mei, dimana kapal-kapal perang Jepang dan Korea Selatan melakukan suatu latihan SAR gabungan, menggunakan kapal-kapal yang berasal dari kelompok penyerang kapal induk CSG dari Nimitz (Apdforum, 2013).

Dalam pernyataan bersama, disebutkan bahwa strategi pertahanan baru akan fokus dengan melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara dengan mengintegrasikan persenjataan kedua negara lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Kedua negara juga akan terus mengembangkan rencana untuk mempertahankan serangan rudal Korea Utara. Kedua negara juga sepakat untuk memasukkan dunia maya sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka secara keseluruhan.

Langkah AS merupakan sebuah indikasi dukungannya akan memperkuat militer Jepang, serta meningkatkan hubungan militernya dengan negara-negara di kawasan Asia untuk mengimbangi pergerakan militer China yang signifikan. Langkah tersebut menurut pengamat militer di Jepang, adalah upaya lain dari pemerintah AS untuk mengurangi kecemasan yang berkembang di Asia bahwa AS terlalu sibuk dengan persoalan politik dalam negerinya dan masalah di Timur Tengah, sementara mereka kini menyatakan bahwa “poros” kebijakannya telah bergeser ke kawasan Asia.

Menhan Hagel menyatakan bahwa komitmen Amerika terhadap keamanan Jepang adalah merupakan komponen penting dari hubungan kedua negara. Hagel mengatakan, AS akan memperluas bantuan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk membantu mereka melawan klaim teritorial Cina. Jepang berkomitmen untuk

meningkatkan kemampuan keamanannya dan juga berjanji untuk meningkatkan belanja militer (Ramelan, 2013).

#### **D. Perubahan Kebijakan dari Ekonomi (*Juche*) ke Kebijakan Militer (*Military First*)**

Dengan adanya tekanan dari perubahan struktur internasional, pada masa awal kepemimpinannya, Kim Jong Il harus merubah kebijakan ekonomi yang terbukti sudah relevan lagi karena runtuhnya uni soviet sebagai mitra dagang utamanya. Di awal kepemimpinannya, Kim Jong Il dihadapkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dan keterbatasan sumberdaya di dalam negeri.

Didalam kehancuran ekonomi, rezim Kim Jong Il mengalokasikan kebijakannya lebih kepada militer daripada ekonomi, meskipun negaranya menjadi Negara yang gagal (*failed state*) tetapi Korea Utara tetap melindungi hak hidup bagi setiap warganya (KoreaInstitute, 2012, p. 14).

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dari kekuatan militer Korea Utara. *Pertama*, kebijakan luar negeri Korea Utara era-1990-an terlihat sangat ambisius, agresif serta suka menantang Negara lain. *Kedua*, aksi militer Korea Utara dengan kebijakan yang objektif. Dengan kata lain, pemimpin Korea Utara sangat rasional dalam menggunakan kekuatan militer serta sangat mempertimbangkan aksi, detail keadaan, intensitas dan target sasaran yang jelas sehingga dalam setiap aksinya Korea Utara selalu sukses. *Ketiga*, aksi militer Korea Utara selalu mencari tempat yang strategis dalam setiap aksinya dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan. *Keempat*, aksi yang dilakukan Korea Utara merupakan sarana diplomasi (*military-diplomatic*) (Michishita, 2010, pp. 1-2).

Meskipun sedang dilanda krisis, Korea Utara tetap melanjutkan program nuklirnya dengan nilai investasi yang sangat besar. Pengembangan nuklir Korea Utara mempunyai implikasi politik dan militer pada tingkatan lokal, regional, maupun internasional dan hal inilah yang dianggap oleh pemerintah Amerika suatu hal yang mengawatirkan. Tetapi perbedaan tingkat tekanan (*offensive*) terjadi perbedaan atau ketidak samaan intensitas dalam jangka waktu tertentu (Michishita, 2010, p. 105).

Berbeda dengan kebijakan luar negeri pada masa Kim Il Sung yang lebih mementingkan ekonomi, Kim Jong Il lebih

mementingkan pembangunan di bidang militer. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kekuatan militer Korea Utara yang semakin tinggi disamping kekuatan Korea Selatan dan Jepang kekuatan militernya juga semakin meningkat seiring datangnya dukungan dari Amerika Serikat. Dalam mengembangkan kemampuan militernya, Korea Utara sampai menganggarkan untuk militer 4 sampai 7 miliar dolar. Terkait dengan kekuatan militer Korea Utara, berikut ini adalah kekuatan militer Korea Utara mulai dari senjata nuklir sampai dengan kekuatan tentaranya.

### 1. Senjata Nuklir

Meskipun selalu mendapat kecaman dari dunia internasional dan desakan untuk melakukan penutupan fasilitas nuklir di Korea Utara, Negara tersebut masih saja melakukan pengayaan uranium yang akan dijadikan bahan baku senjata nuklir. Pengembangan nuklir Korea Utara juga merupakan strategi offensivenya untuk memperlihatkan kemampuan persenjataan yang dimiliki kepada dunia internasional karena sampai sekarang, nuklir masih dianggap sebagai senjata yang paling ditakuti di dunia.

Dari data yang dicatat oleh SIPRI tidak memunculkan jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara, hal ini dikarenakan Korea Utara sudah keluar dari NPT dan tidak pernah mempublikasikan jumlah kepemilikan senjata nuklirnya kepada dunia internasional.

**Tabel 15. World nuclear forces, January 2012**

Country	Year of first nuclear test	Deployed warheads <sup>a</sup>	Other warheads <sup>b</sup>	Total Inventory
United States	1945	2 150 <sup>c</sup>	5 850	~8 000 <sup>d</sup>
Russia	1949	1 800 <sup>e</sup>	8 200 <sup>f</sup>	~10 000 <sup>g</sup>
United Kingdom	1952	160	65	225
France	1960	290	10	~300
China	1964	..	200 <sup>h</sup>	~240
India	1974	..	80-100 <sup>h</sup>	80-100
Pakistan	1998	..	90-110 <sup>h</sup>	90-110

Country	Year of first nuclear test	Deployed warheadsa	Other warheadsb	Total Inventory
Israel	..	..	~80h	~ 80
North Korea	2006	..	..	?i
<b>Total</b>		<b>~4400</b>	<b>~14600</b>	<b>~19000</b>

Sumber:Shannon N. Kile, *World Nuclear Forces*. (Kile, 2012, pp. 307-350)

**Gambar 1.Reaktor Nuklir dan Pusat-Pusat Pengembangan Nuklir Korea Utara**



Sumber:<http://www.guardian.co.uk> (Guardian, 2012)

Sedangkan menurut data yang dihimpun oleh [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), Rusia masih memiliki jumlah Nuklir tertinggi yaitu sebanyak 10.000, sedangkan Korea Utara mempunyai 10 Nuklir. Meskipun jumlahnya bisa dibilang sedikit, tetapi ini merupakan ancaman yang berarti terutama bagi Korea Selatan dan Jepang karena kedua negara tersebut sama sekali tidak mempunyai senjata nuklir. Maka dari itu, faktor inilah yang menjadi latarbelakang kenapa tindakan offensive Korea Utara lebih ditujukan kepada Koera Selatan dan Jepang.

Statemen dari *Director of National Intelligence Public Affair Office Washington DC* menyebutkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 menurut analisis sample udara telah terdeteksi radioaktif di Korea Utara dan itu akibat dari ledakan reaktor nuklir bawah tanah P'unggye pada 9 Oktober 2006 serta diperkirakan kurang dari 1 kiloton (INTELLIGENCE, 2006).

Dalam statemen resmi Wakil Menteri Korea Utara Gye Gwan dalam kunjungan Siegfried S. Hecker ke pusat pengembangan nuklir Yongbyon pada 2004 ada hal yang menarik yaitu Wakil Menteri Korea Utara mengatakan bahwa Sebenarnya Korea Utara menginginkan resolusi perdamaian di dalam konflik krisis nuklir ini. Korea Utara menginginkan *denuclearization* di semenanjung Korea, beliau juga menekankan bahwa Korea Utara sangat fleksible dan sabar dalam masalah ini (Hecker, 2004, pp. 2-3).

Sangat sulitnya menembus Negara Korea Utara membuat dunia Internasional merasa terhambat untuk mendapatkan data riil terkait kepemilikan nuklir Korea Utara. Terjadi negosiasi yang panjang antara Washington dengan Pyongyang pada bulan Oktober 1999 terkait ijin inspektur Amerika untuk bisa melihat situs di Kumchangri dimana dugaan sementara dari Amerika adalah situs nuklir. Pada Maret 2000, inspektur AS diizinkan masuk situs tersebut tetapi dengan imbalan yaitu bantuan pangan. Setelah melakukan observasi disana ternyata inspektur Amerika tidak menemukan apa-apa termasuk situs nuklir (Beal, 2005, p. 86).

Keterbatasan akses dari pihak luar untuk melihat seberapa jauh perkembangan pengayaan uranium ataupun produksi senjata nuklir Korea Utara adalah masalah utama dalam memetakan seberapa besar kekuatan militer dari Negara tersebut. Hal ini lagi-lagi karena sikap tertutupnya Korea Utara terhadap pihak asing, baik pembatasan akses kepada para peneliti maupun para wisatawan asing yang ingin masuk kenegara tersebut.

Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini terbukti menjadi salah satu strategi *balance of power* dan sebagai sarana *deterrence* bagi Korea Selatan serta Jepang. Kepemilikan Nuklir oleh Korea Utara merupakan simbol dari kekuatan militer yang dimiliki sehingga negara musuh (Korea Selatan, Jepang dan Amerika) harus berpikir ulang jika akan menyerang Kora Utara.

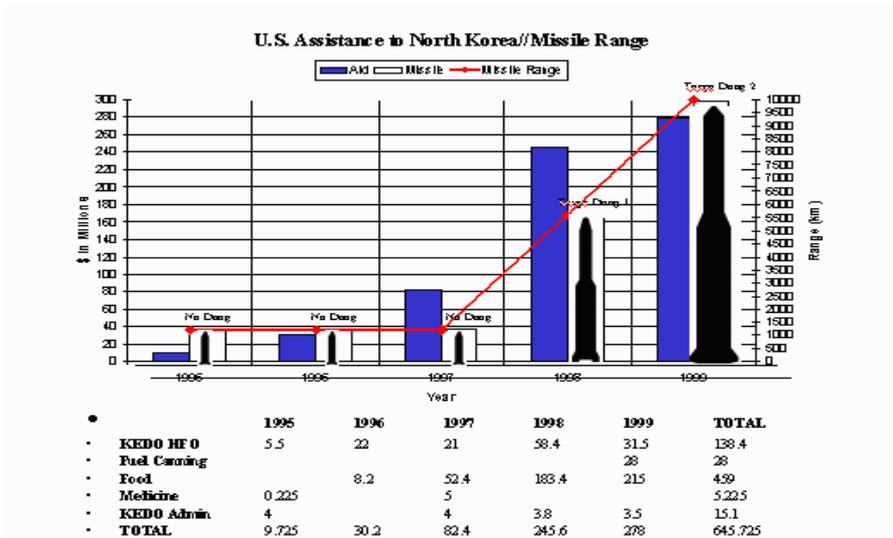
Gambar 2. Kepemilikan Senjata Nuklir Di Seluruh Dunia

Nuclear weapons stockpiles around the world



Source: Federation of American Scientists ([www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), 2012)

Tabel 16. U.S. Assistance to North Korea Missile Range

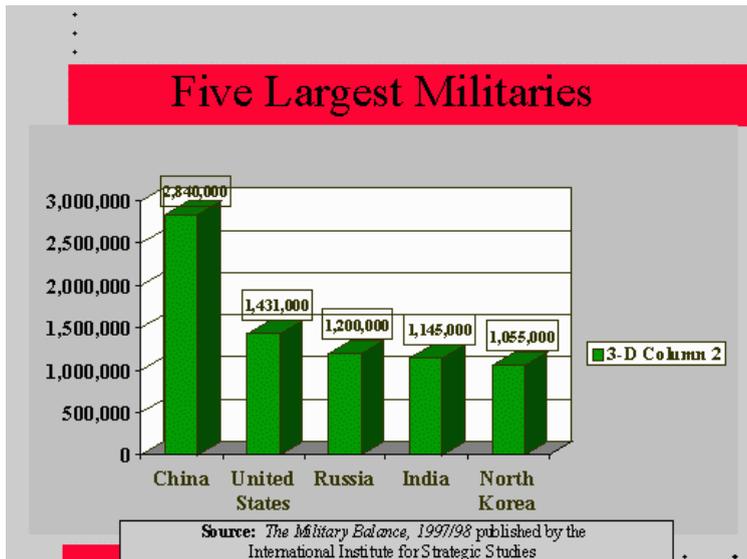


Sumber: North Korea Advisory Group (NKAG, 1999)

Dari Tabel Diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 1996 sampai tahun 1999, Korea Utara terus mengembangkan missilnya dan

peningkatan yang signifikan ditunjukkan pada tahun 1999. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa Negara Korea Selatan, Jepang dan Amerika merasa terancam akan keamanan Negaranya masing-masing. Selain itu, Korea Utara dalam persenjataan militer masuk kedalam lima Negara besar pemilik militer terbesar di Dunia. (Lihat Tabel 9).

Tabel 17. Lima Negara Dengan Militer Terbesar



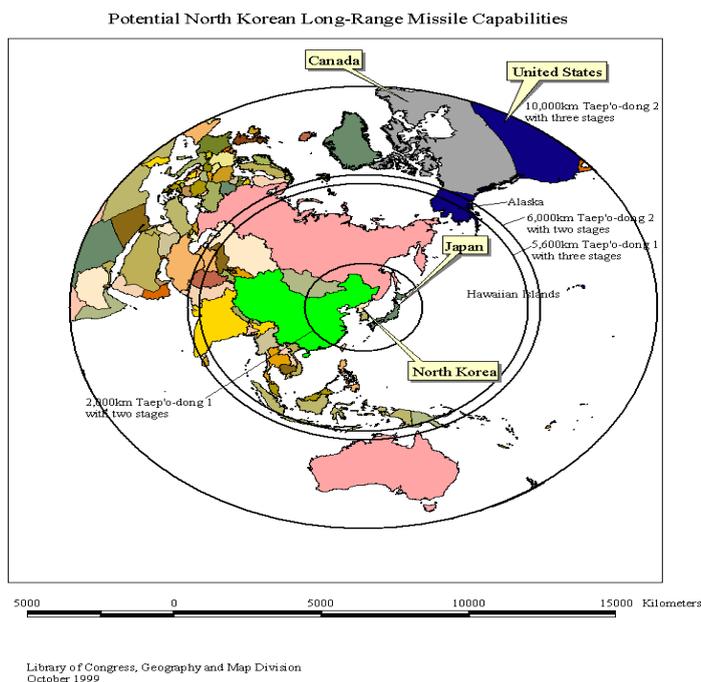
Sumber: North Korea Advisory Group (NKAG, 1999)

## 2. Rudal

Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Korea Utara memiliki sedikitnya 1.000 rudal dari berbagai jenis, termasuk beberapa jenis dengan jangkauan lebih dari 1.860 mil (3.000km). Korea Utara juga telah menguji coba rudal antar benua mereka yaitu rudal Taepodong (Admin, Kekuatan Militer Korea Utara, 2012).

Dilihat dalam gambar 3 maka jarak jelajah rudal Korea Utara bisa menjangkau Korea Selatan, Jepang dan Amerika. Ketiga Negara tersebut memang menjadi sasaran utama bagi rudal Korea Utara, dengan berada di dalam jangkauan rudal tersebut maka Korea Selatan, Jepang dan Amerika patut berhati-hati serta melakukan antisipasi atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara.

**Gambar 3. Jangkauan Rudal Korea Utara**



Sumber: North Korea Advisory Group (NKAG, 1999)

### 3. Senjata Kimia dan Biologis

Perencana militer AS dan sekutu yakin bahwa Korea Utara akan kewalahan dalam perang konvensional dengan Korea Selatan, tetapi mereka khawatir bagaimana Pyongyang akan menggunakan senjata kimia dan biologis. Kementerian pertahanan Korsel dan estimasi lain mengatakan bahwa Korut memiliki cadangan besar 2.500-5.000 ton senjata kimia yang cukup untuk menimbulkan korban yang mengerikan di Korea Selatan. Bahan kimia tersebut dapat diantarkan Korut ke Korsel hanya dengan jarak jangkauan artileri, peluncur roket, rudal balistik, pesawat terbang dan kapal Angkatan Laut Korut. Korut juga memiliki program senjata biologi, tapi analisis belum menemui kejelasan tentang hal ini, apakah masih tahap bergerak di luar penelitian atau apakah sudah dalam

pengembangan. Pyonyang diyakini memiliki Anthrax, gas Mustard, Sarin, Botulisme dan Fosgen (Admin, Kekuatan Militer Korea Utara, 2012).

#### **4. Personil Militer**

Dengan wajib militer dimulai pada usia 17 tahun, jumlah personil Angkatan Bersenjata Korut saat ini sekitar 1,2 juta. Negara ini juga memiliki cadangan sekitar 7,7 juta tentara. (Admin, Kekuatan Militer Korea Utara, 2012)

#### **5. Angkatan Darat**

Menurut perkiraan pemerintah AS dan analisis lainnya, jumlah senjata berat Korut terbilang banyak. Terdiri dari 3.500 unit MBT/Main Battle Tank (Tank Tempur Utama), 560 unit tank ringan, 2.500 lapis baja pengangkut personil, 3.500 artileri derek, 4.400 self propelled artileri, 2.500 peluncur roket, 7.500 mortir, 1.700 peluncur recoilless, 11.000 senjata anti udara dan jumlah yang tidak diketahui untuk senjata anti tank (Admin, Kekuatan Militer Korea Utara, 2012).

#### **6. Angkatan Laut**

Angkatan laut Korut memiliki armada besar kapal selam yang diperkirakan mencapai 92 buah. Korut juga memiliki 3 fregat (kapal perusak), 6 korvet, 43 kapal rudal, 158 kapal patroli besar, 103 fast torpedo craft, 334 patrol force craft, 10 kapal amfibi, 2 coastal defense missile batteries, 130 hovercraft, 23 kapal penyapu ranjau, 8 kapal midget (cebol) dan 4 kapal survei (Admin, Kekuatan Militer Korea Utara, 2012).

#### **7. Angkatan Udara**

Angkatan Udara Korea Utara yang dirancang untuk serangan cepat di seberang perbatasan dengan Korea Selatan terdiri dari 80 pesawat bomber, 541 fighter dan fighter serangan darat, 316 pesawat angkut, 588 helikopter transportasi, 24 helikopter serang dan setidaknya satu pesawat tanpa awak (Admin, Kekuatan Militer Korea Utara, 2012).

# BAB III

## KEPENTINGAN POLITIK KIM JONG IL

### A. Ketidakstabilan Politik

Sistem politik Korea Utara sebagai negara komunis warisan ayahnya yaitu Kim Il-sung menjadi landasan bagi Kim Jong-il untuk mengkokohkan statusnya. Kim Jong-il akhirnya menampilkan dirinya secara resmi pada tahun 1998, saat dia dipilih kembali sebagai ketua Komite Pertahanan Nasional. Walaupun format dasar “pengusaan dengan warisan” masih tersisa karena status ayahnya yang sudah meninggal dunia tetap tidak ada perubahan sebagai pemimpin tertinggi di Korea Utara, Kim Jong-il memulai era dirinya sebagai satu satunya kekuatan tunggal yang tak tertantang di bawah semboyan baru yaitu “*military first*”. (KBS, 2013)

Banyak analisis tentang Korea Utara lebih fokus kepada masalah internasional, dan sangat jarang sekali yang membahas tentang domestik politik serta institusinya. Domestik politik akan sangat relevan untuk dibahas karena pemimpin Korea Utara selalu mengisolasi tekanan politik internal serta semua permasalahan tentang Korea Utara lebih banyak kepada masalah internal (Pinkston., 2003, p. 1).

Dalam sistem kekuasaan tunggal, ketidakadaan pemimpin tertinggi mengakibatkan kekacauan sistem itu dan membawa krisis rezim. Konflik di antara kekuatan politik setelah kematian diktator di negara komunis merupakan contoh baik. Terkait kondisi Korea Utara, kematian Kim Il-sung bisa menjadi ancaman serius pada rejim penguasa pada waktu itu. Tetapi Korea Utara sudah lama mempersiapkannya, baik sebelum maupun setelah kematian Kim Il-sung melalui pekerjaan menkokohkan sistem kekuasaan dengan

warisan sehingga dapat menghindari krisis itu secara stabil. Saat Pemilihan Kim Jong-il sebagai Sekretaris Umum Partai Buruh pada 8 Oktober 1997, merupakan waktu transisi dari periode kekuasaan oleh warisan ayahnya ke era Kim Jong-il secara nyata. Dengan momentum itu, Kim Jong Il tampil secara resmi untuk pertama kali di publik sebagai pemimpin. (KBS, 2013)

Pertemuan ke-10 Sidang Rakyat Tertinggi diadakan setahun kemudian, pada 5 September 1998. Karena konferensi tidak diadakan setelah kematian Kim Il-sung, maka secara wajar hal itu bermakna bahwa era baru sudah mulai. Lebih jauh, pertemuan Sidang Rakyat Tertinggi memilih kembali Kim Jong-il sebagai ketua Komite Pertahanan Nasional, dan merevisi kembali Konstitusi baru. Kendatipun tidak ada upacara pelantikan, namun Kim Jong-il menjadi penguasa de facto Korea Utara. (KBS, 2013)

Konstitusi baru tahun 1998 diberi nama “Konstitusi Kim Il-sung”. Pengawal Konstitusi menyebut Kim Il-sung sebagai “pemimpin tertinggi selamanya di Korea Utara” dan menekankan bahwa “negara akan mempertahankan dan menyelesaikan amanat dan pikiran Kim il-sung, sampai mencapai “revolusi Juche “. (KBS, 2013)

Ungkapan itu mengkokohkan wewenang dan hak kekuasaan anaknya Kim Jong-il karena Konstitusi baru melarang seseorang menjadi pemimpin tertinggi selain Kim Il-sung, artinya Korea Utara secara nyata tidak memiliki presiden negara setelah Kim Il-sung meninggal. Kekuatan mantan presiden (Kim Il-sung) dibagi dan didistribusi kepada Komite Partai Buruh permanen, Komisi Pertahanan Nasional dan kabinet. Menurut susunannya, anggota senior di dalam Sidang Rakyat Tertinggi merupakan badan politik tertinggi, maka ketua badan itu mewakili Korea Utara sebagai pemimpin. Tetapi, sebenarnya, Komisi Pertahanan Nasional, yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada badan politik lain itu, merupakan badan kekuatan politik paling tinggi secara nyata. Oleh karena itu, ketua Komisi Pertahanan Nasional sebenarnya adalah pemimpin tertinggi de facto di Korea Utara. (KBS, 2013)

Dalam perjalanan kepemimpinannya, Kim Jong Il mulai berlahan menutup Korea Utara dari aktifitas kerjasama internasional. Hal ini menyebabkan kemunduran di sektor ekonomi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Korea Utara sendiri, selain itu pengembangan militer besar-besaran juga menyebabkan pengalihan anggaran ekonomi dan kesejahteraan rakyat berpindah

ke sektor militer. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan ketidak stabilan politik di Korea Utara:

### **1. Melemahnya Ekonomi Korea Utara**

Komando ekonomi sosialis Korea Utara pada dasarnya tidak berubah dalam struktur dan penekanannya. Masih menekankan pada sektor pertanian dan industri berat, termasuk produksi senjata, serta pengeluaran terbanyak masih pada barang-barang konsumsi. Sebagai Negara yang kaya raya, Korea Utara pernah kekurangan bahan bakar (minyak) dan tenaga listrik antara tahun 1991 dan 1995, terutama di sektor sipil. Semua itu berdampak negative terhadap semua sektor yang mengakibatkan pabrik berhenti berproduksi, barang-barang ekspor lebih sedikit, dan mata uang semakin melemah sehingga sulit untuk membeli makanan, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya. Pengiriman minyak Korea Utara kemudian mengalami penurunan hingga lebih dari 50 persen dari tahun ke tahun dan konsumsi puncak yaitu diakhir 1980-an. Selama tahun 1995, pabrik Korea Utara dilaporkan dioperasikan kurang dari 50 persen dari kapasitas. 1994 diperkirakan produk nasional bruto adalah antara \$ 20 miliar sampai dengan \$ 21 miliar, dan pendapatan perkapita sebesar \$ 925 (Agency, *Increasing Internal Pressures*, 2015).

Dalam keadaan ekonomi yang sekarat, Korea Utara masih saja mengembangkan kekuatan militernya hal ini bisa dilihat dari prioritas penerimaan sumber daya internal. Kekurangan pasokan energi karena menurunnya efisiensi pembangkit listrik tenaga air juga menjadi masalah yang membayangi Korea Utara, hal ini menyebabkan pada tahun 1995 jumlah pemadaman listrik semakin meningkat. Efisiensi kurang dari 30 persen yang berarti bahwa Korea Utara kehilangan lebih dari produksi listrik yang melalui inefisiensi sistemnya daripada penggunaannya (Snyder, 2001, p. 526).

Situasi ekonomi yang semakin melemah tidak menghalangi Korea Utara untuk lebih meningkatkan kekuatan militernya dengan 1 juta prajurit, 60 ribu angkatan laut, 500 kapal perang, 80 ribu angkatan udara, dan 800 pesawat tempur. publikasi ini bukan hanya ditujukan untuk mencari perhatian dunia internasional tetapi juga sebagai pertahanan dalam negeri dengan mengandalkan pilihan menyerang. Serangan yang dilakukan Korea Utara tidak dapat diprediksi, dispekulasi, atau menduga kesuksesan atas serangan tersebut (Agency, 2013).

Selain itu, ekonomi Korea Utara tergantung pada bentuk yang paling mendasar dari transaksi, termasuk perdagangan barter, dengan kapasitas kecil atau kemampuan untuk mengambil keuntungan dari mekanisme pembiayaan atau normal perbankan (ini mungkin karena sebagian untuk Embargo AS) atau efisiensi lain yang datang dengan ekonomi infrastruktur modern. Kesulitan ekonomi Korea Utara ini menimbulkan banyak masalah yang mungkin memiliki efek tidak langsung pada politik Korea Utara. Sampai-sampai kesulitan ekonomi ini memaksa pimpinan Korea Utara semakin sulit mempertimbangkan bagaimana mendapatkan sumber daya yang diperlukan guna menjaga kelangsungan hidup negaranya karena dengan sumber daya yang terbatas ini juga telah menimbulkan konflik antar kelompok di dalam internal Korea Utara.

## **2. Perdagangan Luar Negeri**

Perdagangan luar negeri memainkan peran penting dalam perekonomian Korea Utara meskipun filsafat Pyongyang adalah kemandirian (*self-reliance*). Korea Utara sangat bergantung pada impor untuk beberapa kebutuhan penting seperti minyak mentah, batubara kokas, dan makanan. Pyongyang menempatkan prioritas tinggi untuk mendapatkan mata uang asing dengan tujuan membeli kebutuhan impor. Ekspor utama Korea Utara tetap senjata militer, mineral, bahan kimia, dan produk *metalurgi* (hasil proses rekayasa mineral dan logam). ([www.fas.org](http://www.fas.org), [www.fas.org](http://www.fas.org), 2013)

Pyongyang menyadari bahwa ia harus memanfaatkan pasar dunia untuk memenuhi kebutuhan disaat krisis ekonomi. Namun hal ini akan memerlukan pembenahan industri dan memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas barang, tanggung jawab keuangan, dan jaminan produk sehingga ekspor dapat menarik devisa. Pemimpin Korea Utara tampaknya takut bahwa bantuan asing yang cukup besar untuk mengatasi krisis ekonomi malah bisa melemahkan pemerintah. Oleh karena itu, Najin-Sonbong daerah Perdagangan Bebas baru dibangun sebagai daerah keamanan tinggi ([www.fas.org](http://www.fas.org), [www.fas.org](http://www.fas.org), 2013).

Sampai tahun 1990, setengah dari perdagangan Korea Utara telah dilakukan dengan Uni Soviet, Cina, dan Eropa Timur. Dengan pecahnya dunia komunis dan penekanan baru pada ekonomi pasar, perdagangan luar negeri Pyongyang pada tahun 1994 anjlok ke level terendah sejak tahun 1978. Ekspor ke China yang notabene sebagaia mitra dagang utama Pyongyang, jatuh bersama dengan impor Korea Utara dari barang-barang Cina. Ekspor ke Jepang di

sisi lain meningkat 20 persen sementara impor turun 18 persen. Perdagangan dengan Korea Selatan terus meningkat sejak tahun 1988 meski hubungan politik dingin dan perdagangan menyumbang lebih dari 95 persen pendapatan Korea Utara (www.fas.org, www.fas.org, 2013).

Cina tetap mempertahankan pasokan minyak ke Korea Utara dari sekitar satu juta ton per-tahun. Selain itu, Korea Utara bergantung pada 500.000 ton bahan bakar minyak berat dari KEDO. Fungsi inti dari ekonomi militer sendiri dapat dipertahankan tanpa harus terus ketergantungan pada input eksternal sebagai kendaraan untuk merangsang kegiatan ekonomi dalam negeri (Snyder, 2001, pp. 527-528).

### **3. Situasi Pangan dan Arus Pengungsi**

Masalah kekurangan pangan dan kelaparan yang melanda Korea Utara akan menyebabkan negara itu ketergantungan terhadap bantuan dunia internasional. Kelaparan ini juga bisa menjelaskan bahwa kebijakan pertanian dan kemampuan distribusi tidak bisa memenuhi kebutuhan warganya. Selain itu, kelaparan ini juga menunjukkan bahwa struktur sosial Korea Utara masih mempertahankan karakteristik feodal dan tidak benar-benar menjadi masyarakat sosialis (Snyder, 2001, p. 528).

Stagnasi dan pembatasan sistem ekonomi Korea Utara merupakan masalah serius bahkan sebelum kematian Kim Il-sung. Apalagi, ambruknya Uni Soviet dan negara komunis Eropa Timur membuat Korea Utara terisolasi dalam segi politik dan ekonomi. Kematian Kim Il-sung dan ketidakpastian politik juga menyebabkan krisis secara keseluruhan di masyarakat Korea Utara. Pada waktu itu, masalah paling serius di Korea Utara adalah kekurangan pangan. Banyak penduduk Korea Utara mati akibat kelaparan, dan hal itu memaksa Korea Utara meminta bantuan kepada masyarakat internasional (KBS, 2013).

Sebuah situasi pangan yang memburuk di musim semi tahun 1995 memaksa Pyongyang meminta bantuan beras, pinjaman, atau penjualan dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Laporan meningkatnya gizi buruk menimbulkan menurunnya tingkat produksi barang sehingga tidak sesuai dengan nilai pesanan. Departemen Pangan Korea Utara mengakui bahwa Pyongyang mengalami kekurangan pangan yang sangat parah. Bahkan dengan bantuan beras dari Seoul dan Tokyo, tetap harus

mencari gandum tambahan untuk memenuhi sekitar sepertiga dari total permintaan tahun 1995. Selain itu Korea Utara juga kekurangan uang tunai, kredit, dan perlengkapan pertanian serta menyusutnya lahan pertanian (16,6 persen pada tahun 1990) akibat cuaca yang tidak bisa diprediksi. Tanpa bantuan pangan dari luar negeri maka Korea Utara akan terus mengalami kekurangan pangan yang sangat parah (Agency, 1995).

Walaupun kematian Kim Il-sung itu tersendiri merupakan krisis besar bagi rejim, namun Korea Utara sedang menghadapi masalah yang lebih besar. Apa yang disebut “Parade Kesulitan” yang dimulai pada tahun 1995 adalah “krisis secara keseluruhan yang menimpa masyarakat Korea Utara karena resesi ekonomi”. Parade Kesulitan yang berlanjut selama periode 6 tahun sampai tahun 2000, dapat dikatakan sebagai sejarah perjuangan untuk menjaga rejim Korea Utara (KBS, 2013)

Pada musim gugur 1996 saat krisis pangan mencapai puncaknya, aliran pengungsi dari Korea Utara ke Cina juga mencapai puncaknya serta harga gabah di pasar gelap juga mencapai puncak harga tertinggi. dengan adanya hal ini, pemerintah Korea Utara berusaha mengumpulkan biji-bijian untuk memastikan bahwa distribusi prioritas ke pasukan militer dan kader tingkat tinggi akan terpenuhi. Akibat krisis pangan ini, mulai berkembang rumor pendistribusian pangan pada pihak tertentu (militer dan pemerintah) mengakibatkan kerusuhan merajalela di dalam negeri sehingga momentum kerusuhan ini berimplikasi terhadap melemahnya kontrol publik dan merupakan tantangan serius bagi pemerintah. Laporan dari wilayah utara Korea Utara, akibat krisis pangan ini menimbulkan korban meninggal sebanyak 30 persen dari populasi desa-desa terpencil. (Snyder, 2001, hal. 528-529) Krisis pangan yang secara terus menerus ini pada akhirnya menekan rakyat Korea Utara untuk melakukan pengungsian baik ke negara Cina maupun ke Korea Selatan. Arus pengungsi ini terjadi dalam jumlah yang besar, sehingga mengakibatkan pemerintahan Korea Utara kebingungan dan merasa tertekan. Arus pengungsi secara besar-besaran yang terjadi ini secara tidak langsung mengancam keberlangsungan rezim Kim, dimana arus pengungsi ini merupakan salah satu pergolakan politik kelas bawah.

Akibat fenomena ini, untuk mempertahankan rezimnya maka pemerintah Korea Utara mengambil dua kebijakan yang berarti yaitu, *pertama*, tanggung jawab untuk menyediakan makanan untuk rakyat Korea Utara telah dibebankan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dan pasar swasta. *Kedua*, pada puncak krisis pangan, pemerintah Korea Utara mengeluarkan kebijakan prioritas penyaluran bahan pangan yaitu kepada pejabat Negara, kader tingkat tinggi dan anggota militer dan yang terakhir baru kepada rakyatnya. (Snyder, 2001, hal. 529)

Kontrol penguasa Korea Utara terhadap masyarakat mereka pada umumnya mulai longgar selama periode “parade kesulitan”. Contoh baiknya adalah eksodus penduduk Korea Utara yang menderita kelaparan. Sebagian besar pengungsi melarikan diri ke Cina gara-gara kelaparan, ada banyak diantara mereka yang menuju ke Korea Selatan. Mereka yang biasanya disebut “pengungsi karena alasan ekonomi” menjadi isu HAM di masyarakat internasional. Walaupun skalanya tidak sebanyak jumlah pengungsi yang melarikan diri dari negara komunis saat Eropa Timur ambruk, jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara terus meningkat (KBS, 2013).

## **B. Penguatan Rezim Berkuasa**

Didalam kehancuran ekonomi, rezim Kim Jong Il mengalokasikan kebijakannya lebih kepada militer daripada ekonomi, meskipun negaranya menjadi Negara yang gagal (*failed state*) tetapi Korea Utara tetap melindungi hak hidup bagi setiap warganya (Institute, 2012).

Meskipun Pyongyang dalam kepemimpinan Kim Jong Il mulai kehilangan dukungan politik dan ekonomi dari sekutu terdekatnya, nyatanya rezim Pyongyang masih terus ingin mempertahankan tahta kekuasaannya. Menurut Scott Snyder dalam bukunya yang berjudul *North Korea's Challenge of Regime Survival: Internal Problems and Implications for the Future*, ada beberapa faktor yang paling relevan sebagai strategi utama Kim Jong Il dalam rangka mempertahankan rezimnya. Antara lain, *pertama*, Kepemimpinan dan pemikiran Kim Il Sung merupakan warisan terbesar dari Korea Utara, sehingga hal ini dimanfaatkan Kim Jong Il sebagai pembenaran kepemimpinannya. Dengan melakukan propaganda yang luas bahkan sampai merumuskan kalender Korea Utara disamakan dengan ulang tahun Kim Il Sung merupakan pilar penting dalam memanipulasi warisan ayahnya dan membangun kepercayaan rakyat Korea Utara sendiri sehingga bisa menetralsir lebih luas ekspresi dari perbedaan pendapat politik dan kritik dari internal. *Kedua*, Konteks sejarah yang kelim dengan Korea Selatan dan persaingan abadi dalam segala bidang merupakan salah satu motivasi Kim Jong Il untuk

terus mempertahankan rezimnya meskipun Kim Jong Il tahu kalau keterpurukan di sektor ekonomi tidak bisa mereka atasi sehingga menjadikan Korea Utara ketergantungan terhadap bantuan asing. *Ketiga*, pengaruh sejarah tradisional Korea Utara telah menciptakan struktur organisasi dan pemerintahannya yang bersifat “feodalistik” dan penggunaan mobilisasi politik terbukti sangat efektif dalam menjaga keamanan internal (Snyder, 2001, pp. 518-520).

Ketiga faktor yang disebutkan oleh Scoot Snyder merupakan implementasi dari kekuatan dan strategi yang dibuat oleh Kim Jong Il yang orientasinya lebih condong kepada permainan nilai historis, ideologis dan nasionalisme yang melekat pada setiap diri rakyat Korea Utara serta digunakan oleh Kim Jong Il untuk menjaga kekuatan rezimnya.

Sedangkan menurut Jae-Cheon Lim, ada empat sebab kenapa rezim Kim Jong Il terpuruk tetapi tetap *survive*, *pertama*, kepemimpinan/pemerintahan Korea Utara selalu stabil yaitu dengan artian meskipun terjadi suatu hambatan isolasi namun Partai terbesar di Korea Utara yaitu partai buruh dan militer sangat loyal terhadap Kim dan pemerintahannya. *Kedua*, Kim telah banyak memberikan tekanan kepada partai politik, polisi ataupun publik figure untuk menjaga agar tidak ada upa pemberontakan dari pihak-pihak dalam Negara (internal Negara). *Ketiga*, doktrinasi dari ideologi telah membuat rezim Kim tetap survive di tengah kehancuran ekonomi. Tetapi pada perkembangannya, kontak dengan informasi dari dunia luar juga mengubah orientasi ideologi rakyatnya sehingga penjagaan stabilitas rezim dengan doktrinasi ideologi juga ikut melemah. *Keempat*, situasi geopolitik menjaga rezim tetap stabil, hal ini terkait dengan pembelotan rakyat Korea Utara ke China yang masih merupakan sekutunya. Pemilihan China oleh para pembelot karena jalur ke Korea Selatan masih dijaga ketat oleh militer dan terdapat banyak ranjau darat (Lim, 2009, pp. 129-130). Keempat faktor yang coba dijelaskan oleh Jae-Cheon Lim ini adalah sarana atau cara-cara yang dipakai oleh Kim Jong Il untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan didalam internal Korea Utara. Penjagaan stabilitas internal negara sangat penting karena pergolakan internal (baik rakyat maupun partai politik) merupakan ancaman terbesar bagi rezim berkuasa dan awal dari kehancurannya.

Selain faktor stabilitas, tujuan Kim untuk mempertahankan rezimnya yaitu untuk melestarikan rezimnya dan menjamin suksesi politik pada generasi berikutnya. Untuk menjaga kelangsungan hidup rezimnya maka Kim mengadopsi strategi politik domestik dan

internasional. Salah satu strategi tersebut adalah untuk memobilisasi pasukan militer untuk meminimalisir risiko dari kebijakan *military first*. (Lim, 2009, p. 130)

Kalau dilihat, kebijakan *military first* Kim Jong Il akan sama dengan kebijakan prioritas militer Kim Il Sung, tetapi pada sesungguhnya keduanya sangat berbeda. Aspek politik yang menggunakan kekuatan militer yang tidak dapat diduga, mempermainkan peraturan pemerintah di dalam perpolitikan Korea Utara, dan menjadi kekuatan militer yang revolusioner adalah pembeda antara keduanya. Dengan kata lain, *military first* ini membawa rezim Kim selalu beradaptasi dengan situasi sosio-politik baik di wilayah domestik maupun internasional (Lim, 2009, pp. 150-151).

Ada empat faktor yang bisa menjelaskan tindakan provokatif Korea Utara melalui uji coba nuklir. *Pertama*, kelangsungan hidup rezim Kim Jong Il adalah prioritas utama. *Kedua*, uji coba nuklir Korea Utara dipandang sebagai sarana tawar-menawar untuk memperkuat posisi negosiasi dengan Amerika. Dengan melakukan uji coba nuklir, Korea Utara berharap bisa menekan Washington untuk menerima pembicaraan bilateral dalam rangka untuk menemukan cara untuk mencabut sanksi keuangan terhadap Korea Utara. *Ketiga*, motif ekonomi Korea Utara juga mendorong keputusannya untuk mengembangkan nuklir sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan rudal, teknologi nuklir, dan bahan nuklir. *Keempat*, DPRK ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negaranya mempunyai nilai tawar sehingga Negara lain tidak meremehkannya lagi (Joo & Kwak, 2007, pp. 29-30).

Disaat semua peneliti fokus terhadap perubahan rezim dan keluarga Kim Jong Il, Ken E. Gause ingin melihat dari analisis intelejen dan pengamat Korea Utara bahwa mungkin saja dengan militer yang kuat maka Kim bisa memenangkan pertempuran ini. Mereka melihat perubahan yang sedang terjadi soal hubungan antara partai dan militer, sebagian besar berasal dari tiga faktor, *pertama*, Kim harus bergantung pada militer daripada partai dan kabinet untuk menjaga stabilitas internal pada saat Korea Utara menderita kekurangan sumber daya diperlukan untuk pengelolaan partai dan negara. *Kedua*, sanksi internasional terhadap Korea Utara telah menciptakan rasa tidak aman terhadap rezim sehingga terpaksa harus meningkatkan status militer. *Ketiga*, hanya militer bisa berfungsi sebagai mesin penghasil sumberdaya untuk melaksanakan program ekonomi pada saat negara hampir tidak

bisa memobilisasi angkatan kerja dan kurangnya anggaran negara (Gause, 2011, pp. 91-92).

Hal diatas diperkuat dengan pernyataan dari mantan mata-mata Korea Utara (Kim Hyun-hee) yang tertangkap di Korea Selatan. Kim mengungkapkan bahwa program nuklir Korea Utara adalah sebagai alat tawar-menawar guna mendapatkan bantuan dan untuk membuat agar publik selalu mendukung rezim yang berkuasa. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa Korea Utara bukan sebuah negara, tetapi sebuah sekte. Korea Utara menggunakan program nuklirnya untuk membuat rakyatnya tetap dalam antrean dan mendorong Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan konsesi (Kompas, 2013).

Kim pertama kali “dipilih” untuk menjadi mata-mata oleh para pejabat partai yang muncul dalam sebuah sedan hitam di sekolahnya, mereka mengatakan padanya untuk berkemas dan hanya memberi kesempatan satu malam bersama keluarganya sebelum ia diberi nama baru dan dibawa ke sebuah sekolah mata-mata di gunung untuk dilatih dalam seni bela diri, senjata, dan bahasa. Bahkan dia juga tidak diijinkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Di Korea Utara, diajarkan bahwa (pendiri) pemimpin kami Kim Il-sung adalah dewa, rakyat diajarkan untuk mengutamakan dia ketimbang orang tua sendiri. Rakyat belajar sejak usia dini untuk mengatakan “Terima kasih, Pemimpin Besar” untuk semuanya (Kompas, 2013).

Dalam upayanya untuk tetap mempertahankan rezimnya, beberapa langkah dilakukan Kim Jong Il mulai dari pengaturan kebijakan Nasional, membangun kembali sektor ekonomi serta menjaga stabilitas struktur nasional agar tetap mendukung dia. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Kim Jong Il adalah sebagai berikut:

## **1. Menentukan Arah dan Tujuan Kebijakan Nasional**

Pada tahun 1994 setelah kematiannya, Kim Il Sung menyerahkan putuck pimpinan kekuasaan Negara Kore Utara kepada anaknya Kim Jong Il. Tentu saja amanah yang disematkan kepada Kim Jong Il sangat berat karena dihadapkan keapada isu krisis kebijakan nasional, dan termasuk menyeimbangkan perbaikan ekonomi terhadap permintaan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional ([www.fas.org](http://www.fas.org), [www.fas.org](http://www.fas.org), 2013).

Setelah pergantian pemimpin, Korea Utara segera merilis

kebijakan baru untuk melindungi sistem sosialis yang dianut dari pengaruh asing yang bisa mengakibatkan keruntuhan rezim pada akhirnya. Kim Jong Il tampaknya tidak mau melakukan reformasi yang seharusnya lebih dibutuhkan negeri ini yaitu mengatasi masalah-masalah politik, ekonomi, dan masalah sosial dan membuka Korea Utara terhadap dunia luar. Partai Buruh Korea (KWP) telah melakukan kampanye secara luas dengan memberikan doktrin-doktrin politik yaitu dengan tujuan sebagai upaya untuk memperketat pengawasan politik dan sosial dan menghindarkan dari para anti-sosialis sehingga terjagalalah keamanan rezim yang berkuasa ([www.fas.org](http://www.fas.org), [www.fas.org](http://www.fas.org), 2013).

Untuk mendukung tujuan nasional dan pembangunan Negara dari pengalaman perang Korea, Pyongyang memfokuskan upaya nasional pada pengembangan kekuatan militer modern yang kuat, tentara Korea Utara dirancang untuk melindungi sosialisme, membela Korea Utara, dan mempertahankan serta secepatnya menyatukan semenanjung Korea. Angkatan bersenjata telah berevolusi menjadi kekuatan darat yang kuat yang didukung oleh pasukan operasi khusus yang luas dan angkatan laut dan udara yang terbatas (Agency, Military Forces, 2013).

## **2. Pembangunan Ekonomi**

Saat pemerintahan Kim Jong Il, Ekonomi Korea Utara sangat tertatih-tatih oleh beban berat tentang pertahanan negara, dengan produktivitas rendah, kurangnya keahlian manajerial, dan ketidakmampuan untuk membayar utang internasional. Kinerja ekonomi berbalik dari tahun 1989 dan terus menurun dalam resesi karena penurunan meskipun masih dalam dukungan dari China, bekas Uni Soviet, dan negara-negara blok sosialis di Eropa Timur. Kelangkaan minyak mentah, makanan, bahan baku, dan tenaga listrik terus mengganggu produktivitas industri serta kualitas hidup para penduduk ([www.fas.org](http://www.fas.org), [www.fas.org](http://www.fas.org), 2013).

Dengan pembangunan organisasi berbasis militer, Kim Jong Il berhasil membuat aturan yang melemahkan rakyatnya dalam hal ekonomi. Pada Oktober 1995 dan sebelum perayaan hari berdirinya Partai Buruh, Kim telah mempromosikan 20 jenderal dimana strategi itu untuk memperlancar Kim melakukan politik *military first* (Lim, 2009, p. 154). Dengan begini tidak ada satu anggota pemerintah maupun rakyatnya yang berani menentang semua kebijakan yang diambil oleh Kim, karena puncak tertinggi pemerintahan ada ditangan militer dan dikontrol sepenuhnya oleh Kim Jong Il.

Realitas baru sejak 1990-an telah memperlihatkan dua jalur ekonomi yang dijalankan Korea Utara, yaitu *pertama*, pasokan bahan baku dan sumber daya yang ada diprioritaskan untuk pihak militer dan para pemimpin dan petinggi Negara. *Kedua*, untuk peningkatan ekonomi sipil hanya mengandalkan dari bantuan luar negeri (French, 2007, p. 103). Yang menjadi sumber kekuatan Korea Utara saat ini hanya bantuan ekonomi guna menjaga keberlangsungan hidup rezimnya. Bantuan ekonomi ini telah membuat Korea Utara menjadi ketergantungan, sedangkan desakan dari wilayah domestik cukup menguras sumber daya dan bertindak sebagai kekuatan kontraproduktif. (French, 2007, p. 107)

### **3. Pembatasan Hak Rakyat dan Isolasi terhadap dunia internasional**

Kim Jong-il memilih cara yang dapat menguatkan landasan kekuatan politiknya secara bertahap, dengan penancangan kekuasaan ayahnya Kim Il-sung, sehingga menghindari beban politik melalui pewarisan, tanggungjawab tentang kesulitan ekonomi dan isolasi negaranya di masyarakat internasional (KBS, 2013). Rakyat Korea Utara tidak pernah mendapatkan kebebasan bepergian (*traveling*) atau berpindah tempat serta tidak juga diberi kebebasan untuk berbicara. Negara sosialis seperti Korea Utara menggunakan legitimasi sebagai pertahanan dari sistem politiknya. (Institute, 2012, p. 14)

Hal ini akan membuat Korea Utara menjadi negara yang terisolasi dari dunia luar bahkan untuk warga negaranya sendiri. Pembatasan akses ini tidak hanya meliputi akses transportasi baik darat, laut maupun udara tetapi juga terjadi pembatasan informasi dari luar yang meliputi televisi, akses internet maupun media cetak.

Di Korea Utara akses internet sangat terbatas karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup tentang akses internet. Pada dasarnya layanan internet disediakan dan dikendalikan oleh Negara, sedangkan secara fisik akses internet di Korea Utara datang melalui China. 1 Juta penduduk Korea Utara memiliki handphone tetapi tanpa akses internet, kecuali warga yang bertempat tinggal di perbatasan antara Korea Utara dan China. Mereka mengakses internet Negara China secara ilegal (Choney, 2013).

### **4. Mobilisasi Internal**

Dalam mempertahankan stabilitas politik internal sebuah negara maka perlu diakannya kontrol penuh terhadap semua

aspek yang menjadi ancaman bagi stabilitas itu sendiri. Sitem/ instrumen pemerintah yang diunakan oleh Kim Jong Il dalam rangka mengontrol stabilitas internal Korea Utara antara lain:

#### **a. Menjaga Kendali Atas Sistem Pemerintahan**

Atas Sepeninggalan Kim Il sung, sistem pemerintahan di Korea Utara tidak berubah dan masih terdiri dari Majelis Agung Rakyat dan Presiden. Kim Jong Il selain menjadi Presiden juga berkapasitas sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Korea (KPA) dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional, bertindak sebagai “pemimpin tertinggi” negara, mengendalikan partai, pemerintah, dan angkatan bersenjata. Tetapi Kim Jong Il belum bisa dikatakan telah menduduki dua posisi penting di Korea Utara yaitu sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea (KWP). ([www.fas.org](http://www.fas.org), [www.fas.org](http://www.fas.org), 2013)

Setelah kematian ayahnya, Kim Jong il menjadi pemimpin tertinggi dari Partai Buruh Korea (1997). Jika dibandingkan dengan masa Kim Il Sung, Kim Jong Il tidak membuat partai ini menjadi independent lagi dan bisa dikatakan lebih buruk dari saat dipimpin Kim Il Sung. Selain itu, setiap kebijakan yang dibuat sarat dengan monopoli dan jauh dari kata independent (Lim, 2009, pp. 152-153).

#### **b. Penanaman Ideologi**

Bagi sebuah rezim, penanaman ideologi dan pengkultusan kepribadian merupakan suatu hal yang perlu control ketat. Korea Utara menanamkan ideologi Juche dan pengkultusan Kim Il Sung sejak dibangku sekolah, sehingga dengan demikian keutuhan rezim akan tetap terjaga (Lind, 2010, p. 54).

Memahami kekuatan rezim Kim membutuhkan pemahaman tentang alat-alat yang telah digunakan untuk memperkuat rezimnya. *Pertama*, rekayasa sosial yaitu dimana blok bangunan yang dibangun oleh rezim Kim yang menghilangkan kelompok oposisi di dalam Negara, sehingga didalam Negara tidak ada tidak ada kelas sosial, serikat independen, bahkan sejak masih menjadi pelajar para warga sudah dididik dan dibentuk untuk menjadi pro Negara. *Kedua*, yaitu dorongan untuk menganut ideologi Juche pada kepemimpinan Kim Il Sung. Ideologi ini akan mendorong rakyatnya untuk mengkultuskan Kim Il Sung serta mendorong jiwa nasionalisme dan anti jepang, Korea Utara serta Amerika. Tapi pada tahun 1990-an disaat Korea

Utara dilanda kelaparan, control rezim ini semakin menurun dan bangkit kembali saat kepemimpinan Kim Jong Il (Lind, 2010, p. 54).

Pyongyang berusaha untuk membatasi informasi asing yang masuk ke negaranya dengan tujuan agar rakyat tidak terpengaruh oleh informasi dari luar dan tetap mendukung rezim. Salah satu cara untuk membatasi akses informasi rakyatnya adalah dengan cara semua stasiun televise dan radio dikelola oleh pemerintah, kalau ada warga yang diketahui menggunakan radio untuk mengakses stasiun asing maka akan dihukum berat. Korea Utara hamper tidak memiliki akses internet, kecuali beberapa elit dan penggunaannya itupun diawasi secara ketat.

Kebijakan *military first politics* pada masa Kim Il Sung telah diubah bentuk oleh Kim Jong Il dengan *military first (son'gun)* yang tetap dibawah ideologi Juche. Keunikan dari kebijakn *military first* ini adalah "*military-first-worker-second*" atau bisa dibilang lebih mengutamakan militer daripada pembangunan pekerja/ekonomi. Istilah *military first* meliputi "semangat revolusi militer", "bullet bomb", "*chap'ok chongsin* (semangat pemboman bunuh diri) untuk pemimpin", "revolusi keluarga militer", dan "*il tang Paek*" (satu untuk seratus atau bisa diartikan satu prajurit untuk seratus musuh). Selain itu, selama periode ini, artis Korea Utara telah menghasilkan berbagai film, drama, lagu, novel, dan puisi berkaitan dengan militer atau kebersamaan antara militer dan rakyat. Konsep *military first* menyiratkan bahwa kebijakan ini tidak hanya taktis, tapi dia bertekad untuk menyiapkan strategi untuk pemegang kekuasaan selanjutnya (penggantinya). (Lim, 2009, pp. 153-155)

### **c. Menguasai Organisasi dan Partai Politik**

Kelebihan dari sistem pemerintahan Korea Utara adalah pemerintah berhasil mengontrol penuh kalangan elit pemerintahan dan Partai Buruh (KWP) berusaha mereduksi setiap pergerakan dari bawah yang dirasa mengancam pemerintahan/ rezim. Hasilnya adalah kestabilan system pemerintahan akan tetap terjaga dan menjauhkan dari ancaman kehancuran rezim. Sistem politik yang dipakai adalah tipe Top-Down, dimana semua perintah langsung dari Kim Jong Il sebagai pimpinan tertinggi di Korea Utara (Pinkston., 2003, p. 4).

Partai Buruh Korea (KWP) sangat terpusat untuk terus membuat kebijakan, menjalankan pemerintah dan mengelola kebijakan tersebut. Seperti tersirat dalam Konstitusi, KWP dan negara tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi partai superior di Korea Utara. Pejabat Partai menduduki semua posisi penting dalam pemerintahan, ekonomi, dan militer. Kongres partai adalah organisasi musyawarah tertinggi, sehingga perlu dijadwalkan setiap 5 tahun sekali. Namun, hanya enam Kongres Partai yang telah berhasil diselenggarakan dalam 50 tahun terakhir, dan tidak ada dalam 15 tahun terakhir (Agency, Defense Intelligence Agency, 1995).

#### **d. Menguasai Organisasi Militer**

Meskipun terus mencoba untuk mengisolasi Korea Selatan secara politik dan membayangi dalam bidang ekonomi, Pyongyang yakin bantuan politik, ekonomi, dan militer dan kerja sama antara Republik Korea dan Amerika Serikat secara signifikan menghambat tujuannya. Meskipun telah berusaha memilih jalur militer dan bantuan ekonomi dari Negara tetangga (Soviet dan Cina), Korea Utara mencoba untuk membangun ekonomi dan militer dengan sumber daya sendiri untuk membatasi pengaruh luar. Dengan membuat kebutuhan militer prioritas pertama Korea Utara dengan sumber daya yang tersedia, ternyata mampu membangun pasukan militer yang kuat (www.fas.org, www.fas.org, 2013)

Perwira tinggi militer banyak yang berjuang dengan Kim melawan Jepang dan selama konflik Korea, memegang posisi kunci di seluruh partai dan pemerintah. Mereka mengawasi semua militer dan mendukung program sipil. Korea Utara tergantung pada angkatan bersenjata untuk melaksanakan kebijakan nasional dan memberikan mereka prioritas utama bagi setiap personel, perlengkapan, dan sumber daya. Prioritas militer ini menyebabkan gangguan kronis dan kekurangan di sektor sipil karena sangat merendahkan standar hidup masyarakat di Korea Utara. Kelangkaan sumber daya ini membuat Korea Utara sebagian besar harus membuat peralatan militernya sendiri meskipun harus tetap mengimpor beberapa senjata modern dan peralatan elektronik (www.fas.org, www.fas.org, 2013)

Pada inti dari struktur militer Korea Utara adalah Departemen Angkatan Bersenjata, yang bertanggung jawab

untuk mengawasi militer. Sejak tahun 1991, pimpinan KPA telah mengalami perubahan organisasi dan personil yang signifikan, sejumlah tokoh-tokoh kunci telah meninggal akibat usia tua , dan ratusan pejabat umum mempromosikan Kim Jong Il sebagai Panglima Tertinggi. Penunjukan Kim Jong Il sebagai Panglima Tertinggi pada Desember 1991 mungkin telah menjadi katalis bagi perubahan dalam KPA, tapi langkah-langkah besar baru muncul sejak kematian Kim Il Sung. Ada indikasi bahwa pergeseran generasi dalam kepemimpinan militer sedang berlangsung dari Desember 1991 sampai akhir Mei 1995, promosi dan tugas hampir 800 pejabat umum (usia 50 tahunan) yang dicatat dalam korps perwira umum sekitar 1.200. Pada tanggal 20 April 1992, Kim menjadi marshal dan 3 hari kemudian delapan jenderal dipromosikan menjadi wakil marshal. Setahun kemudian, Kim Jong Il menjadi Ketua Komisi Pertahanan Nasional (Agency, 1995).

Kematian Presiden Kim Il Sung sebagai ketua KWP Komite Urusan Militer pada tahun 1994 dan O Chin-u sebagai wakil ketua Departemen Angkatan Bersenjata Rakyat dibawah Komisi Pertahanan Nasional pada tahun 1995 menciptakan lowongan di level senior yang tidak segera diisi. Pada akhir 1995, Choe Kwang dipromosikan menjadi marshal dengan Yi Ul-sol , dan O Chin-u sebagai penggantinya. (Agency, 2013)

Angkatan bersenjata mempertahankan sistem komando tunggal, Kepala Staf Umum langsung memerintah dan mengendalikan angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan dan Ketua Komisi Pertahanan Bersenjata Rakyat Nasional, Kim Jong Il membawahi keseluruhan dari sistem militer. (Agency, 2013)

Pada perjalanannya, posisi organisasi militer ini bukan hanya untuk mengatasi keamanan nasional maupun ancaman internasional tetapi juga untuk mengontrol pergerakan rakyat. Rezim Korea Utara memang terkenal brutal dan sering menggunakan kekuatan militernya. Didalam negeri, jaringan informan dan badan keamanan dalam negeri akan mencari warga yang membuat pelanggaran baikringan maupun berat. Bagi warga yang berbuat pelanggaran ringan akan mendapatkan pendidikan ulang (*rereducation*), sedangkan yang melakukan pelanggaran berat akan langsung dieksekusi atau dikebumikan di kamp penjara politik. Bahkan yang lebih menakutkan, rezim

tidak hanya menghukum individu pembuat kesalahan tetapi juga akan menghukum seluruh keluarganya (Lind, 2010). Dengan tindakan demikian maka stabilitas nasional akan lebih bisa terjaga/dikendalikan dan meminimalisir terjadinya pemberontakan yang bisa mengakibatkan terancamnya rezim berkuasa.



## BAB IV

# SIKAP OFFENSIVE KOREA UTARA DAN KEUNTUNGAN EKONOMI YANG DIDAPAT

Didalam keterpurukan ekonomi, Korea Utara tidak bisa mengatasinya sendiri hanya dengan mengandalkan sumber daya dalam negeri yang semakin terbatas. Jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah ekonomi ini adalah dengan mengandalkan sumberdaya dari dunia internasional. Adapun cara yang ditempuh untuk mendapatkan sumber daya dari luar tersebut adalah dengan melakukan ekstraksi eksternal yaitu dengan jalan melakukan tindakan offensive.

### A. Sikap Offensive Korea Utara

Diplomasi militer Korea Utara pada masa Kim Jong Il mempunyai enam karakteristik utama yaitu, *pertama*, meskipun kecenderungan fokus kepada tindakan *offensive* berorientasi kepada strategi militernya, penangkalan (*deterrence*) akan memungkinkan kritis aksi militer dan kampanye diplomasi militer. *Kedua*, faktor legal yang secara signifikan mempengaruhi aksi militer Korea Utara. Faktor legal ini berkaitan dengan pembuat kebijakan di dalam Negara Korea Utara yang selalu memprovokasi dan memberikan pengetahuan yang ekstrime terkait dengan isu legal. *Ketiga*, tindakan secara tiba-tiba (*surprise attack*) merupakan suatu hal yang penting didalam aksi militer Korea Utara, dimana tindakan ini akan secara berkala akan menciptakan ketakutan atau terror. *Keempat*, diplomasi militer yang dilakukan Korea Utara tidak lebih karena faktor politik domestik, dimana politik domestik sangat berpengaruh bahkan bisa juga menghilangkan motivasi Korea Utara

untuk melakukan tindakan militer. *Kelima*, anggapan bahwa tindakan militer Korea Utara merupakan wujud dari tantangan terhadap dunia internasional merupakan suatu hal yang salah. *Keenam*, Hasil dari diplomasi militer akan menghasilkan sedikit banyak konsekuensi yang harus diterima Korea Utara baik dari Negara sekitar maupun dunia Internasional. (Michishita, 2010, pp. 2-3).

Kebijakan *military first (Songun)* dari Korea Utara adalah hasil adopsi dari Juche yang mempresentasikan politik domestik dan politik internasional serta menempatkan kekuatan militer dibarisan terdepan dalam Negara tersebut disamping kebijakan ekonomi. Banyak pandangan tentang *military first (Songun)* sebagai ideologi utama Korea utara, pandangan itu cenderung turun hanya menjadi dua kategori umum, yaitu urusan eksternal dan urusan internal. Kedua pandangan ini terinterpretasi menjadi peningkatan kekuatan militer serta politik internal untuk mempertahankan kekuatan rezim (Kim, Roehrig, & Seliger, *The Survival of North Korea: Essays on Strategy, Economics and International Relation*, 2011, pp. 36-35).

Pada tahun 1998, Komisi Pertahanan Nasional (NDC) diangkat menjadi posisi tertinggi di Negara tersebut. Posisi ini memberikan Kim Jong Il dasar untuk melegitimasi kekuasaannya, adapun tiga fungsi militer adalah *pertama*, militer harus hidup dan mati dengan pimpinan sampai akhir. *Kedua*, militer dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan pembiayaan penuh dari Negara. *Ketiga*, bagi semua prajurit suatu kehormatan untuk terus bersama pemimpin dan membela Negara. Kebijakan *military first (Songun)* merumuskan politik dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan pengambilan keputusan di Korea Utara (Kim, Roehrig, & Seliger, *The Survival of North Korea: Essays on Strategy, Economics and International Relation*, 2011, p. 35).

Keluarnya Korea Utara dari NPT karena merasa tidak nyaman dengan sikap AS yang memasukkan Korea Utara sebagai salah satu negara poros setan (*Axis of Evil*) (Fatkurrohan, 2010, p. 47). Hal ini memicu berbagai tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara seperti melakukan uji coba rudal jarak jauh Taepodong-1 yang melewati Jepang pada tahun 1998 (Hendarsah, 2007, p. 120).

Tidak dipungkiri lagi bahwa kekuatan militer, doktrinasi dan kepemilikan senjata nuklir merupakan kekuatan utama dari rezim Kim Jong Il untuk melakukan tindakan offensi-nya baik kepada dunia internasional maupun sebagai senjata utama untuk menjaga kestabilan politik dalam negeri. Ada dua jalan atau strategi yang

diambil oleh Kim Jong Il dalam melaksanakan tindakan offensivenya, yaitu strategi militer dan pengembangan nuklir.

Kekuatan utama dari DPRK adalah dapat memanfaatkan dukungan dari rakyatnya, entah dengan kekuatan indoktrinasi atau perasaan tulus nasionalisme dukungan ini merupakan sumber kekuatan nasional. Tentara DPRK juga diajarkan bahwa hasil dari sebuah perang tidak ditentukan oleh modernisasi senjata dan teknologi militer, tetapi oleh “misi mulia dan semangat revolusi dengan berjuang bagi pembebasan rakyat.” Ini diterjemahkan menjadi kekuatan militer yang mampu mendukung berbagai macam pilihan tempur tanpa mempertimbangkan bahaya atau nilai-nilai moral. Kerentanan dari doktrin militer ini meliputi kelelahan fisik serta keterbatasan jumlah populasi penduduk dari Korea Utara yang berkaitan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan ketidakmampuan mengimbangi Korea Selatan. Kelemahan militer yang paling menentukan dari DPRK yaitu kurangnya alat pengintaian modern, pengawasan, dan sistem target akuisisi (Defense, 1997, pp. 44-43).

Ada 12 doktrin militer yang dikembangkan Korea Utara dengan belajar dari Rusia dan perang Korea, salah satu doktrinnya adalah *surprise attack* yang dicapai dengan membuat serangan tak terduga dalam cara yang tak terduga. Ada beberapa langkah atau strategi yang biasa digunakan oleh Korea Utara, antara lain (Defense, 1997, p. 45):

- a. Mencegah CFC (komando kombinasi serangan) mengambil tindakan yang efektif.
- b. Posisi pasukan bersiap untuk menyerang.
- c. Melakukan OPSEC (pembukaan keamanan dasar) dan penipuan.
- d. Serangan di malam hari dan selama cuaca buruk adalah cara terbaik untuk mencapai kejutan

Struktur kekuatan militer Korea Utara dan doktrin mencerminkan kecenderungan seperti Uni Soviet dan China, namun pengaruh utama adalah dari pengalaman Pyongyang dalam perang Korea, lingkungan konflik semenanjung, dan budaya militer Korea Utara dan filosofi bela diri. Strategi militer Korea Utara terhadap serangan Korea Selatan dan pertahanan cenderung melakukan serangan balik. Pyongyang telah menciptakan masyarakat militer yang damai di dunia saat ini dengan mengalihkan mengalihkan sumber daya investasi dari sektor-sektor produktif ekonomi. Doktrin taktis Tentara Korea Utara selalu menekankan *surprise*

*attack*, mobilitas, dan baju besi yang kuat dari komponen artileri untuk memenuhi kebutuhan tersebut (www.fas.org, 2013) .

Selama awal 1990-an, Korea Utara secara signifikan meningkatkan kemampuan *offensive* melalui kampanye secara intensif selama 5 tahun. Kampanye ini menekankan produksi dan penyimpanan amunisi dan bahan bakar, meningkatkan pelatihan seluruh kekuatan, dan unit artileri baru yang tangkas di dekat DMZ. Kampanye yang dirancang untuk meningkatkan opsi militer Korea Utara diikat dengan tanggal penyelesaian 1995. Meskipun kampanye tampaknya telah berakhir, banyak aspek termasuk perlakuan istimewa militer dan perbaikan dalam pasukan artileri masih dilanjutkan sampai saat ini. (www.fas.org, 2013)

Fakta-fakta tentang kekuatan militer Korea Utara dan semua sikap provokatifnya memperkuat penilaian bahwa strategi militer Pyongyang tidak bersifat *defensive* tapi *offensive*. Sebuah argumen yang kuat akan membuat strategi militer Korea Utara akan tetap bersifat *offensive* meskipun pertahanan yang dilakukan dengan jalan reunifikasi sebagai tujuan utama dari rezim Kim. Budaya militer Korea Utara akan mendukung sikap *offensive*-nya sebagai pertahanan yang paling efektif (Hodge, 2003, p. 74).

Pada saat Presiden Bush mengatakan bahwa Korea Utara adalah “*axis of evil*”, itu merupakan bagian dari strategi militer Amerika. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa peningkatan militer oleh Kim Jong Il dengan tujuan utama adalah untuk memperkuat basis kekuatan politiknya di dalam negeri (Hodge, 2003, p. 69).

Kebijakan militer Korea Utara berfokus kepada menjaga dan mempertahankan kekuatan militer serta melakukan operasi *offensive* kepada Korea Selatan yang gunanya untuk mencapai tujuan reunifikasi semenanjung. Doktrin militer yang dibangun dan kebijakan yang dibuat menentukan struktur angkatan bersenjata DPRK, pengalokasian sumber daya industri dan output, serta penelitian dan pengembangan orientasi untuk mendukung angkatan bersenjata. Sebuah rintangan utama yang dihadapi oleh DPRK dalam mencapai tujuan kekuatannya adalah keterpurukan ekonomi. Meskipun DPRK mendedikasikan kritis sumber daya untuk militer, dengan mengorbankan semua sektor masyarakat lainnya, negara mungkin akan menghadapi keruntuhan ekonomi selama dekade ini. Karena itu, DPRK dapat mencapai titik keputusan, baik untuk menggunakan kekuatan militer atau resiko kehilangan opsi militer. Akibatnya, ada lebih banyak tekanan pada DPRK untuk

menyelesaikan tujuan kekuatannya (Defense, 1997, pp. 42-43).

Sederhananya, strategi militer Korea Utara berasal dari strategi nasional dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan kondisi yang memenuhi kepentingan nasional. Strategi militer mencerminkan kemampuan vis-à-vis lawan potensial, keterbatasan sumber daya, dan akhir negara yang diinginkan. Korea Utara tidak berbeda, strategi militer adalah refleksi tujuan nasional Pyongyang. Strategi militer juga mencerminkan apa yang mungkin disebut “aturan-aturan keterlibatan budaya”, yaitu mereka didasarkan pada pandangan konstruksi sosial yang unik dari sebuah bangsa (Hodge, 2003, p. 68).

Strategi militer Korea Utara bersifat *offensive* dan memang didesain untuk membuat pilihan militer guna menciptakan reunifikasi dengan menggunakan kekuatan *surprise attack*. Karakter sikap *offensive* dari strategi militer Pyongyang adalah dengan menunjukkan pengorganisasian militer yang bagus dan pemerataan kekuatan militer baik dari angkatan udara, darat maupun laut (Hodge, 2003, pp. 72-73). Demonstrasi-demonstrasi secara langsung yang dilakukan oleh Korea Utara sering kali dianggap bersifat provokatif terhadap Negara tetangga baik Korea Selatan maupun Jepang, demonstrasi/unjuk kekuatan militer yang dilakukan Kim Jong Il ini juga merupakan bagian dari sikap *offensive* yang dilakukan oleh Korea Utara. Adapun tindakan *offensive* yang dilakukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 18. Tindakan Offensive Korea Utara Pada Masa Kim Jong Il**

TAHUN	AKSI
1998	Uji Coba rudal jarak jauh Taepodong-1 melewati Jepang
1999	Korea Utara menghentikan uji coba rudal jarak jauh
<b>Era-2000-an</b>	
2002	Korea Utara keluar dari NPT karena merasa tidak nyaman dengan sikap AS yang memasukkan Korea Utara sebagai salah satu negara poros setan (Axis of Evil).

TAHUN	AKSI
2005	Pemerintah Kim Jong Il mengakui telah memiliki senjata nuklir sejak kerangka persetujuan antara Korea Utara dan Amerika tentang yang didesain untuk membekukan dan akhirnya membongkar proyek senjata nuklir Korea Utara, untuk kemudian diganti dengan bantuan untuk memproduksi dua pembangkit tenaga nuklir. Rezim Kim beralasan, proyek rahasia tersebut diperlukan untuk tujuan keamanan.
Juli 2006	Korea Utara uji coba tujuh rudal, termasuk rudal jarak jauh Taepodong-2
04 Juli, 2006	Korea Utara mengujicoba sejumlah rudal, termasuk rudal jarak jauh yang mungkin bisa menjangkau daratan Amerika Serikat, dalam rentang waktu beberapa jam.
05 Juli, 2006	Korea Utara menguji coba setidaknya 6 peluru kendali, termasuk peluru kendali Taepodong-2, di tengah berbagai peringatan dari beberapa negara.
16 Juli, 2006	Korea Utara menolak keras resolusi PBB yang mengutuk uji coba peluru kendali dan akan tetap menyimpan senjata.
19 Juli, 2006	Korea Utara menyatakan akan menghentikan program penyatuan lagi keluarga lintas batas dengan Selatan sebagai balasan atas keputusan Seoul untuk menghentikan pengiriman bantuan makanan.
11 Oktober, 2006	Orang nomor dua paling berkuasa di Korea Utara mengancam bahwa negaranya akan melakukan uji coba nuklir lebih lanjut apabila Amerika Serikat mempertahankan kebijakannya yang “bermusuhan”.
22 Oktober, 2006	Korea Utara akan melakukan uji coba senjata nuklir yang kedua jika “diusik” oleh Amerika Serikat, kata beberapa laporan di media massa Korea Selatan dan Jepang.

TAHUN	AKSI
17 Oktober, 2006	Korea Utara mengatakan sanksi PBB yang dijatuhkan setelah Pyongyang melakukan ujicoba bom nuklir adalah pernyataan perang, kata media pemerintah. Pyongyang juga memperingatkan dengan “tanpa ampun” akan menghantam negara-negara lain yang mengancam kedaulatannya.
25 Mei, 2007	Korea Utara menembakkan beberapa rudal jarak pendek ke arah perairan Laut Jepang, lapor media berita di kawasan.
03 Juli, 2007	Pemimpin Korea Utara Kim Jong il menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian perlucutan nuklir untuk memenuhi janjinya.
19 Juni, 2007	Korea Utara melakukan uji coba peluru kendali jarak pendek ke arah Laut Jepang, menurut sejumlah laporan di kawasan tersebut.
28 Maret, 2008	Korea Utara menembakkan peluru kendali jarak pendek dari pantai barat negara itu sebagai uji coba.
03 April, 2008	Korea Utara mengatakan negara itu akan menghentikan semua dialog dengan Korea Selatan. Pernyataan in merupakan pertanda lain bahwa hubungan antara kedua Korea semakin buruk.
11 September, 2008	Korut membangun situs rudal baru dan dilaporkan hampir merampungkan lokasi peluncuran kedua untuk peluru kendali jarak jauh.
06 Oktober, 2008	Korea Utara membeli senjata senilai \$65 juta dalam lima tahun terakhir ditengah kekurangan pangan, menurut seorang anggota parlemen Korea Selatan.
09 Oktober, 2008	North Korea sedang mempersiapkan diri untuk meluncurkan 10 rudak jarak pendek, sehingga militer Korea Selatan disiagakan.  Menurut laporan media di Korea Selatan, Korea Utara diduga menembakkan sedikitnya satu rudal dua hari lalu.

TAHUN	AKSI
12 November, 2008	<p>Korea Utara akan menutup perbatasan darat dengan Korea Selatan 1 Desember di tengah meningkatnya hubungan kedua negara.</p> <p>Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa tentara Korea Utara telah memberitahu Korea Selatan “untuk dengan tegas membatasi dan memutuskan perjalanan darat melalui Garis Demarkasi Militer.</p> <p>Menurut kantor berita tersebut, keputusan diambil karena adanya “sikap konfrontasi dari Korea Selatan “ yang sudah melewati tahap bahaya.</p>
01 Desember, 2008	<p>Korea Utara mulai menerapkan pengetatan perbatasan dengan Korea Selatan karena hal yang mereka sebut sebagai konfrontasi tak henti-hentinya dari Seoul.</p>
30 Januari, 2009	<p>Korea Utara menyatakan negara itu membatalkan semua kesepakatan militer dan politik dengan Selatan dengan alasan Seoul berniat jahat.</p>
03 Februari, 2009	<p>Korea Utara sepertinya mempersiapkan uji coba peluru kendali jarak jauh yang dapat mencapai Amerika Serikat.</p>
24 Februari, 2009	<p>Korea Utara telah mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran roket yang akan membahwa satelit komunikasi tanpa memberi indikasi tentang tanggalnya..</p>
08 Maret, 2009	<p>Warga Korea Utara memberi suara dalam pemilihan umum parlemen yang menurut para pengamat bisa menjadi petunjuk mengenai suksesi di negara itu.</p>
09 Maret, 2009	<p>Korea Utara mengatakan telah menempatkan militer dalam siaga tempur menjelang latihan militer besar Amerika Serikat dan Korea Selatan.</p>
05 April, 2009	<p>Korea Utara meluncurkan roket, meski ada seruan internasional agar tidak melakukan peluncuran.</p> <p>Roket itu diluncurkan dari kompleks situs peluncuran Musudan-ri di bagian timur laut Korea Utara sekitar pukul 0230 GMT atau 0930 WIB.</p>

TAHUN	AKSI
07 April, 2009	Korea Utara menuduh Korea Selatan meracuni pemain sepakbola mereka dengan mencampuri makanan menjelang pertandingan penyisihan Piala Dunia pekan lalu.
08 April, 2009	Seorang diplomat Korea Utara memperingatkan langkah keras akan menyusul jika PBB memutuskan tindakan atas negara itu setelah meluncurkan satelit.
14 April, 2009	Korea Utara mengatakan akan memboikot pembicaraan soal program nuklir negara itu dalam sebuah protes terhadap kritik PBB yang mengecam peluncuran roket negara itu baru-baru ini.
15 April, 2009	<p>Korea Utara menghentikan kerjasama dengan Inspektur nuklir PBB dan memerintahkan mereka untuk keluar dari negara tersebut, seperti disampaikan oleh Badan Atom Energi Internasional (IAEA).</p> <p>Pyongyang mengatakan kepada IAEA untuk memindahkan segel dan peralatan dari reaktor Yongbyon dan mengatakan akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklir tersebut, seperti disampaikan oleh pengamat PBB.</p> <p>Gedung Putih meminta Pyongyang untuk menghentikan “tindakan provokasi” itu. Rusia dan Cina juga sudah meminta agar langkah itu dipertimbangkan kembali.</p>
29 April, 2009	<p>Korea Utara mengancam akan melakukan ujicoba rudal balistik sebagai tanggapan atas kecaman keras PBB terhadap peluncuran roket negara tersebut awal bulan ini.</p> <p>Departemen Luar Negeri Korea Utara mengemukakan negara komunis itu akan terpaksa melakukan apa yang disebutnya langkah-langkah untuk membela diri kecuali kalau Dewan Keamanan segera meminta maaf.</p>

TAHUN	AKSI
26 Mei, 2009	<p>Media Korea Selatan melaporkan Korea Utara menembakkan dua rudal beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklirnya.</p> <p>Setidaknya tiga uji coba rudal juga dilakukan bersamaan dengan uji coba nuklir pada hari Senin (26/5).</p> <p>Menurut Yonhap peluncuran rudal hari Selasa (27/5) antara lain berupa satu rudal darat ke laut dan satu rudal darat ke udara.</p>
27 Mei, 2009	<p>Korea Utara memperingatkan akan adanya aksi militer setelah Korea Selatan ikut dalam latihan antiproliferasi yang memungkinkan Korea Selatan mengeledah kapal-kapal Korea Utara.</p> <p>Korea Utara mengatakan mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian yang mengakhiri Perang Korea pada 1953.</p>
01 Juni, 2009	<p>Korut dikabarkan telah memindahkan rudal terancangannya ke lokasi peluncuran dan melarang semua kapal laut berlayar di lepas pantai negeri itu.</p> <p>Pemindahan rudal ini dilakukan setelah para pejabat Jepang dan Amerika Serikat menyatakan mereka tidak menerima Korut yang memiliki senjata nuklir.</p>
13 Juni, 2009	<p>Korea Utara mengatakan akan “mempersenjatai” stok plutonium ditengah ancaman aksi militer atas sanksi PBB.</p>
04 Juli, 2009	<p>North Korea melakukan serangkaian uji coba rudal jarak jauh di saat Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaan 4 Juli.</p> <p>Berbagai laporan mengatakan sedikitnya enam rudal balistik tipe Scud diluncurkan, dengan jarak jangkauan mencapai 500 kilometer.</p> <p>Korea Selatan dan Jepang menyebut peluncuran terbaru ini, yang dilakukan menyusul peluncuran sebelumnya dalam beberapa pekan terakhir, sebagai “tindakan provokasi.”</p>

TAHUN	AKSI
26 Agustus, 2009	Korea Utara meluncurkan roket luar angkasa pertama, meskipun satelit ilmu pengetahuan gagal memasuki orbit yang tepat. Pejabat Korea Selatan menggambarkan peluncuran itu sebagai “sukses sebagian”.
04 September, 2009	Korea Utara memasuki tahap final pengayaan uranium. “Tes pengayaan Uranium telah berhasil dilaksanakan dan proses itu dalam tahap penyelesaian,” tulis media pemerintah Korea Utara.
19 Januari 2010	Korea Utara menyatakan tidak akan kembali ke meja perundingan untuk melucuti senjata nuklirnya bila sanksi terhadap negara komunis itu tidak dicabut.
21 Januari 2010	Korea Selatan dan Utara tidak menghasilkan kemajuan berarti setelah perundingan dua hari terkait masa depan kawasan industri gabungan Kaesong.
24 Januari 2010	Korea Utara menyatakan kemarahan atas pernyataan Korea Selatan bahwa negara itu bisa melancarkan serangan pencegahan terhadap berbagai fasilitas nuklir Korea Utara. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-young mengatakan serangan bisa terjadi bila ada tanda-tanda Korea Utara menyiapkan serangan nuklir. Menanggapi pernyataan itu, Korea Utara mengatakan langkah itu dianggap sebagai pernyataan perang, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi negara itu. Kantor berita Korea Utara juga melaporkan negara itu siap melancarkan aksi militer yang cepat dan menentukan bila negara tetangganya benar-benar menyerang.
27 Januari 2010	Aksi baku tembak terjadi di dekat perbatasan laut yang disengketakan Korea Utara dengan Korea Selatan.

TAHUN	AKSI
20 Mei 2010	Korea Utara menuntut untuk melihat bukti menyusul laporan penyelidikan internasional bahwa Pyongyang bertanggung jawab terhadap tenggelamnya kapal perang Korea Selatan bulan Maret lalu. Korea Utara menggambarkan dakwaan itu sebagai hal yang dibuat-buat dan menuntut bukti.
25 Mei 2010	Korea Utara akan memutuskan semua hubungan dengan Korea Selatan. KCNA mengatakan Korut juga akan mengusir para pekerja Korsel dari sebuah pabrik yang dikelola bersama di perbatasan Korea Utara.  Langkah itu diambil setelah sebuah laporan internasional menuding Korea Utara menenggelamkan sebuah kapal perang Korsel.
27 Mei 2010	Korea Utara mengumumkan pihaknya telah menarik diri dari satu kesepakatan yang bertujuan mencegah pertikaian senjata dengan Korea Selatan.
23 Juli 2010	Korea Utara menjanjikan “tanggapan fisik” atas latihan militer bersama Amerika Serikat-Korea Selatan. Jurubicara delegasi Korea Utara dalam forum tersebut mengatakan latihan militer bersama AS-Korsel merupakan contoh dari diplomasi kapal perang pada masa abad 19.
24 Juli 2010	Korea Utara mengancam akan menggunakan “senjata nuklir” sebagai reaksi atas latihan bersama militer Amerika Serikat-Korea Selatan akhir minggu ini.  Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, milik pemerintah Korea Utara mengatakan Pyongyang sudah bersiap melancarkan “perang suci balasan” kapan saja

TAHUN	AKSI
23 November 2010	<p>Korea Selatan mengatakan militer Korea Utara menembakan sekitar 200 peluru artileri ke salah satu pulau Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan bagian barat yang diperebutkan dengan Korea Utara.</p> <p>Tembakan peluru artileri Korea Utara disebutkan menewaskan seorang tentara Korea Selatan. Sejumlah rumah rusak dan melukai beberapa tentara serta warga sipil. Tembakan artileri ini terjadi ketika utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Stephen Bosworth menutup kemungkinan menggelar kembali perundingan enam pihak tentang Korea Utara selama Pyongyang melanjutkan program nuklir.</p>
27 November 2010	<p>Korea Utara menuduh Seoul menggunakan perisai manusia di pulau yang diserang oleh Korea Utara minggu lalu dan menewaskan dua warga biasa Korea Selatan.</p> <p>Korea Utara mengatakan pihaknya sudah mengirimkan “pemberitahuan lewat telepon” pada pagi hari sebelum penembakan “untuk mencegah bentrokan pada saat-saat terakhir” tetapi Korea Selatan melanjutkan ‘provokasinya’.</p>
30 November 2010	<p>Pemerintah Korea Utara mengatakan mereka memiliki ribuan sentrifugal nuklir di fasilitas yang baru diumumkan ke masyarakat internasional. Pyongyang mengatakan reaktor tersebut bisa dioperasikan sepenuhnya pada 2012 dan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pemerintah Korea Utara memastikan bahwa sentrifugal bisa digunakan untuk melakukan pengayaan uranium.</p>
5 Desember 2010	<p>Korea Utara memperingatkan Korea Selatan agar tidak melakukan provokasi, termasuk latihan militer dengan peluru tajam di batas laut yang dipersengketakan.</p>

TAHUN	AKSI
23 Desember 2010	Menteri pertahanan Korea Utara mengatakan negaranya siap untuk “perang suci bagi keadilan” menggunakan senjata nuklir. Kim Yong-chun mengatakan latihan-latihan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dekat perbatasan merupakan persiapan perang melawan Utara. Dalam pertemuan di ibukota Utara, Pyongyang, Kim menuduh Korea Selatan ingin menciptakan Perang Korea baru.
27 Februari 2011	Korea Utara menyatakan akan menembak Korea Selatan bila Korea Selatan terus menyebarkan selebaran propaganda. Korea Selatan telah melepaskan balon udara ke arah perbatasan kedua negara. Balon-balon itu berisi selebaran tentang gelombang demonstrasi menuntut demokrasi di Mesir dan juga berisi DVD. Selain itu, balon-balon dengan tujuan Korea Utara tersebut juga dilengkapi dengan paket makanan, pakaian dan radio.
9 Juni 2011	Korea Utara menyatakan tidak ada ruang untuk berdialog dengan Korea Selatan. Pernyataan ini keluarisaat utusan Korsel berkunjung ke Beijing.
30 November 2011	Pernyataan pejabat Korut lewat media pemerintah yang terakhir ini dilihat sebagai sebuah pernyataan provokatif yang ditujukan kepada Washington dan Seoul.
11 Desember 2011	Korea Utara memperingatkan Korea Selatan bahwa Seoul akan menghadapi konsekwensi bila menggelar kegiatan penyalaaan lampu pohon Natal di dekat perbatasan.

Diolah dari berbagai sumber

Beberapa tindakan offensive diatas dilakukan oleh Korea Utara secara tiba-tiba (tanpa diketahui dunia internasional sebelumnya). *Surprise attack* ini bisa dilakukan oleh Korea Utara dengan mulus karena didukung oleh sikap tertutupnya Negara ini terhadap dunia internasional sehingga kemungkinan yang paling tepat untkk menangkal tindakan ini adalah melakukan kesepakatan-kesepakatan melalui pembicaraan bilateral dengan Korea Utara.

Dalam strategi menyerang, Korea Utara bisa memaksimalkan keuntungan taktis dengan meluncurkan serangan mendadak yang didukung oleh pasukan yang selalu bergerak. Menggambar pasukan dari empat korps garis depan yang didukung oleh artileri dan unit lapis baja, serangan awal akan mencoba untuk menembus garis pertahanan, memotong rute penarikan, dan menciptakan peluang bagi pasukan eksploitasi mekanik dan lapis baja untuk menekan serangan. Menurut pembelot Angkatan Darat Korea Utara, Pyongyang akan mencoba untuk menetralkan sebagian besar pasukan tempur yang diposisikan di dekat Zona Demiliterisasi, menggagalkan mobilisasi Korea Selatan dan upaya provokasi Amerika, mengisolasi Seoul, dan memulai negosiasi perdamaian dan semua hanya dalam waktu 7 hari. Setiap serangan Korea Utara akan menekankan *surprise attack*, mobilitas, daya tembak, dan mungkin perang dengan menggunakan senjata kimia (www.fas.org, 2013).

## **B. Kerjasama dan Kesepakatan Internasional**

Dalam kasus Korea Utara, reunifikasi mungkin sebuah solusi demi kelangsungan sebuah rezim Kim baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu lama. Korea Utara mungkin akan mampu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dengan jalan mendapatkan sumbangan dari luar negeri terutama dari Amerika Serikat dan Korea Selatan, namun hal itu akan menyebabkan ketergantungan dan kehilangan control. Ketergantungan sendiri sebenarnya jelas tidak sesuai dengan ideologi “*self-reliance*” yang di gunakan Korea Utara, sehingga kemungkinan dari ketergantungan ini adalah mengarah kepada lemahnya atas control pemerintahan internal, pecahnya isolasi yang dilakukan pihak Korea Utara, serta pada akhirnya runtuhnya rezim Kim. Memang *rezime survival*, pertahanan nasional, kemandirian ekonomi adalah tujuan logis dari Korea Utara, namun reunifikasi semenanjung Korea akan tetap menjadi tujuan utama yang mendorong strategi nasional Korea Utara (Hodge, 2003, p. 70).

Sejak pertengahan 1990-an, para pengamat tentang Korea Utara mempunyai pandangan umum sejak munculnya beberapa fenomena antara lain kemerosotan ekonomi, krisis pangan, dan masalah yang terkait dengan ancaman keberlangsungan rezim yang berkuasa serta desakan untuk segera melakukan reunifikasi dengan Korea Selatan. (Hodge, 2003, p. 68)

Dalam situasi ekonomi yang semakin terpuruk dan

keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki, maka jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan dalam negeri adalah dengan cara melakukan kerjasama dan kesepakatan dengan dunia internasional. Dalam perjalanannya, Korea Utara tidak selalu hanya melakukan tindakan provokasi ataupun offensive terhadap dunia internasional, tetapi juga melakukan tindakan kooperatif (kerjasama dan kesepakatan internasional). Tindakan Kooperatif yang paling terlihat yaitu pada tahun 2003 yaitu dalam pembicaraan *six party talk*. Sikap kooperatif ini sesungguhnya langkah awal atau langkah pembuka bagi Korea Utara untuk menjalin kesepakatan dan kerjasama dengan dunia Internasional. Kesepakatan dan kerjasama ini lebih besar terkait dengan bantuan ekonomi, bahan bakar minyak dan bantuan kemanusiaan. Kerjasama atau sikap kooperatif yang paling sering terjadi adalah dengan Jepang, Korea Selatan, dan Amerika. Terjadi beberapa perundingan yang penting dengan ketiga negara tersebut terkait masalah kemanusiaan dan kerjasama ekonomi.

Ada tiga sikap kooperatif yang sudah pernah dilakukan oleh pihak Korea Utara diantaranya Six Party Talk, perbaikan hubungan dengan Korea Utara dengan melakukan kerjasama ekonomi, dan yang terakhir adalah pembukaan zona ekonomi khusus Shineuiju. Ketiga tindakan ini membuktikan bahwa Korea Utara tidak selalu melakukan tindakan offensive, tapi ada kalanya juga melakukan tindakan kooperatif. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pembahasan berikut ini:

### **1. Six Party Talk (2003-2009)**

Six Party Talk adalah pembicaraan keenam Negara yang antara lain Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Amerika, Jepang, dan Rusia. Putaran pertama pembicaraan ini terjadi pada tanggal 27-29 Agustus 2003. Dalam pembicaraan Six Party Talks, keenam Negara sepakat untuk melakukan 11 langkah diskrit untuk menonaktifkan tiga fasilitas Yongbyon dan terutama berkaitan dengan program plutonium Korea Utara (bahan bakar nuklir pabrik fabrikasi, plutonium pabrik pengolahan, dan reaktor eksperimental tenaga nuklir 5 -megawatt). Proses pelumpuhan dimulai pada awal November 2007 dan terus berlanjut sampai April 2009, yang paling memakan waktu adalah langkah penghapusan bahan bakar teriradiasi dari reaktor penyimpanan dalam kolam pendingin berdekatan (Nikitin M. B., 2013). Sebuah laporan sudah menyatakan 8 dari 11 langkah telah diselesaikan (Lihat Tabel 12).

**Tabel 19. Tahapan Penutupan Reaktor Nuklir Yongbyon**

Step	Facility	Status
Discharge of 8000 spent fuel rods to the spent fuel pool	5-megawatt reactor	6,400 completed as of April 2009
Removal of control rod drive mechanisms	5-megawatt reactor	To be done after spent fuel removal completed
Removal of reactor cooling loop and wooden cooling tower interior structure	5-megawatt reactor	Tower demolished June 26, 2008
Disablement of fresh fuel rods	Fuel fabrication facility	Not agreed to by North Korea; consultations held Jan. 2009 with South Korea on possibility of purchase
Removal and storage of three uranium ore concentrate dissolver tanks	Fuel fabrication facility	Completed
Removal and storage of seven uranium conversion furnaces, including storage of refractory bricks and mortar sand	Fuel fabrication facility	Completed
Removal and storage of both metal casting furnaces and vacuum system, and removal and storage of eight machining lathes	Fuel fabrication facility	Completed
Cut cable and remove drive mechanism associated with the receiving hot cell door	Reprocessing facility	Completed
Cut two of four steam lines into reprocessing facility	Reprocessing facility	Completed
Removal of drive mechanisms for the fuel cladding shearing and slitting machines	Reprocessing facility	Completed
Removal of crane and door actuators that permit spent fuel rods to enter the reprocessing facility	Reprocessing facility	Completed

Sumber: North Korea's Nuclear Weapons: Technical Issues. 2013 (Hodge, 2003, p. 19).

Krisis nuklir Korea Utara putaran kedua terjadi sejalan dengan kandasnya dialog antara Korea Utara dan AS. Korea Utara mengharapkan untuk dapat bernegosiasi langsung dengan AS dan menuntut jaminan keamanan rezim Pyongyang sebagai imbalan pembuangan program nuklirnya. Sementara itu, AS tidak begitu suka untuk melakukan negosiasi langsung dengan Korea Utara, dan mengatakan bahwa “tidak ada imbalan terhadap tindakan yang salah”. Kerangka dialog multilateral antara AS, kedua Korea, Cina, Rusia dan Jepang diusulkan sebagai terobosan bagi keadaan yang sudah macet total itu. Cina ditunjuk sebagai negara pengantara, dan

putaran pertama pertemuan segi-6 diadakan di Beijing pada Juli 2003. Setelah pertemuan putaran kedua dan ketiga tidak ada hasil. Dan setelah itu pertemuan multilateral hampir tidak aktif selama setahun sebelum akhirnya pertemuan putaran ke-4 dibuka kembali pada akhir Juli 2005 (KBS, 2013).

Pada tahun 1994 Amerika Serikat dan Korea Utara mencapai kesepakatan untuk melaksanakan denuklirisasi Semenanjung Korea dan pada tahun 2003, Amerika Serikat mengusulkan pembicaraan multilateral mengenai isu nuklir Korea Utara. Beberapa putaran *Six - Party Talks* telah diselenggarakan sejak saat itu, meskipun Korea Utara telah mengatakan akan mengambil langkah-langkah ke arah denuklirisasi, namun beberapa tindakan selanjutnya seperti peluncuran rudal telah bertentangan dengan pernyataan tersebut (State, 2016).

## **2. Perbaikan Hubungan Antar Korea**

Nuklir Korut menimbulkan ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan di Asia Timur dan bahkan hubungan antar Korea semakin menurun sampai ke titik terendah sejak KTT di Pyongyang pada bulan Juni 2000. Seoul telah dihentikan sementara bantuan makanan dan pupuk ke Pyongyang sejak uji coba rudal pada bulan Juli 2006 serta pembicaraan tingkat tinggi antar Korea akan ditunda tanpa batas waktu, dan akan ada sedikit kemungkinan bahwa proyek reuni keluarga antar-Korea ditunda untuk dilanjutkan kembali (Seung-Ho Joo, 2007, p. 30).

Dalam sikap kooperatif dan kerjasama internasional, Korea Utara juga menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Hubungan diplomatik ini ditandai dengan menjalin kerjasama ekonomi antar kedua negara dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Kerjasama yang dimaksud antara lain kerjasama dalam perdagangan barang maupun pembukaan area industri baru di wilayah Korea Utara dan dikelola bersama-sama.

Salah satu ciri khas menonjol dalam kebijakan diplomatik Korea Utara pada akhir 1990an dan 2000-an adalah diplomasi aktif dengan Korea Selatan. Hal itu sejalan dengan kebijakan Korea Selatan yaitu “kebijakan sinar matahari” terhadap Korea Utara. Pada tahun 1998 kunjungan ke Korea Utara oleh ketua Hyundai Jung Ju-young yang membawa 500 ekor sapi sebagai oleh-oleh untuk Korea Utara, maupun dimulainya program wisata gunung Geumgang, mengubah paradigma hubungan antara Korea Selatan dan Korea

Utara. Proyek kompleks industri Gaesung juga dilaksanakan di daerah kota Gaesung Korea Utara untuk menciptakan efek sinergi produksi melalui kombinasi modal Korea Selatan dengan tanah dan tenaga dari Korea Utara. (KBS, 2013)

Proyek seperti reuni keluarga terpisah dan pertemuan tingkat menteri, dan saluran dialog antara militer sering dilakukan oleh kedua negara. Proyek untuk menyambung rel kereta di bagian Barat dan Timur pantai Semenanjung Korea maupun kegiatan bersama antarKorea untuk pertukaran tingkat sipil juga sering dilaksanakan. Lebih jauh lagi, partisipasi atlet Korea Utara dan kelompok pendukung pada Busan Asian Games 2002 merupakan kejadian penting untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara itu, lebih dari satu juta warga Korea Selatan mengunjungi gunung Geumgang selama 6 tahun, hingga program wisata Korea Utara itu menjadi lambang hubungan antar Korea (KBS, 2013).

Menurut data statistik, perdagangan antar Korea bisa dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu perdagangan komersial dan non-komersial. Perdagangan komersial meliputi komersial berbasis pemrosesan (pemrosesan barang dari Korea Utara dikembalikan ke Korea Selatan dengan gaji pekerja yang rendah), proyek kerjasama ekonomi (ekspor import produk Kaesong), dan komersial umum (impor dan ekspor yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas). Perdagangan non-komersial berarti bantuan ekonomi kepada Korea Utara (KoreaInstitute, 2012, pp. 91-94) .

Pada tahun 2000, presiden Kim Dae-jung mengunjungi Pyongyang dan bertemu dengan Kim Jong-il untuk mengadakan KTT. Kedua pemimpin mencapai Pernyataan Bersama 15 Juni, yang terdiri atas 5 prinsip utama (KBS, 2013):

- a. Upaya mandiri untuk reunifikasi,
- b. Mencari titik temu bersama terkait pandangan kedua Korea tentang reunifikasi,
- c. Pertemuan keluarga terpisah, dan penuntasan masalah tawanan perang,
- d. Pertukaran aktif dan kerjasama, dan
- e. Pembukaan kembali dialog bilateral antarKorea.

**Tabel 20. Grafik Perdagangan Antar Korea**

Year	Imports: NK to SK				Exports: SK to NK			
	Total	Process	Kaesong	Others	Total	Process	Kaesong	Others
1989	18.7	—	—	18.7	—	—	—	—
1990	12.3	—	—	12.3	0.1	—	—	0.1
1991	105.7	—	—	105.7	1.2	—	—	1.2
1992	162.9	0.6	—	162.2	5.5	0.2	—	5.3
1993	178.2	3.0	—	175.2	8.4	4.0	—	4.4
1994	176.3	14.3	—	162.0	18.2	11.3	—	6.9
1995	222.9	21.2	—	201.7	64.4	24.7	—	39.7
1996	182.4	36.2	—	146.2	69.6	38.2	—	31.5
1997	193.1	42.9	—	150.2	115.3	36.2	—	79.1
1998	92.3	41.4	—	50.9	129.7	29.6	—	100.1
1999	121.6	53.7	—	67.9	211.8	45.9	—	165.9
2000	152.4	72.0	—	80.4	272.8	57.2	—	215.6
2001	176.2	72.6	—	103.6	226.8	52.3	—	174.4
2002	271.6	102.8	—	168.8	370.2	68.4	—	301.8
2003	289.3	111.6	—	177.6	435.0	73.4	—	361.6
2004	258.0	107.7	0.1	150.2	439.0	68.2	41.6	329.2
2005	340.3	131.2	19.8	189.3	715.5	78.5	156.9	480.0
2006	519.5	159.4	75.9	284.2	830.2	93.6	222.9	513.8
2007	765.3	204.5	101.2	459.6	1032.6	125.4	339.5	567.7
2008	932.3	257.3	290.1	384.8	888.1	151.0	518.3	218.8
2009	934.3	254.0	417.9	262.3	744.8	155.7	522.6	66.5
2010	707.0	0.0	0.0	0.0	612.7	0.0	0.0	0.0
Jan.	89.5	19.4	51.3	18.8	79.9	10.8	64.7	4.4
Feb.	76.4	21.8	43.6	10.9	77.1	14.0	56.7	6.5
March	119.7	32.2	60.9	26.6	82.3	10.6	66.5	5.2
April	104.2	26.6	56.6	21.1	85.8	11.1	70.3	4.3
May	97.2	16.3	58.7	22.2	59.4	7.0	50.7	1.6
June	65.9	6.9	55.0	4.0	56.9	0.5	56.0	0.3
July	72.8	8.6	61.9	2.3	89.2	23.3	65.4	0.5
Aug.	81.4	14.5	65.5	1.4	82.2	15.1	66.6	0.5

Sumber: Suk Hi Kim, Terence Roehrig and Bernhard Seliger. *The Survival of North Korea* (Kim, Terence Roehrig and Bernhard Seliger. *The Survival of North Korea: Essays on Strategy, Economics and Internasional Relation*, 2011, p. 93)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perdagangan antara Korea Selatan dan Korea Utara mengalami peningkatan atau bisa dibilang paling tinggi pada tahun 2006-2010. Ini membuktikan bahwa pembicaraan keenam belah pihak (*six party talk*) berdampak positif bagi perdagangan Korea Utara dan sikap kooperatif Korea Utara disambut baik oleh Korea Selatan.

### **3. Inisiatif ekonomi baru dan zona ekonomi khusus Shineuiju**

Sebuah proyek untuk membangun Zona Perdagangan Bebas di pelabuhan Najin dan daerah Seonbong, di propinsi Hamkyeong dilaksanakan pada tahun 1991 dengan tujuan mengubah zona ini menjadi pusat logistik internasional, pusat ekspor untuk produk olahan maupun sebagai pusat wisata dan keuangan. Walaupun upaya legislasi dan institusional dikerjakan, namun lingkungan negara sosialis yang tertutup dan terbatas, infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya tingkat kepercayaan dari luar negeri mengakibatkan gagalnya proyek itu. (KBS, 2013)

Maka dari itu Korea Utara berinisiatif untuk membuka zona ekonomi khusus Shineuiju secara dasar berbeda jauh dari zona perdagangan bebas Najin-Seonbong. Kim Jong-il, selama kunjungan ke Cina menyaksikan reformasi lokal dan keterbukaan yang sedang dilaksanakan negara itu. Menurut berita, dia mengungkapkan bahwa “ dunia yang benar-benar baru sedang diciptakan di sana”. Zona ekonomi khusus, Shineuiju adalah proyek ambisius yang datang pada saat rencana pembangunan nasional selama masa transisi mereka, gagal dan kepemimpinan Korea Utara tidak membuat ide baru. Cetak biru untuk zona itu diumumkan dalam pertemuan komisi permanen Sidang Rakyat Tertinggi pada 12 September 2002. Zona ini menjadi de facto ‘negara di dalam negara” hampir sama dengan Hong Kong, yang menjamin kegiatan bisnis dan hak properti swasta, yang dipimpin oleh menteri administrasi. Dengan posisi yang terletak di dekat Cina dan laut Barat, zona itu sangat mudah untuk diakses oleh orang dan modal asing. Di tengah perhatian besar dunia, pebisnis Cina, Yang-Bin dilantik sebagai menteri administrasi zona itu. Namun, proyek Shineuiju ditimpa masalah saat Yang-Bin ditangkap oleh Cina dengan tuduhan korupsi, dan sampai sekarang tidak berkembang lagi (KBS, 2013).

Kestabilan sistem kekuasaan Kim Jong-il tidak segera membawa kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Korea Utara. Pembatasan struktur sistem domestik masih ada, dan lingkungan eksternal juga memburuk, sehingga lebih mengisolasi perekonomian negara komunis itu. Rencana Pembangunan masa transisi 3 tahun yang berlaku pada tahun 1994 tidak begitu mendapat hasil. Korea Utara masih bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi permintaan pangan domestik, sedangkan porsi ketergantungan ekonominya pada Cina dan Korea Selatan dalam perdagangan semakin besar. Kekurangan dana, teknologi dan informasi membuat

Korea Utara sulit mencapai pertumbuhan ekonomi mandiri mereka. Zona ekonomi khusus Shineuiju diusulkan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan itu. (KBS, 2013)

### C. Motif Sikap Offensive Korea Utara

Suatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara tentunya mempunyai implikasi dan maksud yang ingin dicapai. Sebuah kebijakan yang di ambil juga akan mempunyai maksud dan tujuan. Korea utara selalu melakukan tindakan offensive terutama kepada Jepang, Korea Utara dan Amerika, hal ini sangat menarik untuk mengetahui tentang motif apa yang melatarbelakangi tindakan atau aksi offensive Korea Utara tersebut.

Tidak ada solusi yang mudah terhadap masalah yang dihadapi Korea Utara, sanksi yang dijatuhkanpun kadang juga tidak akan berdampak apa-apa. Yang terjadi malah sanksi yang dijatuhkan akan membuat sikap Korea Utara semakin mengeras dan tidak bisa diajak duduk dimeja perundingan dalam kerjasama internasional (Charles Kartman, 2009, p. 20).

Berurusan dengan nuklir Korea Utara merupakan permainan yang beresiko tinggi yang akan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan di Irak dan Iran. Menurut analis kebijakan Amerika, hanya ada empat pilihan jika ingin berurusan dengan nuklir Korea Utara, *pertama*, memberikan bantuan ekonomi dan jaminan keamanan jika Korea Utara mau menghentikan program nuklirnya. *Kedua*, menggunakan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Korea Utara. *Ketiga*, membiarkan Korea Utara mengembangkan nuklirnya. *Keempat*, membiarkan rezim Korea Utara mati kelaparan karena kehabisan uang (Kim, Terence Roehrig and Bernhard Seliger. *The Survival of North Korea: Essays on Strategy, Economics and Internasional Relation*, 2011, pp. 248-249). Amerika dan Korea Utara telah menjadi musuh sejak perang Korea (1950), desakan untuk menutup program nuklir akan diterima jika Korea Utara mendapatkan imbalan berupa bantuan ekonomi dan jaminan keamanan dari Amerika (Charles Kartman, 2009, p. 253).

Untuk menghentikan pengembangan senjata pemusnah masal dan sikap provokasi dari Korea Utara, sangsi dan langkah-langkah garis keras dirasa tidak efektif. Terkait dengan hal tersebut maka Amerika membuat beberapa kebijakan, antara lain: *pertama*, tidak terlibat dalam urusan diplomatik melalui perundingan enam

pihak sejak tahun 2009. *Kedua*, upaya non-proliferasi nuklir masuk kedalam inisiatif keamanan proliferasi. *Ketiga*, melakukan upaya-upaya internasional untuk penanggulangan terhadap perdagangan obat-obatan terlarang dengan, uang palsu, atau penyelundupan barang yang dilakukan Korea Utara. *Keempat*, pemeliharaan pasukan militer di Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Asia Timur lainnya sebagai pencegah terhadap agresi Korea Utara. *Kelima*, sanksi ekonomi dan pengisolasian secara diplomatic. *Keenam*, menjaga Korea Utara dalam usahanya untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional (Charles Kartman, 2009, p. 247).

Dari analisis-analisis kebijakan diatas, kemungkinan terbesar dari motif utama dari sikap *offensive* yang dilakukan Korea Utara adalah demi mendapatkan bantuan dari dunia internasional. Bantuan ini bisa berupa makanan, bantuan kemanusiaan, dan bahan bakar minyak. Analisis ini didasarkan pada keadaan internal Korea Utara yang semakin kacau dengan terjadinya kemerosotan ekonomi, kelaparan dan krisis energi, maka demi keberlangsungan rezim Kim Jong Il mau tidak mau aksi provokatif harus dilakukan untuk memberikan nilai tawar kepada dunia internasional.

Tindakan *offensive* pada masa Kim Jong Il dimulai pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, setelah itu terdapat satu tindakan kooperatif yaitu dimulainya pembicaraan keenam Negara (*six party talk*) yang memperoleh kesepakatan untuk melakukan 11 langkah diskrit untuk menonaktifkan tiga fasilitas Yongbyon dan terutama berkaitan dengan program plutonium Korea Utara (bahan bakar nuklir pabrik fabrikasi, plutonium pabrik pengolahan, dan reaktor eksperimental tenaga nuklir 5 megawatt) dengan imbalan pemberian bantuan ekonomi kepada Korea Utara.

Pada tahun 2006, intensitas tindakan *offensive* Korea Utara semakin meningkat tajam dan tercatat terjadi sembilan tindakan *offensive* yang dilakukan. Tindakan *offensive* yang dilakukan antara lain menguji coba setidaknya 6 peluru kendali termasuk peluru kendali Taepodong-2 yang diyakini oleh Korea Utara mampu menjangkau Amerika. Selain itu terjadi penghentian program penyatuan keluarga terpisah dengan Korea Selatan yang membuat harapan perundingan keenam belah pihak semakin memudar. Tindakan dan aksi dari Korea Utara ini langsung mendapatkan respon dari dunia internasional yaitu pada tahun 2007 Kepala badan pengawas tenaga nuklir PBB diundang ke Korea Utara untuk membicarakan program nuklir negara itu. Korea Utara untuk

mengambil langkah awal untuk meninggalkan program senjata nuklir dalam perundingan enam negara awal bulan ini. Berdasarkan kesepakatan ini, Pyongyang berjanji untuk menutup reaktor nuklir Yongbyon dalam waktu 60 hari dengan imbalan bantuan bahan bakar. Bantuan bahan bakar yang dijanjikan atas kesepakatan tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Korea Utara, tetapi pihak Korea Utara memberikan persyaratan tambahan yang dirasa terlalu berlebihan.

Pada 11 Februari 2007, perundingan yang membahas program nuklir Korea Utara mengalami masalah karena tuntutan dari Korea Utara yang berlebihan dan tuntutan itu tidak bisa dipenuhi yang mengakibatkan Korea Utara marah dan melakukan aksinya lagi pada 25 Mei 2007 dengan menembakkan beberapa rudal jarak pendek kearah perairan laut Jepang. Dengan tuntutanya tidak kunjung dipenuhi, maka pada 3 april 2008 Korea Utara menghentikan perundingan dengan Korea Selatan. Dengan demikian jalinan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang sebelumnya mulai membaik, sekarang menjadi buruk lagi.

Pada awal 2009, intensitas sikap offensive Korea Utara semakin meningkat. Hal ini seiring dengan tidak adanya kesepakatan dan titik temu dari perundingan-perundingan yang dibuat. Peningkatan sikap offensive pada tahun 2009 ini juga dikarenakan pihak internasional mulai mengurangi bantuan kepada Korea Utara karena tindakan *offensive* yang dilakukan oleh Korea Utara tidak mendapat respon positif dari dunia internasional tetapi malah mendapatkan sangsi-sangsi serta kecaman-kecaman yang bisa dikatakan merupakan respon negative sehingga terjadinya pembicaraan atau perundingan merupakan suatu keniscayaan. Hal inilah yang membuat intensitas tindakan *offensive* yang dilakukan Korea Utara semakin meningkat pada beberapa tahun berikutnya dan mulai terjadi penurunan pada tahun 2010-2011.

Sederhananya, sikap offensive yang dilakukan oleh Korea Utara salah satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Hal ini bias dilihat dari keadaan ekonomi dalam negeri yang semakin terpuruk serta ketidakstabilan politik dalam negeri. Dalam setiap aksinya selalu mempunyai alur yang sama seperti yang akan dijelaskan dalam gambar 6 berikut ini:

Gambar 4. Alur Tindakan Offensive Korea Utara



Rangkaian dari tindakan offensive sampai kepada perolehan bantuan asing mempunyai pola yang selalu sama. Pola ini tidak akan berjalan jika kehilangan salah satu poinnya, sebagai contoh dapat dilihat pada tahun 2009 sampai dengan 2011, meskipun Korea Utara sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dari dunia internasional tetapi sikap offensive mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena tindakan offensive yang dilakukan oleh Korea Utara tidak mendapat respon positif dari dunia internasional tetapi malah mendapatkan sangsi-sangsi serta kecaman-kecaman yang bisa dikatakan merupakan respon negative sehingga terjadinya pembicaraan atau perundingan merupakan suatu keniscayaan.

Ada dua hal yang melatarbelakangi penurunan tindakan *offensive* Korea Utara pada rentang waktu 2009 sampai dengan 2011 yaitu, *pertama*, kesehatan pemimpin Korea Utara (Kim Jong Il) semakin menurun. *Kedua*, kesibukan Kim Jong Il dalam mempersiapkan suksesi didalam tubuh pemerintahannya dengan harapan calon penerusnya (Kim Jong Un) bisa meneruskan kursi kekuasaannya serta demi menjaga kelangsungan hidup rezim Kim.

#### D. Keuntungan Ekonomi yang Didapat

Ekonomi Korea Utara sebagian besar dibawah selubung kerahasiaan, hanya sedikit sekali informasi yang diberikan terhadap dunia luar. Banyak peneliti menilai ekonomi Korea Utara dengan menggunakan indikator tidak langsung, yang salah satu indikatornya adalah statistik perdagangan dari Negara-negara yang memiliki transaksi dengan Korea Utara. Bukan hanya keadaan ekonomi, produksi pangan tahunanpun juga dapat dinilai secara

tidak langsung. Banyak organisasi internasional dan LSM untuk melengkapi laporannya menggunakan penilaian mereka sendiri dengan menggunakan data iklim (suhu rata-rata, curah hujan, dll), batas tanah yang subur, dan informasi jenis tanah yang di antaradata tersebut dikumpulkan melalui satelit (Myong-Hyun, 2013).

Walaupun masa-masa sulit secara resmi diumumkan telah berakhir, namun masih ada banyak rintangan yang menghadang di depan Korea Utara pada abad ke-21. Sistem struktur ekonomi mereka yang terisolasi ada kemungkinan akan terjatuh ke krisis lain. Apalagi, mereka masih sangat tergantung pada bantuan dari luar untuk memenuhi permintaan pangan dalam negeri, maka perubahan hubungan luar negeri atau perubahan volume produksi pangan global bisa menimbulkan kesulitan pangan yang baru di negara komunis itu. (KBS, 2013)

Akibat fenomena ini, pemerintah Korea Utara mengambil dua kebijakan yang berarti yaitu, *pertama*, tanggung jawab untuk menyediakan makanan untuk rakyat Korea Utara telah dibebankan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pasar swasta. *Kedua*, pada puncak krisis pangan, pemerintah Korea Utara mengeluarkan kebijakan prioritas penyaluran bahan pangan yaitu kepada pejabat Negara, kader tingkat tinggi dan anggota militer dan yang terakhir baru kepada rakyatnya (Snyder, 2001, p. 259).

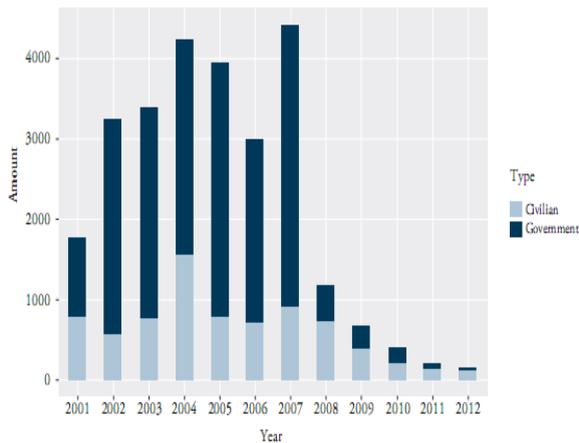
PBB menjelaskan bahwa Korea Utara dilanda krisis kemanusiaan yang serius, ini dibuktikan dengan kondisi 16 juta orang terus menderita kelaparan, tingkat kekurangan gizi yang tinggi, dan masalah-masalah ekonomi yang mengakar. Dikatakan anak-anak semakin kekurangan gizi hingga ratusan anak-anak meninggal akibat diare (VOA, 2012).

Selama empat dekade setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, strategi AS terhadap Korea Utara adalah relatif sederhana yaitu mencegah serangan terhadap Korea Selatan. Ini termasuk pembekuan pada hampir semua bentuk kontak ekonomi antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam upaya untuk melemahkan dan mendelegitimasi Pemerintahan Korea Utara. Pada 1990-an, Amerika Serikat memikirkan untuk mengembalikan hubungan dengan Korea Utara dalam senjata nuklir dan program rudal serta kondisi kelaparan yang dilanda Korea Utara juga menjadi alasan Amerika untuk kembali menjalin hubungannya. Pada tahun 1995, Amerika mulai menyediakan bantuan asing untuk Korea Utara yang sampai saat ini telah mencapai lebih dari \$ 1,2 milyar. Bantuan

ini telah terdiri dari bantuan energi, bantuan pangan, dan sejumlah kecil obat-obatan (Nikitin M. E., 2014, p. 1).

Menurut North Korea Advisory Group (NKAG), bantuan AS untuk Korea Utara telah berkembang dari nol sampai lebih dari \$ 270.000.000 per tahun, sebesar \$ 645.000.000 selama lima tahun terakhir dari tahun 1995-1999. Berdasarkan tren saat itu, jumlahnya kemungkinan akan melebihi \$ 1 miliar pada tahun 2000. Selama waktu yang sama, Korea Utara mengembangkan peluru kendali yang mampu membuat marah Amerika Serikat dan melakukan perdagangan narkoba dan pemalsuan mata uang negara utama. Korea selalu mendapatkan program pangan berkelanjutan darurat dari PBB dan merupakan terpanjang dalam sejarah. Meskipun demikian, dari pihak Korea Utara sendiri tidak memiliki upaya untuk mereformasi pertanian dan berusaha mencukupi kebutuhan pangannya sendiri (NKAG, 1999, pp. 70-71)

**Tabel 21. Bantuan dari Korea Selatan Kepada Korea Utara Pada Tahun 2001-2012**

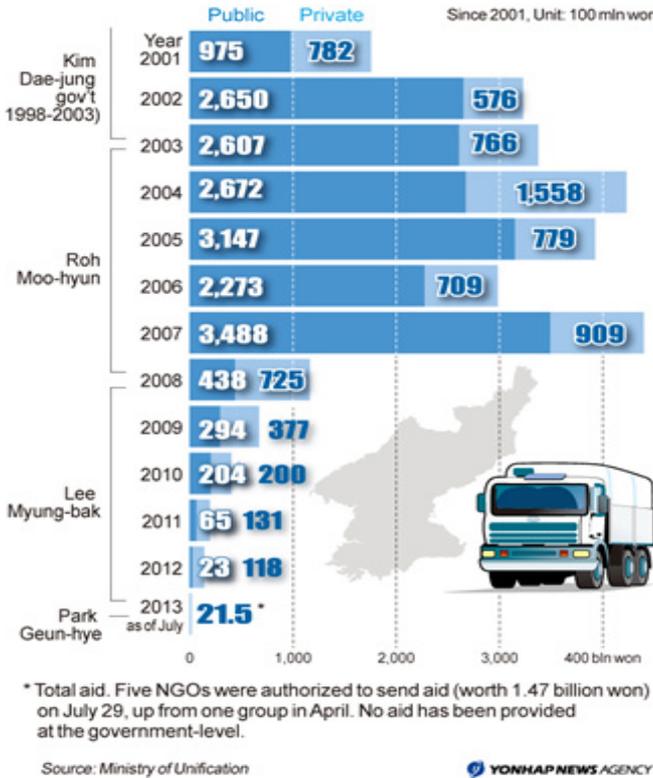


Sumber: *The Ministry of Unification South Korea (Myong-Hyun, 2013)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bantuan dari Korea Selatan kepada Korea Utara mulai terjadi peningkatan pada tahun 2001 sampai dengan 2005, tahun 2006 mengalami penurunan dan mulai meningkat lagi pada tahun 2007. Peningkatan pada tahun

2007 ini terkait terjadinya pembicaraan ke-enam belah pihak (*six party talk*).

**Tabel 22. Bantuan Dari Korea Selatan Kepada Korea Utara**  
(Dalam Tahun)



Sumber: <http://english.yonhapnews.co.kr> (Yonhapnews, 2014)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan melalui NGO internasional mulai terjadi peningkatan sejak 2001 sampai puncaknya yaitu pada tahun 2007. Setelah itu terjadi penurunan yang drastis dari tahun 2008 sampai dengan 2013.

Adapaun bantuan yang diberikan oleh dunia Internasional kepada Korea Utara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu bantuan pangan, bantuan bahan bakar minyak dan bantuan kemanusiaan. Secara lebih rinci terkait bantuan tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan dibawah ini.

## 1. Bantuan Pangan

Sejak 1980-an, Korea Utara mengalami kekurangan pangan secara besar-besaran hingga pada tahun 1995 Korea Utara meminta bantuan pangan kepada pihak luar dan Amerika Serikat adalah salah satu penyedia terbesar bantuan pangan tersebut. Permintaan itu belum pernah terjadi sebelumnya, karena Korea Utara adalah salah satu negara yang paling tertutup di dunia. Pada bulan Februari 2012, Obama setuju untuk melanjutkan bantuan pangan skala besar sebagai imbalan untuk Korea Utara dengan janji untuk mengambil langkah-langkah tertentu pada program nuklir dan rudal jarak jauhnya (Nikitin M. E., 2014, pp. 2-3).

Selama tahun 1995, masyarakat internasional telah menyumbangkan lebih dari 12 juta Metrik Ton bantuan pangan ke Korea Utara untuk meringankan kekurangan pangan secara besar-besaran yang dimulai pada awal 1990. Kelaparan parah pada 1990-an menewaskan sekitar 600.000 hingga 3 juta penduduk Korea Utara. Tabel dibawah menunjukkan jumlah bantuan pangan telah bervariasi dari tahun ke tahun, tetapi secara umum Pyongyang telah berhasil memastikan arus pemasukkan yang signifikan kecuali untuk tahun 2006 dan 2008. Bantuan makanan telah melampaui 400.000 Metrik Ton dan sejak tahun 1996, Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 2,2 Juta Metrik Ton bantuan makanan senilai hampir \$800 juta (Nikitin M. E., 2014, p. 9)

Pada tahun 1995 itu juga Amerika Serikat telah menyumbangkan makanan dengan nilai total lebih dari \$ 360.000.000 untuk Korea Utara. Bantuan tersebut paling banyak disalurkan melalui WFP (*United Nations World Food Program*), di mana Amerika Serikat menyumbang 87 % dari semua sumbangan. Selain itu, Amerika Serikat juga menetapkan program bantuan pangan bilateral yang dijalankan oleh PVOC (*Private and Voluntary Organization Consortium*). Program gabungan ini mencoba untuk memberi makan sepertiga dari total penduduk Korea Utara atau sekitar 6,5 juta orang dari populasi 23 juta, yang hidupnya dalam status kekurangan pangan (NKAG, 1999, pp. 70-71).

Sebagian besar bentuk bantuan ekonomi dari Amerika berupa bantuan kemanusiaan berupa bantuan makanan untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di Korea Utara. Amerika Serikat juga telah membantu LSM Amerika dalam memberikan bantuan untuk melawan wabah penyakit menular dan untuk meningkatkan pasokan listrik di rumah sakit di setiap provinsi di Korea Utara (State, 2016).

Sebuah studi gizi yang dilakukan oleh badan-badan PBB, Uni Eropa, dan *Save the Children Fund* Inggris pada bulan September - Oktober 1998 menunjukkan gizi buruk yang mengancam jiwa di Korea Utara sebesar 18 persen, dengan 62 persen anak-anak dengan perlambatan pertumbuhan. Kebijakan AS adalah bahwa bantuan pangan tidak akan diberikan kepada Korea Utara jika tidak dapat dipantau WFP dan PVOOC melakukan monitoring secara terus menerus terhadap bantuan dan perkembangan ini sehingga diharapkan bantuan ini akan tepat sasaran. Anggota PVOOC dan melaporkannya ke GAO (*General Accounting Office*) bahwa karena pembatasan akses orang luar terhadap internal Korea Utara, maka suatu hambatan untuk memverifikasi makanan yang sudah disalurkan (NKAG, 1999, pp. 74-75). Kemungkinan besar fokus bantuan yang diberikan oleh Amerika kepada Korea Utara yang seharusnya untuk anak-anak dan masyarakat Korea Utara yang kurang gizi tetapi dialihkan oleh pemerintah Korea Utara kepada sektor militer dan pejabat-pejabat pemerintahan.

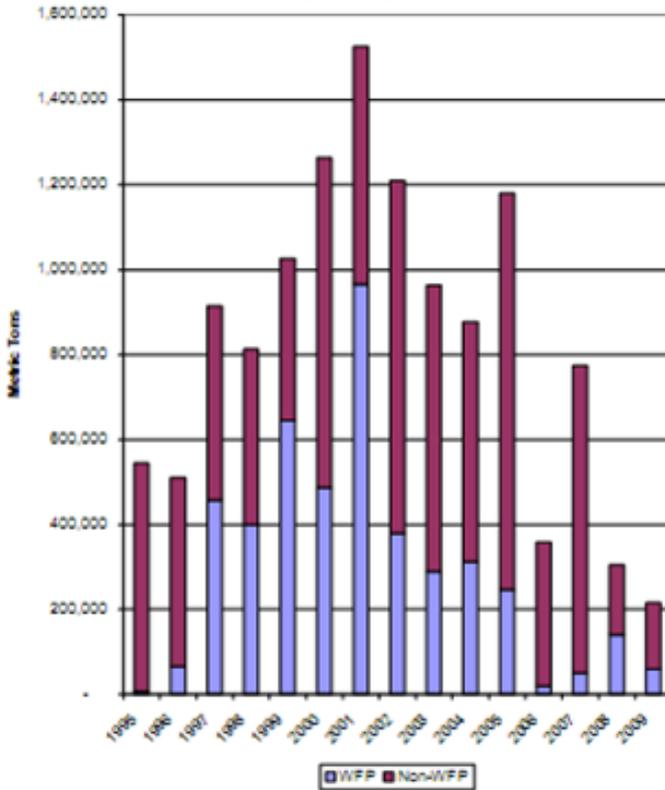
Hingga pada bulan September 1998, MSF (*Medicins Sans Frontiers/ Dokter tanpa ikatan*) mengakhiri program gizi dan menarik diri dari Korea Utara karena beberapa hal, yaitu *pertama*, tidak memungkinkan MSF untuk mengevaluasi program-program mereka karena sifat tertutup dari Korea Utara. *Kedua*, meningkatnya jumlah “anak kurang gizi palsu” (data yang dimanipulasi oleh pihak Korea Utara). *Ketiga*, menutup-nutupi jumlah anak yang paling kekurangan gizi. Maka dari itu, MSF yakin bahwa sebagian besar bantuan pangan internasional tidak benar-benar mencapai membutuhkan dan mereka memilih untuk menghentikan kegiatan mereka di Korea Utara. Dengan sistem monitoring yang buruk, bantuan pangan dapat dialihkan dalam jumlah besar hanya kepada militer dan Partai Komunis. Pengalihan ini telah mengakibatkan kematian 500.000 akibat kelaparan pada tahun 1995, dimana 50.000 adalah kader partai (NKAG, 1999, pp. 74-76).

Pada tabel 23 terlihat bahwa bantuan terbanyak diberikan pada tahun 2002 dan selanjutnya tertinggi kedua pada tahun 2006. Hal ini menggambarkan jumlah bantuan yang diberikan oleh PBB paling intensif mulai dari tahun 1999-2006.

Pemerintah China pada tahun 2012 memberikan sumbangan sebesar US \$1 juta untuk operasi WFP di DPR Korea. Donasi tersebut akan digunakan untuk membantu anak-anak dan ibu mereka yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Pada bulan Juli 2012, WFP memulai operasi baru di Korea Utara, difokuskan pada penyediaan

dukungan nutrisi bagi perempuan dan anak-anak paling berisiko kekurangan gizi .Sebagian besar makanan yang didistribusikan datang dalam bentuk Super Cereal - khusus makanan bergizi yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan mineral dan vitamin yang penting untuk diet. (Yonhap, 2013)

**Tabel 23. Total Bantuan Pangan Dari World Food Programme (WFP) Kepada Korea Utara**



Sumber:U.N. World Food Programme (WFP)

Sumbangan dari China itu akan digunakan untuk membeli sekitar 1.550 metrik ton jagung, yang akan menjadi bahan dasar untuk *Super Cereal* yang diproduksi di Korea Utara dan kemudian didistribusikan selama satu bulan untuk 400.000 anak-anak di rumah sakit, panti asuhan, dan taman kanak-kanak. Ibu hamil dan menyusui juga akan mendapat jatah makanan. (Yonhap, 2013)

Radio Free Asia melaporkan Agape International akan mengirim 21 ton makanan bayi untuk DPRK pada September 2012.

Selain itu Rusia telah menganggap lunas utang Korea Utara pada masa Uni Soviet serta Rusia telah memberikan lebih dari 4.000 ton tepung ke Korea Utara. Selain Rusia, Indonesia juga akan mengirimkan bantuan pangan senilai US \$ 2 juta dengan harapan mengatasi krisis kelaparan di Korea Utara, Indonesia juga berharap bahwa bantuan kemanusiaan yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara (Yonhap, 2013).

## **2. Bantuan Bahan Bakar Minyak**

Pertumbuhan ekonomi yang semakin terpuruk, kekurangan bahan baku (terutama minyak), perencanaan ekonomi terpusat yang tidak efektif, dan penekanan pada kekuatan militer telah memberi kontribusi pada kegagalan ekonomi Korea Utara. Selain itu, DPRK tidak dapat lagi menghasilkan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri, pelayanan sosial yang telah rusak parah, dan bantuan masyarakat telah dikurangi menjadi satu kali makan sehari. Sumber daya yang semakin kritis tetapi terus didedikasikan untuk militer sehingga kerugian perekonomian semakin meningkat tajam. Manajemen ekonomi DPRK tidak memberikan keleluasaan bagi produsen, insentif yang nyata bagi individu yang lebih unggul, atau pemerintah responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika DPRK terus penekanannya pada militer dan tidak mereformasi sistem ekonomi, negara ini akhirnya bisa hancur (Defense, 1997, pp. 3-4).

Amerika Serikat juga menyediakan sejumlah besar bahan bakar minyak (HFO) ke Korea Utara sesuai dengan kerjasama yang telah dibuat pada tahun 1994. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk menyediakan dua 1.000 MW reaktor dengan imbalan janji Korea Utara untuk menghentikan operasi dan bekerja di lima reaktor MW yang berfungsi dan direncanakan 50 MW dan reaktor 200 MW. AS juga berjanji untuk mendirikan suatu organisasi untuk memberikan 500.000 MT dari HFO untuk mengganti hilangnya energi dari reaktor Korea Utara sampai reaktor baru pertama datang dan beroperasi. Jumlah bantuan bahan bakar didasarkan pada perkiraan kebutuhan tanaman Songbong saat beroperasi pada kapasitas 100 persen. Karena tanaman yang jarang beroperasi di atas kapasitas 40 persen, KEDO memberikan bahan bakar untuk setidaknya enam pabrik Korea Utara lainnya (NKAG, 1999, p. 77)

Pada 1 Agustus 1999, Amerika Serikat dan mitra-mitranya telah memberikan 1,9 juta metrik ton minyak ke Korea Utara atau bernilai \$ 222 juta, sehingga kontribusi AS mencapai \$ 148.000.000. Berdasarkan perjanjian tersebut, bahan bakar Amerika hanya dapat digunakan untuk menggantikan pemanas dan listrik yang akan diproduksi oleh reaktor produksi plutonium Korea Utara. KEDO, yang diciptakan oleh pada kerangka kerjasama tahun 1994 menerapkan sistem pemantauan di tujuh pemanas dan listrik tanaman untuk memastikan penggunaan yang tepat. (NKAG, 1999, p. 77)

Selama pemadaman yang berlangsung dari Januari-April 1999, Korea Utara mengkonsumsi sejumlah bahan bakar dimana sejumlah bahan bakar telah dialihkan sejak program ini dimulai. Tidak hanya memiliki program bantuan bahan bakar, Korea Utara juga mempunyai kesempatan untuk mengalihkan sumber daya untuk WMD (*senjata pemusnah masal*) dan program militer konvensional (NKAG, 1999, p. 78)

**Tabel 24. Program Pendampingan Bantuan dari Amerika Terhadap Korea Utara (1995-2011)**

Calendar or Fiscal Year (FY)	Food Aid (per FY)		KEDO Assistance (per calendar yr; \$ million)	6-Party Talks-Related Assistance (per FY; \$ million)		Medical Supplies & Other (per FY; \$ million)	Total (\$ million)
	Metric Tons	Commodity Value (\$ million)		Fuel Oil	Nuclear Disablement		
1995	0	0.00	59.50	—	—	0.20	9.70
1996	19,500	8.30	22.00	—	—	0.00	30.30
1997	177,000	52.40	25.00	—	—	5.00	82.40
1998	200,000	72.90	50.00	—	—	0.00	122.90
1999	695,194	222.10	65.10	—	—	0.00	287.20
2000	265,000	74.30	64.40	—	—	0.00	138.70
2001	350,000	58.07	74.90	—	—	0.00	132.97
2002	207,000	50.40	90.50	—	—	0.00	140.90
2003	40,200	25.48	2.30	—	—	0.00	27.78
2004	110,000	36.30	0.00	—	—	0.10	36.40
2005	25,000	5.70	—	—	—	—	5.70
2006	0	0.00	—	—	—	0.00	0.00
2007	0	0.00	—	25.00	20.00	0.10	45.10
2008	148,270	93.70	—	106.00	25.00	0.00	224.70
2009	21,000	5.60	—	15.00	—	4.00	24.60
2010	—	2.90*	—	—	—	0.60	3.50
2011	—	—	—	—	—	0.90	0.90
2012	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>2,258,164</b>	<b>708.15</b>	<b>403.70</b>	<b>146.00</b>	<b>45.00</b>	<b>10.90</b>	<b>1,313.75</b>

Sumber: [www.fas.org](http://www.fas.org) (Nikitin M. E., 2014)

Pada tahun 1994, Amerika Serikat dan Korea Utara menegosiasikan kerangka kerjasama, di mana Pyongyang setuju untuk menutup program nuklirnya dengan imbalan dua *light water nuclear reactors* (LWRs) dan *heavy fuel oil* (HFO). Antara tahun 1995 dan 2003, Amerika Serikat memberikan lebih dari \$ 400 juta pada HFO, yang disalurkan melalui *Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO), organisasi ini didirikan untuk melaksanakan kerangka persetujuan antara Korea Utara dan Amerika. Pada musim gugur 2002, George W. Bush menghentikan bantuan energi karena terdapat laporan bahwa Korea Utara diam-diam telah mengembangkan pengayaan uranium untuk program nuklir. Pada tahun 2007, George W. Bush melanjutkan bantuan energi ke Korea Utara setelah terjadi pembicaraan enam pihak (*Six-Party Talks*) tentang program nuklir Korea Utara. Dengan persetujuan itu maka Negara-negara lain akan menyediakan HFO kembali dengan imbalan penutupan reactor nuklir Yongbyon Hingga pada Desember 2008 , Amerika Serikat telah mengirimkan 200.000 ton HFO (Nikitin M. E., 2014, p. 2).

**Tabel 25. Pendampingan Energi Dari Pembicaraan Six Party Talk**  
(Juli 2007-Maret 2009)

Donor Country	Amount of HFO (MT) Delivered	Amount of HFO Equivalent (MT) Delivered	Amount Left to be Delivered
China	50,000	150,000	0
Japan	0	0	200,000
Russia	200,000	0	0
South Korea	50,000	95,110	55,000 HFO equivalent
United States	200,000	0	0
<b>Total</b>	<b>500,000</b>	<b>245,110</b>	<b>310,000</b>

**Source:** Compiled by the Congressional Research Service.

**Notes:** Japan has stated it will not deliver energy assistance to North Korea until the issue of abductions of Japanese citizens by North Korea is resolved. MT = metric tons.

Sumber: *Foreign Assistance to North Korea*. 2013 (Nikitin M. E., 2014, p. 6).

### 3. Bantuan Kemanusiaan

Dari waktu ke waktu, Amerika Serikat juga telah memberikan sejumlah kecil bantuan medis untuk Korea Utara. Pada tahun 2008 misalnya, pemerintahan Bush mengalokasikan \$ 4 juta dalam bantuan kepada LSM Amerika Serikat untuk membantu

beberapa rumah sakit pedesaan dan provinsi di Korea Utara dengan meningkatkan pasokan listrik mereka dan dengan menyediakan peralatan medis serta pelatihan. Pada tahun 2010, Pemerintahan Obama menghabiskan \$600.000 pada penyediaan barang-barang bantuan, seperti obat-obatan, ke Korea Utara pada saat Korea Utara dilanda banjir besar (Nikitin M. E., 2014, p. 4).

Jumlah total bantuan yang diberikan kepada Korea Utara oleh pemerintah Korea Selatan dan organisasi swasta pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 28 % terhadap tahun 2011, yang menandai enam tahun penurunan terus-menerus. Kementerian Unifikasi mengungkapkan pada tanggal 27 Januari bahwa jumlah total bantuan Korea Selatan ke Korea Utara dihitung 14,1 miliar KRW (13 juta USD), dengan 2,3 miliar KRW (2,12 juta USD) dari bantuan pemerintah untuk vaksin dan pelatihan medis dan 11,8 miliar KRW (10.890.000 USD) dari sektor swasta untuk persediaan medis . Ini adalah penurunan 28,1 persen dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 1,96 miliar KRW (18.090.000 USD). (Yonhap, 2013)

Selain itu, Pemerintah Korea Selatan mengirimkan sekitar 6,5 miliar KRW (6 juta USD) dari obat-obatan ke Korea Utara melalui UNICEF dan sektor swasta mengirim sekitar 13,1 miliar KRW (12,1 juta USD) untuk pasokan pencegahan malaria, susu bubuk, susu kedelai, dan tepung. Tahun lalu adalah rekor terendah untuk bantuan kemanusiaan ke Korea Utara dalam enam belas tahun. Titik rendah sebelum ini adalah tahun 1996, yang tercatat 3,6 miliar KRW ( 3,3 juta USD). Bantuan Lee Myung-bak untuk pemerintah Korea Utara selama lima tahun terakhir mencapai total 257.500.000.000 KRW (236.200.000 USD), dengan 102,4 miliar KRW (93.940.000 USD) dana pemerintah dan 155.100.000.000 KRW (142.300.000 USD) dari sektor swasta. Ini sama dengan hanya 20 persen dari pemerintahan Roh Moo-hyun 1.275.000.000.000 KRW (1,17 miliar USD), dan 44 persen dari pemerintahan Kim Dae-jung 582.900.000.000 KRW ( 534.800.000 USD ) dari total bantuan kepada Korea Utara (Yonhap, 2013).

Rekor tertinggi untuk bantuan kemanusiaan Korea Selatan ke Korea Utara pada tahun 2006 pada 298 miliar KRW (273.400.000 USD) , bantuan pemerintah dan sektor swasta dan terus tetap pada tingkat tinggi pada tahun 2007 dengan 289 miliar KRW (265.100.000 USD) pada tahun 2007 . Namun, dengan peluncuran pemerintah Lee Myung-bak pada tahun 2008 , turun menjadi 116 miliar KRW (106 juta USD), dan terus slide ke bawah merekam 67.100.000.000 KRW (61.600.000 USD) pada tahun 2009, 40.400.000.000 KRW

(37.060.000 USD) pada tahun 2010, 19,1 miliar KRW pada tahun 2011 (17,5 juta USD), dan 14,1 miliar KRW (12,9 juta USD) pada tahun 2012 (Yonhap, 2013) .

Sumber penurunan bantuan kemanusiaan dapat dikaitkan dengan hubungan antar Korea yang sulit menjalin kata sepakat serta diikuti oleh kematian seorang turis di Gunung Kumgang pada tahun 2008, jarak peluncuran roket dan uji coba nuklir kedua pada tahun 2009, dan Cheonan dan Pulau Yeonpyeong insiden pada tahun 2010. Dari tahun 1995 sampai 2012, jumlah total bantuan kemanusiaan ke Korea Utara dari pemerintah Korea Selatan adalah 1,48 triliun KRW (1,36 miliar USD) dan dari sektor swasta adalah 871.000.000.000 KRW (799.100.000 USD), atau setara dengan sekitar 2.347.000.000.000 KRW (2,15 miliar USD). Sementara itu, bantuan kemanusiaan internasional ke Korea Utara meningkat 30 persen pada 2012 dibandingkan tahun sebelumnya . Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), total bantuan ke Korea Utara pada tahun 2012 adalah 113 juta USD , sementara tahun sebelumnya mencapai 89.200.000 USD. Ini empat kali lipat dengan jumlah total, 24,4 juta USD 2010. Penurunan tajam terjadi juga pada saat hubungan antara kedua Korea tetap beku sejak Korea Utara menenggelamkan kapal perang Korea Selatan di dekat perbatasan Laut Kuning mereka pada Maret 2010 dan kemudian menyerang sebuah pulau perbatasan pada bulan November 2010. Tes dan roket peluncuran nuklir Pyongyang juga mempengaruhi hubungan mereka sehingga jumlah total bantuan yang disediakan Selatan Utara selama lima tahun dari Presiden Lee adalah ₩ 257.500.000.000, termasuk ₩ 155.100.000.000 bantuan sipil. Jumlah total hanya 20 persen dari bantuan yang dikirim selama presiden Lee dengan pendahulunya. (Yonhap, 2013)

Sembilan belas negara yang tergabung dalam upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara adalah Korea Selatan, Norwegia, Swiss, Kanada, Rusia, Brasil, dan Swedia. Pada tahun 2010 , hanya ada enam negara yang memberikan bantuan dan kemudian meningkat menjadi tujuh belas negara pada tahun 2011. The OCHA mengumumkan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan pada tahun 2012 difokuskan pada peningkatan pasokan pangan, gizi, dan memberikan dukungan pertanian (Yonhap, 2013) .

PBB menyerukan masyarakat internasional untuk mengesampingkan perbedaan politik dan meningkatkan pendanaan untuk membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang mengerikan

dari Korea Utara. Donor internasional disediakan hanya lebih dari sepertiga dari permintaan PBB yang sebesar \$ 218.000.000 pada tahun 2011. Karena kurangnya dana, maka badan internasional mengatakan hal itu tidak dapat secara efektif mengatasi kebutuhan kemanusiaan di sana dan pada akhirnya PBB masih terus menggalang dana dan masih kekurangan dana untuk membantu Korea Utara sebesar \$ 198.000.000 pada tahun 2012.



## BAB V

### PENUTUP

Perubahan kebijakan yang diambil Korea Utara dari kebijakan *Juche* pada masa Kim Il Sung dan kebijakan *Military First* pada masa Kim Jong Il terbukti telah membuat orientasi arah tujuan Negara ikut berubah. Pada saat kepemimpinan Kim Il Sung, Korea Utara lebih terbuka terhadap dunia internasional dengan menjalin hubungan yang erat dengan Korea Selatan baik dari sektor ekonomi maupun sosial politik. Selain itu, Korea Utara juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan Amerika, Cina serta masuk dalam anggota PBB. Dalam masa kepemimpinan Kim Jong Il selain mementingkan hubungan bilateral dengan Negara lain, juga melakukan program-program pembangunan ekonomi, antara lain menerapkan pembangunan ekonomi sosialis, melakukan program perkebunan kolektif, rencana pembangunan 5 tahun dan pembangunan ekonomi 7 tahun. Maka dari itu pada masa kepemimpinan Kim Il Sung, Korea Utara menjadi Negara yang kuat, baik dari sektor ekonomi maupun kerjasama internasional. Namun diakhir masa kepemimpinannya, Korea Utara dihadapkan pada keadaan yang sulit dimana Uni Soviet yang sejak lama menjadi mitra dagang utama dan pemberi bantuan terbesar terhadap Korea Utara mengalami keruntuhan. Selain runtuhnya Uni Soviet, Korea Utara juga mendapatkan tekanan dari perubahan struktur dunia internasional yang antara lain berkembangnya ekonomi Cina ke arah liberal, kemajuan Korea Selatan, dan perkembangan militer Jepang yang semakin kuat.

Bubaranya uni soviet pada tahun 1991 telah membuat Korea Utara kebingungan karena bantuan terbesar yang menyokong perekonomian Korea Utara adalah Uni Soviet, bahkan uni soviet

memberikan bantuan kepada Korea Utara melebihi kemampuan yang dimilikinya. Selain itu Uni Soviet merupakan mitra dagang terbesar dari Korea Utara, hal ini membuat Korea Utara harus merubah kebijakan luar negerinya yang berbasis ekonomi kearah militer. Selain hal tersebut, Uni Soviet merupakan pelindung utama dari Negara-negara komunis sehingga kalau sampai runtuh maka Negara komunis yang lain harus mengandalkan kekuatannya masing-masing untuk mempertahankan negaranya.

Selain bubarnya Uni Soviet, terbukanya ekonomi Cina kearah liberal juga turut menjadi tekanan bagi Korea Utara. Reformasi sistem politik dan ekonomi (*gaige kaifang*) yang dilakukan oleh Cina menuai keberhasilan dengan jalan mengundang modal asing untuk masuk kedalam negaranya dengan diberi banyak kemudahan. Hal ini telah membuat Cina menjadi Negara yang kuat di bidang ekonomi dan telah membuat *gap* (jarak) dengan Korea Utara sebagai sesama Negara komunis. Peningkatan ekonomi Cina ternyata telah membawa dampak buruk bagi kerjasama dengan Korea Utara yaitu pengurangan bantuan dan semakin berkurangnya kerjasama ekonomi dengan Korea Utara. Namun demikian Cina masih membutuhkan eksistensi dari Korea Utara yaitu untuk mengamati pergerakan Amerika Serikat di wilayah perbatasan antara China (*guard post*) dan digunakan sebagai *buffer zone* (zona penyangga) untuk membatasi infiltrasi liberalism. Maka dari itu Cina sampai sekarang masih memberikan berbagai bantuan kepada Korea Utara supaya tidak mengalami krisis berlebihan yang berujung kehancuran.

Korea Selatan yang sebagai musuh abadi dari Korea Utara juga ikut memberikan tekanan dari sektor ekonomi. Kemajuan Korea Selatan di sektor ekonomi juga telah membuat *gap* yang sangat jauh dengan Korea Utara, hal ini membuat Korea Utara semakin tertekan dan tidak bisa mengikuti laju perkembangannya karena terbatas dengan sumber daya yang ada. Perkembangan ekonomi Korea Selatan telah membawa Negara ini menjadi salah satu Negara dalam G20 pada tahun 2010 sehingga ini menjadi poin lebih dari Korea Selatan karena dengan posisinya ini maka apapun yang dikatakan oleh Korea Selatan akan lebih didengar oleh dunia internasional daripada Korea Utara. Dalam Sektor militer, Korea Selatan juga telah memberikan tekanan lebih kepada Korea Utara yaitu dengan mengalokasikan dana yang besar untuk militer serta melakukan kerjasama trilateral dengan Jepang dan Amerika. Kerjasama dalam bidang militer ini terkait dengan pengamanan wilayah, pertukaran

tentara dan latihan-latihan perang yang sering dilakukan sehingga kekuatan ketiga Negara yang bersatu ini memberikan tekanan yang berarti pada Korea Utara.

Tekanan selanjutnya datang dari Jepang, dengan peningkatan kekuatan militer yang dimiliki sudah pasti memberikan tekanan yang berarti bagi Korea Utara. Meskipun pada masa perang Asia Pasifik Jepang telah menandatangani perjanjian untuk tidak membangun kekuatan militer dan melarang untuk menggunakannya. Tetapi karena uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara ternyata telah merepotkan Jepang, dan pada akhirnya Pemerintah Jepang menganggap penting membangun kekuatan militer untuk membela diri dari serangan yang datang dari luar. Setelah pernyataan itu, Jepang mulai meningkatkan anggaran belanja militer secara besar-besaran dan juga menjalin kerjasama militer dengan Amerika. Strategi pertahanan baru yang dikembangkan oleh Amerika, Jepang dan Korea Selatan akan fokus dengan melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara dan mengintegrasikan persenjataan kedua negara (Jepang dan Korea Selatan) yang dirasa akan lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Kekuatan Militer yang meningkat tajam selain kekuatan ekonomi yang juga tinggi yang dimiliki oleh Jepang merupakan tekanan yang berarti bagi Korea Utara selama ini.

Tekanan dari dunia internasional yang terjadi ini memaksa Kim Jong Il sebagai pewaris tahta ayahnya untuk merubah kebijakan luar negerinya. Kebijakan yang berbasis ekonomi (*juche*) terbukti tidak mampu lagi menopang Negara dari kemerosotan ekonomi. Setelah menduduki jabatannya, Kim Jong Il segera menetapkan kebijakan yang berbasis militer (*military first*) dengan tujuan menyelamatkan Korea Utara dari ancaman kehancuran serta melindungi negaranya dari tekanan-tekanan dari dunia internasional.

Kekhawatiran akan jatuhnya rezim, akhirnya memaksanya Kim Jong Il untuk melakukan upaya mobilisasi internal dengan mengambil langkah-langkah penyelamatan rezim antara lain, *pertama*, mengubah arah dan kebijakan nasional dengan menyeimbangkan perbaikan ekonomi serta melindungi sistem sosialis dengan melakukan kampanye secara luas dan memberikan doktrin-doktrin politik. *Kedua*, pembangan di sektor ekonomi dengan jalan memperkuat pasokan bahan baku dengan prioritas utama petinggi Negara dan militer, meningkatkan ekonomi sipil dengan cara mengandalkan bantuan dari luar negeri. *Ketiga*, perbaikan struktur

nasional dengan cara menguasai partai penguasa (Partai Buruh), melakukan doktrinasi ideologi, menguasai sektor militer dan melakukan kontrol penuh terhadap kalangan elite pemerintahan. Jadi ketiga hal itulah yang dijadikan Kim Jong Il untuk mengontrol stabilitas politik dalam negeri sehingga keberlangsungan rezim akan tetap terjaga.

Disaat Kim Jong Il menjaga stabilitas politik dalam negeri, ternyata ekonomi Korea Utara semakin menurun dan dikatakan menjadi Negara *Fail State*. Selain ekonomi, krisis energi dan banyaknya gizi buruk karena krisis pangan membuat Kim Jong Il merasa tertekan serta dipaksa untuk memikirkan jalan keluarnya. Keterbatasan sumber daya dan ketergantungan Korea Utara terhadap pihak asing pada akhirnya memaksa Korea Utara untuk mencari sumber daya dari dunia internasional dengan cara melakukan ekstraksi eksternal. Hal ini dimungkinkan karena sumberdaya dalam negeri sudah tidak mampu lagi menopang kebutuhan didalam negeri. Ekstraksi eksternal yang dilakukan Korea Utara berupa merubah konstalasi internasional dari yang tadinya bersahabat menjadi berlawanan. Selain itu Korea Utara juga melakukan tindakan-tindakan offensive yaitu dengan tujuan agar mendapatkan perhatian dari dunia internasional yang selanjutnya terjadi perundingan atau pembicaraan perdamaian.

Didalam perundingan inilah Korea Utara akan meminta kompensasi atas redaman aksi yang dilakukan dengan meminta bantuan ekonomi dari dunia internasional. Bantuan ekonomi yang didapatkan oleh Korea Utara berupa bantuan pangan, bantuan kemanusiaan, bantuan obat-obatan dan bantuan bahan bakar minyak. Prioritas bantuan dari dunia internasional ini akan diberikan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang selanjutnya kepada militer dan setelah itu baru diberikan kepada rakyat Korea Utara. Dengan mengandalkan bantuan luar negeri ini maka Korea Utara bisa mengatasi masalah ekonomi, kemiskinan, krisis energi yang terjadi didalam negeri. Dengan demikian maka ketidakstabilan politik dalam negeri dan kemerosotan ekonomi yang dikawatirkan bisa mengancam keberlangsungan rezim Kim Jong Il bisa diatasi dengan melakukan mobilisasi internal dan ekstraksi internal.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa perubahan kebijakan dari *juche ke military first* adalah upaya untuk menyelamatkan rezim berkuasa dibawah tekanan internal dan tekanan dunia internasional. Untuk mengatasi gejala politik di dalam negeri

Kim Jong Il mengguakan kekuatan militer dan pemerintah untuk meredam segala aksi yang dilakukan oleh rakyatnya. Selain itu, untuk mengatasi masalah keterpurukan ekonomi maka jalan yang diambil oleh Kim Jong Il adalah mencari sumber daya dari luar negeri yang berupa bantuan ekonomi. Kedua jalan ini adalah upaya Kim Jong Il untuk menjaga keberlangsungan rezimnya dari tekanan internal dan eksternal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Academia. (2013). *Korea Utara*. Retrieved october 41, 2013, from academia.edu: [http://www.academia.edu/4438410/Draft\\_korut](http://www.academia.edu/4438410/Draft_korut)
- Academia. (2014). *Kelahiran Uni Soviet*. Retrieved september 6, 2014, from academia.edu: [https://www.academia.edu/6428087/Kelahiran\\_Uni\\_Soviet](https://www.academia.edu/6428087/Kelahiran_Uni_Soviet)
- Academia. (2014). *Pengaruh Kepemilikan Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Dengan Jepang*. Retrieved september 6, 2014, from academia.edu: [https://www.academia.edu/4964279/Pengaruh\\_Kepemilikan\\_Nuklir\\_Korea\\_Utara\\_Terhadap\\_Hubungan\\_Dengan\\_Jepang](https://www.academia.edu/4964279/Pengaruh_Kepemilikan_Nuklir_Korea_Utara_Terhadap_Hubungan_Dengan_Jepang)
- Academia. (n.d.). *Pengaruh Ideologi Liberalisme Terhadap Perekonomian Negara Sosialis*. Retrieved september 6, 2014, from academia.edu: [https://www.academia.edu/3660217/PENGARUH\\_IDEOLOGI\\_LIBERALISME\\_TERHADAP\\_PEREKONOMIAN\\_NEGARA\\_SOSIALIS](https://www.academia.edu/3660217/PENGARUH_IDEOLOGI_LIBERALISME_TERHADAP_PEREKONOMIAN_NEGARA_SOSIALIS)
- Academia. (n.d.). *Sesuaikan Democratic Peace Dalam Krisis Korea*. Retrieved september 6, 2014, from acadenia.edu: [https://www.academia.edu/6566320/Sesuaikah\\_Democratic\\_Peace\\_dalam\\_Krisis\\_Korea](https://www.academia.edu/6566320/Sesuaikah_Democratic_Peace_dalam_Krisis_Korea)
- Admin. (2012, April 12). *Kekuatan Militer Korea Utara*. Retrieved Oktober 16, 2017, from artileri.org: <http://www.artileri.org/2012/04/kekuatan-militer-korea-utara.html>
- Admin. (n.d.). *Bank of China Group, "Is Deflation Made in China"*.

- Retrieved from [www.tdctrade.com](http://www.tdctrade.com): [www.tdctrade.com/econforum/boc/boc021001.htm](http://www.tdctrade.com/econforum/boc/boc021001.htm)
- Affairs, B. o. (2017, Januari 25). *U.S. Relations With the Republic of Korea*. Retrieved september 5, 2017, from [state.gov](http://state.gov): <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2800.htm>
- Agency, D. I. (1995, Desember 12). *Defense Intelligence Agency*. Retrieved September 30, 2016, from Worsening Food Situation: [http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101\\_tintc.html](http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101_tintc.html)
- Agency, D. I. (2013, Desember 12). *Military Forces*. Retrieved September 30, 2016, from [fas.org](http://www.fas.org): [http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101\\_chp4.html](http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101_chp4.html)
- Agency, D. I. (2013, Januari 2). *NATIONAL GOALS*. Retrieved September 30, 2017, from [fas.org](http://www.fas.org): [http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms/knfms\\_chp1.html](http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms/knfms_chp1.html)
- Agency, D. I. (2015, Desember 01). *Increasing Internal Pressures*. Retrieved october 30, 2016, from [fas.org](http://www.fas.org): [http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101\\_chp2.html](http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101_chp2.html)
- Aminuddin, C. (2013, maret 25). *Korsel dan Amerika Teken Kerja Sama Militer Baru*. Retrieved september 7, 2017, from [tempo.co](http://www.tempo.co): <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/25/118469298/Korsel-dan-Amerika-Teken-Kerja-Sama-Militer-Baru>
- Amstrong, C. K. (2009). *Juche and North Korea's Global Aspirations*. Washington DC: Woodrow Wilson International Documentation Project.
- Apdforum. (2013, mei 23). *Japan Korean Talk*. Retrieved september 7, 2014, from [apdforum.com](http://apdforum.com): <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/05/23/japan-korea-talk>
- BBC. (2008, Oktober 08). *North Korea*. Retrieved April 09, 2013, from <http://www.bbc.co.uk/>: [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/10/081006\\_nkorea.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/10/081006_nkorea.shtml)
- Beal, T. (2005). *North Korea The Struggle Against American Power*. London: Pluto Press.
- BI. (2013). *Laporan Tahunan Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BI. (2013). *Perekonomian Global*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Charles Kartman, S. S. (2009). *North Korea Inside Out: The Case for Economic Engagement*. San Diego: Asia Society Center on U.S.-China Relations and The University of California Institute on Global Conflict and Cooperation.
- Chellaney, B. (2017, Januari 24). *Berlin, Lahirnya Asia Baru*. Retrieved september 20, 2017, from unisosdem.org: [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=11444&coid=1&caid=27&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11444&coid=1&caid=27&gid=2)
- Chipman, J. (2014, February 05). *Military Balance 2014 Press Statement* . Retrieved september 7, 2017, from iiss.org: <http://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2014-dd03/february-0abc/military-balance-2014-press-statement-52d7>
- Choney, S. (2013, Maret 09). *North Korea's Internet? What Internet? For most, online access doesn't exist*. Retrieved September 28, 2017, from [www.nbcnews.com/technology/north-koreas-internet-what-internet-most-online-access-doesnt-exist-1C9143426](http://www.nbcnews.com/technology/north-koreas-internet-what-internet-most-online-access-doesnt-exist-1C9143426)
- Defense, D. O. (1997). *North Korea Country Handbook*. Amerika: United States of Amerika.
- Fatkurrohman. (2010). *Isu dan Realita Konflik Kawasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fkpmaritim. (2014). *modernisasi militer asia tenggara destabilitas keamanan regional*. Retrieved september 6, 2014, from <http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-destabilisasi-keamanan-regional/>
- French, P. (2007). *North Korea: The Paranoid Peninsula*. United Kingdom: Zed Book, Ltd.
- Gause, K. E. (2011). *North Korea Under Kim Chong-Il ; Power, Politics, and Prospects for Change*. Amerika: ABC-CLIO, LLC.
- Guardian. (2012). Retrieved desember 27, 2012, from [guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk): <http://www.guardian.co.uk>
- Hecker, S. S. (2004). *Report of "Visit to the Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre in North Korea*. California: University of California.
- Hendarsah, A. (2007). *11 MAcn Asia Musuh Amerika*. Yogyakarta:

Galang Press.

- Hodge, H. T. (2003). *North Korea's Military Strategy*. Retrieved januari 23, 2014, from [strategicstudiesinstitute.army.mil: http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/03spring/hodge.pdf](http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/03spring/hodge.pdf)
- Indonesia, S. N. (2014). Retrieved september 6, 2014, from [setneg.go.id: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6765](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6765)
- Institute, K. (2012). *White Paper on Human Right in North Korea*. North Korea: Korea Institute for National Unification.
- Intellectuالتakeout. (2014). *institution matter real capita GDP north and south korea*. Retrieved september 6, 2014, from [intellectuالتakeout.org: http://www.intellectuالتakeout.org/library/chart-graph/institutions-matter-real-capita-gdp-north-and-south-korea](http://www.intellectuالتakeout.org/library/chart-graph/institutions-matter-real-capita-gdp-north-and-south-korea)
- INTELLIGENCE, O. O. (2006). *Statement by the Office of the Director of National Intellegence on the North Korea Nuclear Test*. Washington DC: OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE .
- Joo, S.-H., & Kwak, T.-H. (2007). *North Korea's Second Nuclear Crisis and Northeast Asian Security*. United States: Ashgate Publishing Limited.
- Journals, L. (2014, Februari 12). *Tentang Korea Selatan*. Retrieved september 6, 2017, from [kbriseoul.kr: http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/tentang](http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/tentang)
- KBS. (2013). Retrieved mei 22, 2013, from [world.kbs.co.kr: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02c.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02c.htm)
- KBS. (2013). Retrieved mei 22, 2013, from [world.kbs.co.kr: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02e.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02e.htm)
- KBS. (2013). Retrieved mei 22, 2013, from [world.kbs.co.kr: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02e.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02e.htm) T
- KBS. (2013). Retrieved november 29, 2013, from [world.kbs.co.kr: http://world.kbs.co.kr/](http://world.kbs.co.kr/)

- KBS. (2013). *north korea nuclear*. Retrieved mei 22, 2013, from world.kbs.co.k: [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02d.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02d.htm)
- KBS. (2013). *North Korea Nuclear*. Retrieved mei 22, 2013, from world.kbs.co.kr: [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02d.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02d.htm)
- Kile, S. N. (2012). *world nuclear force*. oxford: oxford university press.
- Kim, S. H. (2011). *Terence Roehrig and Bernhard Seliger. The Survival of North Korea: Essays on Strategy, Economics and Internasional Relation*. North Carolina: Mc. Farland and Company.
- Kim, S. H., Roehrig, T., & Seliger, B. (2011). *The Survival of North Korea: Essays on Strategy, Economics and International Relation*. North Carolina: Mc Farland.
- Kompas. (2013, april 11). *Mantan Agen Korut Ungkap Cara Kerja Rezimnya*. Retrieved october 25, 2013, from lipsus.kompas.com: <http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2013/04/11/14541913/Mantan.Agen.Korut.Ungkap.Cara.Kerja.Rezimnya>
- Kompasiana. (2010, november 30). *Kepentingan Cina Terhadap Eksistensi Korea Utara*. Retrieved september 6, 2014, from hamkan.kompasiana.com: <http://hankam.kompasiana.com/2010/11/30/kepentingan-cina-terhadap-eksistensi-korea-utara-321868.html>
- Kompasiana. (2014, mei 2). *Proyeksi ekonomi Indonesia*. Retrieved september 6, 2014, from ekonomi.kompasiana.com: <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/05/02/proyeksi-ekonomi-indonesia-650777.html>
- KoreaInstitute. (2012). *Korea Institute For National Unification White Paper on Human Right in North Korea*. Korea Institute for National Unification.
- Lim, J.-C. (2009). *Kim Jong Il's Leadership of Nort Korea*. New York: Routledge.
- Lind, D. B. (2010). *Pyongyang's Survival Strategy. International Security*, 44-74.
- Mardhiansyah, W. (n.d.). *Aliansi Militer Amerika Serikat*. Retrieved september 7, 2014, from academia.edu: <https://www.academia.edu>

edu/4802902/Whisnu\_Mardiansyah\_1110113000076\_  
Aliansi\_Militer\_Amerika\_Serikat

- Mathews, D. B. (1998). *Military Modernization In The People's Republic Of China: Implications For The United States And The Region*. Alabama: Maxwell Air Force Base.
- Michael Mastanduno, D. A. (1989). *Toward a Realist Theory of State Action*. International Studies Quarterly.
- Michishita, N. (2010). *North Korea's Military-Diplomatic Campaigns (1966-2008)*. Routledge.
- Moenir, H. D. (2010, Februari 23). *Dampak Kemajuan Metodologi*. Retrieved september 6, 2014, from lib.ui.ac.id: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131618-T%2027561-Dampak%20kemajuan-Metodologi.pdf>
- Myong-Hyun, G. (2013, Juni 09). *Economic Improvement in North Korea*. *Thee Asian Institute for Policy Studies*. Retrieved february 6, 2017, from en.asaninst.org: <http://en.asaninst.org/issue-brief-no-58-economic-improvement-in-north-korea/>
- Nikitin, M. B. (2013). *North Korea's Nuclear Weapons: Technical Issues CRS Report for Congress*. South Korea: Congressional Research Service .
- Nikitin, M. E. (2014, April 02). *Foreign Assistance to North Korea Congressional Research Service*. Retrieved february 7, 2017, from [www.fas.org](http://www.fas.org): <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40095.pdf>
- NKAG. (1999). *Report to The Speaker U.S. House of Representative*. United States: North Korea Advisory Group (NKAG).
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pinkston., D. A. (2003). *Domestic Politics and Stakeholders in the North Korean Missile Development Program*. *The Nonproliferation Review*, 1-23.
- Ramelan, P. (2013, Oktober 13). *Potensi Konflik Militer di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea*. Retrieved september 4, 2017, from [ramalanintelijen.net](http://ramalanintelijen.net): <http://ramalanintelijen.net/?p=7564>
- Seung-Ho Joo, D. (2007). *North Korea's Second Nuclear Crisis and*

- Northeast Asian Security*. United States: Ashgate Publishing Limited.
- Sinaga, O. (2014, february). ALIANSI JEPANG-AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI PEMBANGUNAN KAPABILITAS MILITER CHINA DAN KOREA UTARA. Retrieved september 7, 2017, from pustaka.unpad.ac.id: [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/alianси\\_jepang\\_amerika\\_serikat.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/alianси_jepang_amerika_serikat.pdf)
- Snyder, S. (2001). North Korea's Challenge of Regime Survival: Internal Problems and Implications for the Future. *University of British Columbia*, 73, 517-518.
- Snyder, S. (2001). North Korea's Challenge of Regime Survival: Internal Problems and Implications for the Future. *University of British Columbia*, 73, 529.
- State, U. D. (2016, Oktober 16). U.S. Relations With North Korea. Retrieved Juni 23, 2017, from [www.state.gov](http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm): <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm>
- State, U. D. (2016, Oktober 16). U.S. Relations With North Korea. Retrieved Juni 23, 2017, from [www.state.gov](http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm): <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm>
- VOA. (2012, juni 13). UN: N.Korea Aid Efforts 'Seriously Underfunded'. Retrieved february 6, 2017, from [english.chosun.com](http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/06/13/2012061300558.html): [http://english.chosun.com/site/data/html\\_dir/2012/06/13/2012061300558.html](http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/06/13/2012061300558.html)
- voaindonesia.com. (n.d.). jepang korea selatan rencanakan kerjasama militer yang lebih erat. Retrieved september 7, 2014, from [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com/content/jepang-korea-selatan-rencanakan-kerjasama-militer-yang-lebih-erat/88385.html): <http://www.voaindonesia.com/content/jepang-korea-selatan-rencanakan-kerjasama-militer-yang-lebih-erat/88385.html>
- world.kbs, c. (2013). korea nuclear. Retrieved mei 22, 2013, from [world.kbs.co.kr](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02d.htm): [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02d.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02d.htm)
- world.kbs.co.kr. (2013). North Korea Nuclear. Retrieved mei 22, 2013, from [world.kbs.co.kr](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02b.htm): [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/general\\_02b.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_02b.htm)
- www.bbc.co.uk. (2012). Retrieved desember 27, 2012, from [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17520156): <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17520156>

- www.fas.org. (2013). Retrieved october 30, 2013, from www.fas.org:  
<http://www.fas.org/>
- www.fas.org. (2013). Retrieved october 30, 2013, from www.fas.org:  
[http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101\\_chp4.html](http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms95/1510-101_chp4.html)
- www.fas.org. (2013). Retrieved october 30, 2013, from www.fas.org:  
[http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms/knfms\\_chp1.html](http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms/knfms_chp1.html)
- Yilmaz, C. K. (2006). Can China help Lower World Inflation. *Emerging Market Finance and Trade*, 42, 93.
- Yonhap. (2013, Agustus 18). *Archive for the '2012 aid from South Korea' Category*. Retrieved Juni 21, 2017, from www.nkeconwatch.com:  
<http://www.nkeconwatch.com/category/international-aid/2012-aid-from-south-korea/>
- Yonhapnews. (2014). *Aid to North Korea by Years*. Retrieved february 6, 2014, from english.yonhapnews.co.kr: <http://english.yonhapnews.co.kr/graphic/1001000000.html?cid=GYH20130731000300341>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Timeline Krisis Nuklir Korea Utara

Tahun	Pemimpin	Aksi
1996	Kim Jong Il	Menghadapi negara yang hampir runtuh karena bencana kelaparan dan ekonomi yang terpuruk, Kim mengadopsi kebijakan <i>Military-First</i> untuk memperkuat negara dan rezimnya. Pada skala nasional, kebijakan ini menghasilkan tingkat pertumbuhan yang baik untuk negara ini sejak tahun 1996. Selain itu implementasi dari praktik ekonomi pasar bernafaskan sosialis membuatnya tidak lagi bergantung pada bantuan asing dalam hal penyediaan makanan.
1998	Kim Jong Il	Uji Coba rudal jarak jauh Taepodong-1 melewati Jepang
1999	Kim Jong Il	Korea Utara menghentikan uji coba rudal jarak jauh
<b>Era-2000-an</b>		

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
2002	Kim Jong Il	Korea Utara keluar dari NPT karena merasa tidak nyaman dengan sikap AS yang memasukkan Korea Utara sebagai salah satu negara poros setan (Axis of Evil).
2003	Kim Jong Il	Enam negara membicarakan program nuklir korea utara
2005	Kim Jong Il	Pemerintah Kim Jong Il mengakui telah memiliki senjata nuklir sejak kerangka persetujuan antara Korea Utara dan Amerika tentang yang didesain untuk membekukan dan akhirnya membongkar proyek senjata nuklir Korea Utara, untuk kemudian diganti dengan bantuan untuk memproduksi dua pembangkit tenaga nuklir. Rezim Kim beralasan, proyek rahasia tersebut diperlukan untuk tujuan keamanan.
2005	Kim Jong Il	Pembicaraan enam negara terhenti
Juli 2006	Kim Jong Il	Korea Utara uji coba tujuh rudal, termasuk rudal jarak jauh Taepodong-2
10 Januari, 2006	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il melakukan perjalanan ke Cina dengan kereta api khusus anti peluru.
11 April, 2006	Kim Jong Il	Pertemuan hari kedua yang ditujukan untuk membujuk Korea Utara menghentikan program nuklirnya sedang berlangsung di Tokyo. Pembicaraan enam pihak yang diikuti oleh kedua negara Korea, AS, Cina, Jepang dan Rusia, terhenti sejak putaran kelima November lalu di ibukota Cina, Beijing.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
06 April, 2006	Kim Jong Il	Korut hadiri pertemuan Tokyo. Forum enam negara yang terdiri dari Jepang, Cina, Rusia, dua Korea dan Amerika Serikat bertujuan mendorong pulihnya perundingan atas program nuklir Korea Utara.  Perundingan itu sendiri berhenti sejak November 2005.
11 Mei, 2006	Kim Jong Il	Program Pangan Dunia, WFP sepakat untuk melanjutkan penyaluran bantuan ke Korea Utara, setelah mencapai persetujuan dengan pihak berwenang di Pyongyang.
21 Juni, 2006	Kim Jong Il	Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara sedang memindahkan peluru kendali jarak jauhnya, yang mampu menjangkau wilayah Amerika.
04 Juli, 2006	Kim Jong Il	Korea Utara mengujicoba sejumlah rudal, termasuk rudal jarak jauh yang mungkin bisa menjangkau daratan Amerika Serikat, dalam rentang waktu beberapa jam.
05 Juli, 2006	Kim Jong Il	Korea Utara menguji coba setidaknya 6 peluru kendali, termasuk peluru kendali Taepodong-2, di tengah berbagai peringatan dari beberapa negara.
16 Juli, 2006	Kim Jong Il	Korea Utara menolak keras resolusi PBB yang mengutuk uji coba peluru kendali dan akan tetap menyimpan senjata.
19 Juli, 2006	Kim Jong Il	Korea Utara menyatakan akan menghentikan program penyatuan lagi keluarga lintas batas dengan Selatan sebagai balasan atas keputusan Seoul untuk menghentikan pengiriman bantuan makanan.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
27 Juli, 2006	Kim Jong Il	Harapan memudar bagi kemajuan perundingan dengan Korea Utara tentang krisis nuklir di sela-sela forum keamanan regional di Malaysia.
07 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Angkatan Bersenjata Korea Selatan menyatakan lima tentara Korea Utara menyeberang masuk ke bagian selatan dari zona penyangga yang memisahkan dua negara.
11 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Orang nomor dua paling berkuasa di Korea Utara mengancam bahwa negaranya akan melakukan uji coba nuklir lebih lanjut apabila Amerika Serikat mempertahankan kebijakannya yang “bermusuhan”.
11 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Presiden Bush kepada para wartawan di Washington mengatakan bahwa pihaknya masih berniat mencari solusi diplomatis dan tidak ada rencana melancarkan serangan. Namun dia mengatakan AS “membuka semua opsi untuk mempertahankan negara-negara sahabat di kawasan”.
25 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan Korea Utara sebaiknya tidak dipojokkan jika dunia internasional ingin mengekang program senjata nuklirnya.
22 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Korea Utara akan melakukan uji coba senjata nuklir yang kedua jika “diusik” oleh Amerika Serikat, kata beberapa laporan di media massa Korea Selatan dan Jepang.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
17 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Korea Utara mengatakan sanksi PBB yang dijatuhkan setelah Pyongyang melakukan ujicoba bom nuklir adalah pernyataan perang, kata media pemerintah. Pyongyang juga memperingatkan dengan “tanpa ampun” akan menghantam negara-negara lain yang mengancam kedaulatannya.
15 Oktober, 2006	Kim Jong Il	Duta besar Korea Utara di PBB Pak Gil Yon menuduh para anggota dewan bertindak seperti “preman” dan segala bentuk tekanan oleh AS akan dilihat sebagai “deklarai perang”.
23 Februari, 2007	Kim Jong Il	Kepala badan pengawas tenaga nuklir PBB diundang ke Korea Utara untuk membicarakan program nuklir negara itu. Korea Utara awal bulan ini setuju untuk mengambil langkah awal untuk meniggalkan program senjata nuklir dalam perundingan enam negara awal bulan ini. Berdasarkan kesepakatan ini, Pyongyang berjanji untuk menutup reaktor nuklir Yongbyon dalam waktu 60 hari dengan imbalan bantuan bahan bakar.
16 Februari, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara merayakan ulang tahun pemimpin mereka, Kim Jong-il yang ke-65 tahun, di tengah dicapainya kemajuan dalam rencana untuk melucuti program nuklir Pyongyang.
11 Februari, 2007	Kim Jong Il	Perundingan membahas program nuklir Korea Utara menghadapi masalah karena tuntutan “berlebihan” Pyongyang terhadap energi.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
13 Maret, 2007	Kim Jong Il	Ketua badan nuklir PBB berada di Korea Utara untuk membicarakan langkah menghentikan program nuklir Pyongyang. Berdasarkan perjanjian yang diraih bulan lalu, Korea Utara sepakat untuk “menghentikan dan menyetel” reaktor nuklir satu satunya dalam waktu enam hari, dengan imbalan bantuan.
16 Juni, 2007	Kim Jong Il	Kantor berita resmi Korea Utara mengatakan pemerintah meminta Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, untuk mengirimkan para pemeriksa guna membicarakan penutupan satu reaktor nuklir di negara itu.
12 Juni, 2007	Kim Jong Il	Menurut para pejabat Amerika Serikat, Rusia bekerja sama dengan Amerika guna mentransfer 25 juta dolar dana Korea Utara yang sekarang ini dibekukan di sebuah bank di Macau. Korea Utara bersikeras bahwa mereka harus menerima dulu dana tersebut sebelum menutup reaktor nuklir utama Yongbyon
25 Mei, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara menembakkan beberapa rudal jarak pendek ke arah perairan Laut Jepang, lapor media berita di kawasan.
03 Juli, 2007	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong il menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian perlucutan nuklir untuk memenuhi janjinya.
19 Juni, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara melakukan uji coba peluru kendali jarak pendek ke arah Laut Jepang, menurut sejumlah laporan di kawasan tersebut.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
03 September, 2007	Kim Jong Il	Pemerintah Korea Utara menyatakan Amerika Serikat setuju menghapus negara itu dari daftar negara yang mendukung terorisme.
18 Juli, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara telah menutup kelima fasilitas nuklir di kompleks Yongbyon, kata kepala Badan Energi Atom PBB Mohamed El Baradei.
03 Oktober, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara setuju untuk memberi rincian penuh dari program nuklir mereka dan mematikan reaktor utama di Yongbyon sebelum 31 Desember, kata para pejabat Cina.
03 Oktober, 2007	Kim Jong Il	Para pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara mengakhiri pembicaraan bersejarah selama dua hari di Pyongyang dengan keputusan untuk tidak memperpanjang pertemuan puncak ini. "Selatan dan Utara berpandangan sama bahwa mereka harus mengakhiri gencatan senjata saat ini dan menyusun sistem perdamaian permanen," kata deklarasi tersebut.
16 November, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara dan Selatan menyepakati jalur kereta barang lintas perbatasan yang akan beroperasi rutin mulai tanggal 11 Desember.
27 November, 2007	Kim Jong Il	Menteri Pertahanan Korea Selatan mengadakan perundingan langka dengan Menhan Korea Utara di Pyongyang untuk mencoba meredakan ketegangan perbatasan yang dipersengketakan. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperluas kerjasama ekonomi bilateral.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
20 Desember, 2007	Kim Jong Il	Presiden terpilih Korea Selatan Lee Myung-bak menyatakan, dia akan menekan Korea Utara harus menanggalkan senjata nuklir.
31 Desember, 2007	Kim Jong Il	Korea Utara gagal memenuhi batas waktu untuk memberikan rincian program nuklirnya pada akhir tahun 2007.
28 Maret, 2008	Kim Jong Il	Korea Utara menembakkan peluru kendali jarak pendek dari pantai barat negara itu sebagai uji coba.
03 April, 2008	Kim Jong Il	Korea Utara mengatakan negara itu akan menghentikan semua dialog dengan Korea Selatan. Pernyataan ini merupakan pertanda lain bahwa hubungan antara kedua Korea semakin buruk.
09 April, 2008	Kim Jong Il	Kesepakatan telah dicapai tentang apa yang akan diterima Korea Utara dari Amerika Serikat karena negara itu mengungkapkan program nuklirnya, kata para perunding masalah nuklir ini.
07 Juni, 2008	Kim Jong Il	Jepang dan Korea Utara memulai pembicaraan di Beijing untuk menyelesaikan sengketa bilateral setelah sembilan bulan terhenti.
26 Juni, 2008	Kim Jong Il	Pejabat Korea Utara telah menyerahkan berkas deklarasi yang ditunggu-tunggu soal rincian program nuklirnya kepada Cina.
27 Juni, 2008	Kim Jong Il	Media Korea Selatan melaporkan Korea Utara menghancurkan menara pendingin reaktor nuklir Yongbyon sebagai langkah simbolis untuk menunjukkan keinginannya melakukan perlucutan senjata.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
10 Juli, 2008	Kim Jong Il	Para diplomat senior sedang bertemu di Beijing untuk membicarakan langkah berikutnya dalam misi yang sudah berjalan panjang untuk menghentikan ambisi nuklir Korea Utara.
09 September, 2008	Kim Jong Il	Jago olah raga bela diri taekwondo mengaku disewa agen Korea Utara untuk membunuh presiden Korea Selatan.
10 September, 2008	Kim Jong Il	Seorang pejabat Korea Selatan dikutip mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-il sakit, satu hari setelah dia absen dari parade.
11 September, 2008	Kim Jong Il	Korut bangun 'situs rudal baru' Korea Utara dilaporkan hampir merampungkan lokasi peluncuran kedua untuk peluru kendali jarak jauh.
24 September, 2008	Kim Jong Il	Badan pengawas nuklir PBB mengatakan pihaknya telah mencopot segel dan kamera-kamera pengawas di kompleks pembangkit nuklir utama Korea Utara atas permintaan Pyongyang.
06 Oktober, 2008	Kim Jong Il	Korea Utara membeli senjata senilai \$65 juta dalam lima tahun terakhir ditengah kekurangan pangan, menurut seorang anggota parlemen Korea Selatan.
09 Oktober, 2008	Kim Jong Il	North Korea sedang mempersiapkan diri untuk meluncurkan 10 rudak jarak pendek, sehingga militer Korea Selatan disiagakan.  Menurut laporan media di Korea Selatan, Korea Utara diduga menembakkan sedikitnya satu rudal dua hari lalu.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
12 November, 2008	Kim Jong Il	<p>Korea Utara akan menutup perbatasan darat dengan Korea Selatan 1 Desember di tengah meningkatnya hubungan kedua negara.</p> <p>Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa tentara Korea Utara telah memberitahu Korea Selatan “untuk dengan tegas membatasi dan memutuskan perjalanan darat melalui Garis Demarkasi Militer.</p> <p>Menurut kantor berita tersebut, keputusan diambil karena adanya “sikap konfrontasi dari Korea Selatan “ yang sudah melewati tahap bahaya.</p>
20 November, 2008	Kim Jong Il	<p>Para pegiat Koera Selatan telah mengirim selebaran propaganda ke Korea Utara dan mengabaikan ancaman dari Korea Utara bahwa hal itu bisa merusak hubungan kedua negara.</p>
01 Desember, 2008	Kim Jong Il	<p>Korea Utara mulai menerapkan pengetatan perbatasan dengan Korea Selatan karena hal yang mereka sebut sebagai konfrontasi tak henti-hentinya dari Seoul.</p>
30 Januari, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara menyatakan negara itu membatalkan semua kesepakatan militer dan politik dengan Selatan dengan alasan Seoul berniat jahat.</p>
03 Februari, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara sepertinya mempersiapkan uji coba peluru kendali jarak jauh yang dapat mencapai Amerika Serikat.</p>
09 Februari, 2009	Kim Jong Il	<p>Komandan pasukan Amerika di Korea Selatan mengatakan aksi militer kemungkinan akan diambil jika Korut menguji coba peluru kendali jarak jauh.</p>

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
24 Februari, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara telah mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran roket yang akan membawa satelit komunikasi tanpa memberi indikasi tentang tanggalnya..
02 Maret, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara dan Komando PBB pimpinan Amerika Serikat telah membuka pertemuan untuk meredakan ketegangan di perbatasan Korea. Pertemuan ini merupakan yang pertama kalinya sejak 6 tahun lalu. Pembicaraan akan dilakukan di desa perbatasan, Panmunjom, 2 hari setelah Korea Utara memperingatkan tentara AS untuk menghentikan provokasi di perbatasan.
08 Maret, 2009	Kim Jong Il	Warga Korea Utara memberi suara dalam pemilihan umum parlemen yang menurut para pengamat bisa menjadi petunjuk mengenai suksesi di negara itu.
09 Maret, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara mengatakan telah menempatkan militer dalam siaga tempur menjelang latihan militer besar Amerika Serikat dan Korea Selatan.
18 Maret, 2009	Kim Jong Il	Amerika Serikat mengatakan Korea Utara menolak menerima bantuan makanan yang disediakan pihak internasional.
27 Maret, 2009	Kim Jong Il	Jepang sedang mengembangkan pencegat rudal untuk menghancurkan bagian roket Korea Utara yang mungkin jatuh di wilayahnya.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
05 April, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara meluncurkan roket, meski ada seruan internasional agar tidak melakukan peluncuran. Roket itu diluncurkan dari kompleks situs peluncuran Musudan-ri di bagian timur laut Korea Utara sekitar pukul 0230 GMT atau 0930 WIB.
05 April, 2009	Kim Jong Il	Roket Korea Utara gagal mengantar satelit ke orbit, kata pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan, beberapa jam setelah Pyongyang menyatakannya sukses. Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan mencurigai peluncuran itu kedok ujicoba misil jarak jauh.
05 April, 2009	Kim Jong Il	Dewan Keamanan PBB melaksanakan sidang darurat untuk membahas peluncuran roket Korea Utara yang menimbulkan kontroversi.
06 April, 2009	Kim Jong Il	Sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas peluncuran roket Korea Utara berakhir tanpa kesepakatan.
07 April, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara menuduh Korea Selatan meracuni pemain sepakbola mereka dengan mencampuri makanan menjelang pertandingan penyisihan Piala Dunia pekan lalu.
08 April, 2009	Kim Jong Il	Seorang diplomat Korea Utara memperingatkan langkah keras akan menyusul jika PBB memutuskan tindakan atas negara itu setelah meluncurkan satelit.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
10 April, 2009	Kim Jong Il	Jepang memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi kepada Korea Utara selama satu tahun ke depan. Sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran roket pada hari Minggu.
13 April, 2009	Kim Jong Il	Dewan Keamanan PBB secara bulat mengecam peluncuran sebuah roket jarak jauh oleh Korea Utara.
14 April, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara mengatakan akan memboikot pembicaraan soal program nuklir negara itu dalam sebuah protes terhadap kritik PBB yang mengecam peluncuran roket negara itu baru-baru ini.
14 April, 2009	Kim Jong Il	Rusia dan Cina memotori seruan internasional kepada Korea Utara agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk meninggalkan perundingan perlucutan senjata nuklir.
15 April, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara menghentikan kerjasama dengan Inspektor nuklir PBB dan memerintahkan mereka untuk keluar dari negara tersebut, seperti disampaikan oleh Badan Atom Energi Internasional (IAEA).</p> <p>Pyongyang mengatakan kepada IAEA untuk memindahkan segel dan peralatan dari reaktor Yongbyon dan mengatakan akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklir tersebut, seperti disampaikan oleh pengamat PBB.</p> <p>Gedung Putih meminta Pyongyang untuk menghentikan “tindakan provokasi” itu. Rusia dan Cina juga sudah meminta agar langkah itu dipertimbangkan kembali.</p>

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
16 April, 2009	Kim Jong Il	<p>Jepang dan Amerika Serikat telah menyerahkan kepada PBB nama-nama perusahaan Korea Utara yang diyakini ada hubungan dengan program senjata nuklir.</p> <p>Daftar perusahaan itu telah dikirim ke komite sanksi Dewan Keamanan PBB untuk dipertimbangkan.</p> <p>Langkah itu untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara menyusul peluncuran roket jarak jauh tanggal 5 April.</p>
22 April, 2009	Kim Jong Il	Awal bulan ini Chang Song-taek diangkat sebagai anggota Komisi Keamanan Nasional Korea Utara (NDC).
23 April, 2009	Kim Jong Il	Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tiba di Korea Utara dimana dia diperkirakan mendesak para pemimpin negara itu untuk kembali berunding mengenai perlucutan senjata nuklir.
29 April, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara mengancam akan melakukan ujicoba rudal balistik sebagai tanggapan atas kecaman keras PBB terhadap peluncuran roket negara tersebut awal bulan ini.</p> <p>Departemen Luar Negeri Korea Utara mengemukakan negara komunis itu akan terpaksa melakukan apa yang disebutnya langkah-langkah untuk membela diri kecuali kalau Dewan Keamanan segera meminta maaf.</p>
25 Mei, 2009	Kim Jong Il	Masyarakat internasional mengeluarkan kecaman keras setelah Pyongyang menyatakan telah berhasil melakukan uji coba nuklir di bawah tanah.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
26 Mei, 2009	Kim Jong Il	Media Korea Selatan melaporkan Korea Utara menembakkan dua rudal beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklirnya. Setidaknya tiga uji coba rudal juga dilakukan bersamaan dengan uji coba nuklir pada hari Senin (26/5). Menurut Yonhap peluncuran rudal hari Selasa (27/5) antara lain berupa satu rudal darat ke laut dan satu rudal darat ke udara.
27 Mei, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara memperingatkan akan adanya aksi militer setelah Korea Selatan ikut dalam latihan antiproliferasi yang memungkinkan Korea Selatan mengeledah kapal-kapal Korea Utara. Korea Utara mengatakan mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian yang mengakhiri Perang Korea pada 1953.
28 Mei, 2009	Kim Jong Il	Tentara Korea Selatan dan Amerika Serikat meningkatkan kewaspadaan terhadap Korea Utara yang telah menghentikan gencatan senjata di kawasan semenanjung Korea.
01 Juni, 2009	Kim Jong Il	Korut dikabarkan telah memindahkan rudal terancangihnya ke lokasi peluncuran dan melarang semua kapal laut berlayar di lepas pantai negeri itu. Pemindahan rudal ini dilakukan setelah para pejabat Jepang dan Amerika Serikat menyatakan mereka tidak menerima Korut yang memiliki senjata nuklir.
10 Juni, 2009	Kim Jong Il	Anggota Dewan Keamanan PBB menyepakati naskah rancangan resolusi PBB tentang peningkatan sanksi terhadap Korea Utara, kata sejumlah diplomat.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
11 Juni, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara dan Selatan menggelar perundingan yang jarang dilakukan tentang kawasan industri bersama, Kaesong. Pembicaraan berlangsung kurang dari satu jam.
13 Juni, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara mengatakan akan “mempersenjatai” stok plutonium ditengah ancaman aksi militer atas sanksi PBB.
16 Juni, 2009	Kim Jong Il	Presiden Amerika Obama memperingatkan Korea Utara yang memiliki senjata nuklir adalah “ancaman serius” bagi dunia.
28 Juni, 2009	Kim Jong Il	Jepang dan Korea Selatan menyerukan sanksi terbaru PBB atas Korea Utara diterapkan secara ketat. Sanksi tersebut termasuk pemeriksaan kapal-kapal Korea Utara yang dicurigai mengangkut senjata terlarang.
04 Juli, 2009	Kim Jong Il	North Korea melakukan serangkaian uji coba rudal jarak jauh di saat Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaan 4 Juli. Berbagai laporan mengatakan sedikitnya enam rudal balistik tipe Scud diluncurkan, dengan jarak jangkauan mencapai 500 kilometer. Korea Selatan dan Jepang menyebut peluncuran terbaru ini, yang dilakukan menyusul peluncuran sebelumnya dalam beberapa pekan terakhir, sebagai “tindakan provokasi.”
07 Juli, 2009	Kim Jong Il	Dewan Keamanan PBB mengecam pengujian rudal oleh Korea Utara menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan regional dan internasional.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
19 Agustus, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Selatan siap meluncurkan roket pertamanya ke luar angkasa.</p> <p>Roket dua tingkat tersebut, dibangun dengan bantuan Rusia, akan mengudara dari kompleks antariksa Naro, sekitar 475km selatan kota Seoul.</p> <p>Roket ini, diberi nama Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1), akan berupaya mengorbitkan sebuah satelit dengan bobot 100kg.</p>
20 Agustus, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara mengirimkan “sinyal baik” yang ingin menghidupkan kembali dialog dengan AS mengenai program nuklir negara itu, demikian pernyataan seorangan politisi senior AS.</p>
26 Agustus, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara meluncurkan roket luar angkasa pertama, meskipun satelit ilmu pengetahuan gagal memasuki orbit yang tepat.</p> <p>Pejabat Korea Selatan menggambarkan peluncuran itu sebagai “sukses sebagian”.</p>
01 September, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara dan Selatan memulihkan lagi akses lalu lintas reguler di perbatasan yang dijaga ketat dan memulai lagi kawasan industri bersama.</p>
04 September, 2009	Kim Jong Il	<p>Korea Utara memasuki tahap final pengayaan uranium.</p> <p>“Tes pengayaan Uranium telah berhasil dilaksanakan dan proses itu dalam tahap penyelesaian,” tulis media pemerintah Korea Utara.</p>

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
13 Oktober, 2009	Kim Jong Il	Korea Utara sepakat untuk mengadakan pembicaraan dengan Korea Selatan sehari setelah melakukan uji rudal jarak pendek.  Pembicaraan akan difokuskan pada usaha menghindari banjir dan pertemuan para keluarga yang dipisahkan oleh Perang Korea.
10 November, 2009	Kim Jong Il	Bentrokan terjadi antara kapal perang angkatan laut Korea Utara dan Selatan seperti diberitakan kantor berita Korea Selatan Yonhap.
19 November, 2009	Kim Jong Il	Presiden AS Barak Obama dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mendesak Korea Utara untuk kembali ke perundingan nuklir.  Dua pemimpin ini menjanjikan bantuan ekonomi yang besar sebagai gantinya.
11 Desember 2009	Kim Jong Il	Korea Utara mengatakan akan terus bekerja sama dengan Amerika tentang program nuklirnya dan sepakat bahwa perundingan perlu dilanjutkan.  Kementerian luar negeri Korea Utara menyebutkan Pyongyang akan bekerja sama dengan Amerika guna mempersempit perbedaan.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
11 Januari 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Utara harus memperbaiki kondisi hak asasi manusia yang “buruk” jika ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat.</p> <p>Utusan khusus Amerika Serikat bidang hak asasi manusia untuk Korea Utara Robert King sedang berkunjung secara resmi ke Korea Selatan.</p> <p>Dalam sebuah editorial Tahun Baru di media massa, Korea Utara meminta diakhirinya permusuhan dengan Amerika Serikat.</p>
19 Januari 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Utara menyatakan tidak akan kembali ke meja perundingan untuk melucuti senjata nuklirnya bila sanksi terhadap negara komunis itu tidak dicabut.</p>
21 Januari 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Selatan dan Utara tidak menghasilkan kemajuan berarti setelah perundingan dua hari terkait masa depan kawasan industri gabungan Kaesong.</p>

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
24 Januari 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Utara menyatakan kemarahan atas pernyataan Korea Selatan bahwa negara itu bisa melancarkan serangan pencegahan terhadap berbagai fasilitas nuklir Korea Utara.</p> <p>Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-young mengatakan serangan bisa terjadi bila ada tanda-tanda Korea Utara menyiapkan serangan nuklir.</p> <p>Menanggapi pernyataan itu, Korea Utara mengatakan langkah itu dianggap sebagai pernyataan perang, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi negara itu.</p> <p>Kantor berita Korea Utara juga melaporkan negara itu siap melancarkan aksi militer yang cepat dan menentukan bila negara tetangganya benar-benar menyerang.</p>
27 Januari 2010	Kim Jong Il	Aksi baku tembak terjadi di dekat perbatasan laut yang disengketakan Korea Utara dengan Korea Selatan.
4 Februari 2010	Kim Jong Il	Keresahan sosial yang meningkat dilaporkan telah mendorong Korea Utara mengendurkan pembatasan pasar swasta
9 Februari 2010	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il mengatakan dirinya siap menjadikan Semenanjung Korea sebagai kawasan bebas senjata nuklir.
19 Februari 2010	Kim Jong Il	Korea Utara memberlakukan empat zona tembak maritim di dekat perbatasan laut yang dipersengketakan dengan Korea Selatan. Keempat zona tersebut berada di Laut Kuning, termasuk dua yang dekat dengan garis perbatasan, dan dua lagi di Laut Jepang (Laut Timur) di lepas pantai timur laut.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
6 Mei 2010	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il dilaporkan tengah berada di Beijing untuk menggelar pertemuan dengan pemimpin Cina dalam kunjungan rahasia ke negara itu.
16 Mei 2010	Kim Jong Il	Kapal Angkatan Laut Korea Selatan melepaskan dua tembakan peringatan kepada sebuah kapal patroli Korea Utara dalam pertikaian laut paling serius sejak sebuah kapal Korea Selatan tenggelam bulan Maret lalu. Dua kapal Korea Utara memasuki wilayah perbatasan laut yang dipertikaikan yang dikenal dengan nama Garis Batas Utara.
20 Mei 2010	Kim Jong Il	Korea Utara menuntut untuk melihat bukti menyusul laporan penyelidik internasional bahwa Pyongyang bertanggung jawab terhadap tenggelamnya kapal perang Korea Selatan bulan Maret lalu. Korea Utara menggambarkan dakwaan itu sebagai hal yang dibuat-buat dan menuntut bukti.

Tahun	Pemimpin	Aksi
24 Mei 2010	Kim Jong Il	<p>Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mendukung pengumuman Korea Selatan untuk menerapkan berbagai sanksi kepada Korea Utara terkait tenggelamnya kapal perang Cheonan.</p> <p>Sanksi itu mencakup pembekuan perdagangan dengan Korea Utara dan larangan kapal Korea Utara memasuki perairan Korea Selatan dan diadukannya Pyongyang ke Dewan keamanan PBB.</p> <p>Hillary Clinton juga menyatakan sikap mengancam Korea Utara harus dihentikan dan dia juga menyebutkan Amerika Serikat akan memperketat sanksi mereka terhadap negara komunis itu.</p>
24 Mei 2010	Kim Jong Il	<p>Amerika membenarkan bahwa pihaknya akan mengadakan latihan angkatan laut bersama dengan Korea Selatan, setelah sebuah laporan menuding Korea Utara menenggelamkan kapal perang Korsel, demikian menurut sejumlah pejabat Amerika.</p> <p>Pentagon mengatakan latihan bersama anti kapal selam dan latihan militer lain akan dimulai “dalam waktu dekat”.</p>
25 Mei 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Utara akan memutuskan semua hubungan dengan Korea Selatan. KCNA mengatakan Korut juga akan mengusir para pekerja Korsel dari sebuah pabrik yang dikelola bersama di perbatasan Korea Utara.</p> <p>Langkah itu diambil setelah sebuah laporan internasional menuding Korea Utara menenggelamkan sebuah kapal perang Korsel.</p>

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
27 Mei 2010	Kim Jong Il	Korea Utara mengumumkan pihaknya telah menarik diri dari satu kesepakatan yang bertujuan mencegah pertikaian senjata dengan Korea Selatan.
30 Mei 2010	Kim Jong Il	Para pemimpin Jepang, Cina, dan Korea Selatan mengemukakan penenggelaman kapal perang Korea Selatan mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan. Cina tidak mengutuk Korea Utara terkait insiden tersebut, kendati menghadapi tekanan dari Seoul agar menunjukkan sikap dengan jelas.
7 Juni 2010	Kim Jong Il	Korea Utara telah merombak jajaran kepemimpinan teras atas dalam sidang parlemen kedua yang jarang diadakan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il kali ini menghadiri sidang parlemen setelah absen dalam sidang pada 9 April. Choe Yong-rim menggantikan Kim Yong-il sebagai perdana menteri. Perdana menteri bertanggungjawab atas kebijakan ekonomi negara komunis itu.
26 Juni 2010	Kim Jong Il	Pemimpin delapan negara maju yang tergabung dalam G8 mengancam keras Korea Utara dan Iran. Perdana Menteri Kanada Stephen Harper mengatakan baik Korea Utara maupun Iran memiliki persenjataan yang mengancam negara-negara tetangga.
15 Juli 2010	Kim Jong Il	Amnesty International memperingatkan bahwa Korea Utara gagal menyediakan layanan kesehatan mendasar bagi rakyat. Penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok hak asasi manusia ini hampir tidak menemukan rumah sakit yang berfungsi, kebersihan yang buruk dan epidemi yang diperburuk oleh masalah kurang gizi yang luas terjadi.

Tahun	Pemimpin	Aksi
21 Juli 2010	Kim Jong Il	Dalam kunjungan ke Korea Selatan, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memberikan rincian singkat terkait sanksi terkait penjualan senjata dan impor barang-barang mewah. Ia mengatakan sanksi itu akan dicabut bila Korea Utara menghentikan sikap bermusuhan terhadap negara-negara tetangga.
23 Juli 2010	Kim Jong Il	Korea Utara menjanjikan “tanggapan fisik” atas latihan militer bersama Amerika Serikat-Korea Selatan. Jurubicara delegasi Korea Utara dalam forum tersebut mengatakan latihan militer bersama AS-Korsel merupakan contoh dari diplomasi kapal perang pada masa abad 19.
24 Juli 2010	Kim Jong Il	Korea Utara mengancam akan menggunakan “senjata nuklir” sebagai reaksi atas latihan bersama militer Amerika Serikat-Korea Selatan akhir minggu ini. Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, milik pemerintah Korea Utara mengatakan Pyongyang sudah bersiap melancarkan “perang suci balasan” kapan saja
30 Juli 2010	Kim Jong Il	Para kolonel dari Korea Utara dan Amerika Serikat telah melakukan pertemuan babak ketiga dengan bantuan mediasi PBB. Perundingan ini tetap berlangsung walau Korea Utara sempat mengancam keras latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
30 Agustus 2010	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il mengatakan kepada Beijing bahwa dirinya berharap perundingan enam negara soal nuklir negara itu segera dimulai.
23 November 2010	Kim Jong Il	Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Bosworth, menutup kemungkinan menggelar kembali perundingan enam pihak tentang Korea Utara selama Pyongyang melanjutkan program nuklir.
23 November 2010	Kim Jong Il	Korea Selatan mengatakan militer Korea Utara menembakan sekitar 200 peluru artileri ke salah satu pulau Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan bagian barat yang diperebutkan dengan Korea Utara. Tembakan peluru artileri Korea Utara disebutkan menewaskan seorang tentara Korea Selatan. Sejumlah rumah rusak dan melukai beberapa tentara serta warga sipil. Tembakan artileri ini terjadi ketika utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Stephen Bosworth menutup kemungkinan menggelar kembali perundingan enam pihak tentang Korea Utara selama Pyongyang melanjutkan program nuklir.
23 November 2010	Kim Jong Il	Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, memerintahkan kepada militer untuk menembakkan rudal ke Korea Utara bila negara itu melakukan “provokasi lebih lanjut”.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
24 November 2010	Kim Jong Il	<p>Masyarakat internasional mengancam tindakan Korea Utara menyerang pulau milik Korea Selatan di dekat perbatasan laut yang dipersengketakan kedua negara.</p> <p>Sekjen PBB Ban Ki-moon menyebut penembakan artileri Korea Utara ini sebagai insiden terburuk sejak Perang Korea.</p>
24 November 2010	Kim Jong Il	<p>Amerika Serikat dan Korea Selatan akan menggelar latihan militer gabungan dalam waktu dekat, untuk menanggapi serangan artileri Korea Utara.</p> <p>Keputusan ini diambil setelah Presiden Obama melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak.</p>
25 November 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Selatan akan menambah jumlah tentara di lima pulau di dekat perbatasan dengan Korea Utara, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.</p>
27 November 2010	Kim Jong Il	<p>Korea Utara menuduh Seoul menggunakan perisai manusia di pulau yang diserang oleh Korea Utara minggu lalu dan menewaskan dua warga biasa Korea Selatan.</p> <p>Korea Utara mengatakan pihaknya sudah mengirimkan “pemberitahuan lewat telepon” pada pagi hari sebelum penembakan “untuk mencegah bentrokan pada saat-saat terakhir” tetapi Korea Selatan melanjutkan ‘provokasinya”.</p>

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
29 November 2010	Kim Jong Il	“Kami menyerukan Cina supaya meminta Korea Utara tidak lagi mengambil langkah-langkah provokatif dan bertindak secara bertanggung jawab demi perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
30 November 2010	Kim Jong Il	Pemerintah Korea Utara mengatakan mereka memiliki ribuan sentrifugal nuklir di fasilitas yang baru diumumkan ke masyarakat internasional. Pyongyang mengatakan reaktor tersebut bisa dioperasikan sepenuhnya pada 2012 dan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pemerintah Korea Utara memastikan bahwa sentrifugal bisa digunakan untuk melakukan pengayaan uranium.
4 Desember 2010	Kim Jong Il	Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Kwan-jin mengancam akan merespon lebih keras termasuk serangan udara jika Korea Utara kembali menyerang.
5 Desember 2010	Kim Jong Il	Korea Utara memperingatkan Korea Selatan agar tidak melakukan provokasi, termasuk latihan militer dengan peluru tajam di batas laut yang dipersengketakan.
6 Desember 2010	Kim Jong Il	Angkatan Laut Korea Selatan mulai hari Senin (6/12) menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan dilakukan di tengah peringatan Korea Utara agar Korsel tidak melakukan kegiatan semacam ini di wilayah laut yang dipersengketakan. Pyongyang mengatakan latihan militer Korsel yang diperkirakan berlangsung selama tujuh hari ini menunjukkan bahwa Seoul ingin memicu perang.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
9 Desember 2010	Kim Jong Il	Cina menyerang balik komentar AS yang mengkritik Beijing karena tidak mengatasi sekutunya Korea Utara, dengan mengatakan ancaman militer tidak bisa menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea.
20 Desember 2010	Kim Jong Il	Korea Utara menyatakan tidak akan membalas meskipun Korea Selatan melakukan “provokasi berani” dengan menggelar latihan militer dengan peluru tajam di Pulau Yeonpyeong.
23 Desember 2010	Kim Jong Il	Menteri pertahanan Korea Utara mengatakan negaranya siap untuk “perang suci bagi keadilan” menggunakan senjata nuklir. Kim Yong-chun mengatakan latihan-latihan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dekat perbatasan merupakan persiapan perang melawan Utara. Dalam pertemuan di ibukota Utara, Pyongyang, Kim menuduh Korea Selatan ingin menciptakan Perang Korea baru.
8 Januari 2011	Kim Jong Il	Korea Utara memberikan sinyal untuk melakukan perdamaian dengan mengatakan ingin kembali membuka dialog dengan Korea Selatan.
28 Januari 2011	Kim Jong Il	Korea Selatan menolak tawaran perundingan antar parlemen yang diajukan. Seoul menganggap tawaran itu diajukan tanpa didasari Menanggapi penolakan ini, Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air Korea Utara meminta Selatan untuk menanggalkan rasa curiga berlebihannya.
9 Februari 2011	Kim Jong Il	Korea Selatan secara prinsip menyetujui usulan Korea Utara untuk membahas masalah kemanusiaan dalam pertemuan kedua negara.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
10 Februari 2011	Kim Jong Il	Pihak Korea Utara mengumumkan tidak akan ada pembicaraan baru dengan Korea Selatan.  Dalam pernyataannya, Militer Korea Utara menyalahkan Korea Selatan karena memiliki motif “jahat” dan telah membekukan tahap awal pembicaraan militer kedua negara itu.
27 Februari 2011	Kim Jong Il	Korea Utara menyatakan akan menembak Korea Selatan bila Korea Selatan terus menyebarkan selebaran propaganda. Korea Selatan telah melepaskan balon udara ke arah perbatasan kedua negara. Balon-balon itu berisi selebaran tentang gelombang demonstrasi menuntut demokrasi di Mesir dan juga berisi DVD. Selain itu, balon-balon dengan tujuan Korea Utara tersebut juga dilengkapi dengan paket makanan, pakaian dan radio.
15 Maret 2011	Kim Jong Il	Korea Utara menyatakan siap untuk kembali berunding terkait program pengayaan nuklir negara itu dalam pembicaraan enam pihak.
3 Mei 2011	Kim Jong Il	Jaksa di Korea Selatan mengatakan para peretas (hacker) Korea Utara berada di belakang serangan yang melumpuhkan bank terkemuka bulan lalu.
9 Juni 2011	Kim Jong Il	Korea Utara menyatakan tidak ada ruang untuk berdialog dengan Korea Selatan. Pernyataan ini keluarisaat utusan Korsel berkunjung ke Beijing.

<b>Tahun</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Aksi</b>
22 Juli 2011	Kim Jong Il	Para pejabat senior Korea Utara dan Korea Selatan akan menggelar pembicaraan, Jumat (22/7), di Bali, demikian informasi yang disampaikan seorang pejabat anggota rombongan Menlu AS Hillary Clinton. Para pejabat Korea Utara dan Selatan berada di Bali untuk menghadiri dialog keamanan ASEAN Regional Forum, Sabtu (23/7).
24 Agustus 2011	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il melakukan perundingan yang jarang dilakukan dengan Presiden Rusia Dmitry Medvedev tentang program nuklir Pyongyang dan kerja sama ekonomi.
30 November 2011	Kim Jong Il	Pernyataan pejabat Korut lewat media pemerintah yang terakhir ini dilihat sebagai sebuah pernyataan provokatif yang ditujukan kepada Washington dan Seoul.
11 Desember 2011	Kim Jong Il	Korea Utara memperingatkan Korea Selatan bahwa Seoul akan menghadapi konsekwensi bila menggelar kegiatan penyalan lampu pohon Natal di dekat perbatasan.
19 Desember 2011	Kim Jong Il	Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il meninggal dunia dalam usia 69 tahun, demikian isi pengumuman dalam siaran televisi pemerintah Korut.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan memiliki konsentrasi pada penegakan Hak Asasi Manusia, Politik Lokal, dan Pembangunan Berkelanjutan. Riwayat pendidikan penulis antara lain, penulis menempuh S1 Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005-2009 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Setelah lulus dari jenjang S1 penulis melanjutkan studinya S2 di Universitas Gadjahmada dan mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saat ini penulis juga merupakan ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo masa kerja 2015-2020.

